

**PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI
PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI
SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Adab dan Bahasa

IAIN Surakarta



Oleh:

ANIS FATIMAH

NIM 16.323.1026

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2020

**PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI
RAYA IDUL FITRI**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Adab dan Bahasa

IAIN Surakarta

Oleh:

ANIS FATIMAH

NIM 16.323.1026



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA**

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782404
Fax. (0271) 782774 Website: www.iaain-surakarta.ac.id e-mail:
fab.iaainsurakarta@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Anis Fatimah
NIM : 163231026

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa
IAIN Surakarta
Di Tempat

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr:

Nama : Anis Fatimah
NIM : 163231026
Judul : Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah
Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 3 November 2020
Pembimbing

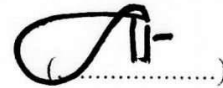
Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd., M.A.

NIP. 19880430201801 2 001

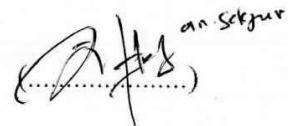
PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri* yang disusun oleh Anis Fatimah telah di pertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta pada hari Selasa, 3 November 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Dr. Muh. Fajar Shodiq, M.Ag
NIP 19701231 200501 1 013



Penguji I,
Merangkap Ketua : Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si
NIP 19700410 199703 1 004



Penguji II,
Merangkap Sekretaris : Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd., M.A
NIP 19880430 201801 2 001

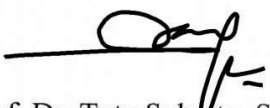


(Pembimbing)

Surakarta, 10 November 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa



Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag
NIP 19710403 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Joko Santoso & Ibunda Suwanti , adikku Ismail dan kakakku mas Ihsan yang tiada henti-hentinya memberikan cinta, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk saya.
2. Seluruh Dosen SPI yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menggapai masa depan yang penuh gelombang.
3. Spesial kepada teman temanku Reni, Jami, Ibnu dan Agung atas segala bantuan, hiburan, dukungan serta semangat dan selalu ada buat saya ketika saya frustrasi atas tulisan saya ini
4. Almamater IAIN Surakarta.
5. Dan untuk seluruh teman-temanku SPI, teman kos, dan teman SMA saya, saya harap kita semua bisa sukses dan bisa menggapai mimpi kita masing-masing.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa’ : 59)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anis Fatimah

NIM : 163231026

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman Hari Raya Idul Fitri, adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.

Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini adalah plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Surakarta, 3 November 2020

Yang Menyatakan,


Anis Fatimah

NIM 163231026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan yang lurus dalam ajaran agama Islam dan kepada para keluarga, sahabat, segenap pengikut serta pecintanya yang selalu meneladani perilaku dan akhlakunya.

Dalam skripsi ini penulis membahas tulisan mengenai **“Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sejarah Peradaban Islam pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, namun terdapat peran dan iringan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih patut penulis ucapkan kepada segenap pihak yang turut andil dan telah banyak membantu penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Surakarta

2. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.
3. Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.
4. Dr. H. Muh. Fajar Shodiq, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama proses belajar di bangku perkuliahan.
5. Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd., M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan banyak saran dan arahan mengenai penelitian ini.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, kasih sayang yang luar biasa dan dukungan yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam rangkaian kata-kata.
7. Pak Aan Ratmanto, M.A yang memberikan inspirasi mengenai judul skripsi ini serta membantu mencarikan data skripsi penulis.
8. Para dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan Ilmu kepada penulis selama proses belajar di bangku perkuliahan.
9. Para staf Tata Usaha dan Akademik yang telah memberikan bantuan untuk keperluan administrasi selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi.
10. Para staf di Momumen Pers Nasional Surakarta dan Jogja Library Center yang telah membantu menyediakan sumber data penelitian skripsi ini.
11. Teman teman jurusan Sejarah Peradaban Islam, terutama Succes Humans (Reni, Jami, Agung, dan Ibnu) yang selalu menemani perjalanan dalam

penulisan skripsi ini serta dukungan dan motivasi kalian yang menguatkan penulis ketika putus asa.

12. Teman kos Alifa (Endah dan Rizki) yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
13. Teman sekamar Kos Gimbu (Indriana) yang selalu memberi semangat dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
14. Teman SMA geng koyok (Rischa, Ayun dan Mahmudah) yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis dengan segala candaan kalian serta mendengarkan cerita penulis ketika dilanda kesulitan.
15. Day6 yang selalu memberikan hiburan ketika penulis mengalami rasa bosan, putus asa dan sedih, musik kalian membantu menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Day6 musik kalian sangat menginspirasi penulis terimakasih banyak.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 3 November 2020

Penulis

Anis Fatimah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 9 |
| C. Ruang lingkup Penelitian | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Tinjauan Pustaka | 12 |
| F. Kerangka Konseptual | 16 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Penelitian | 22 |
| BAB II. KETERLIBATAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM MENGATUR URUSAN AGAMA ISLAM | 26 |
| A. Peran Pemerintahan Orde Baru dalam Urusan Agama | 26 |
| 1. Agama dan Negara | 26 |
| 2. Keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam Urusan Agama Islam | 30 |
| 3. Pandangan Umat Islam Terhadap Pemerintah Orde Baru | 32 |
| 4. Politik Islam Pada Masa Orde Baru | 35 |
| 5. Peran Penting Kementrian Agama Pada Masa Orde Baru | 40 |
| B. Peran Organisasi Islam Pada Masa Orde Baru | 44 |
| 1. Peran NU dan Muhammadiyah pada Masa Orde baru | 44 |
| 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru | 46 |

| | |
|---|------------|
| 3. ICMI Pada Masa Orde Baru..... | 49 |
| BAB III. SEPAK TERJANG POLITIK NU DAN MUHAMMADIYAH PADA MASA ORDE BARU | 58 |
| A. Sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik | 58 |
| B. Hubungan Politik antara NU dan Muhammadiyah..... | 71 |
| C. Sepak Terjang Politik NU dan Muhammadiyah dengan Pemerintah Orde Baru..... | 74 |
| BAB IV. PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI | 82 |
| A. Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru..... | 82 |
| 1. Hari Raya Idul Fitri | 82 |
| 2. Kriteria Penetapan Hari Raya Idul Fitri | 88 |
| B. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Menyeragamkan Hari Raya Idul Fitri..... | 90 |
| 1. Perbedaan dan Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru | 90 |
| 2. Didirikannya BHR (Badan Hisab dan Rukyat) | 97 |
| C. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Menentukan Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru | 101 |
| 1. Metode NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Hari Raya Pada Masa Orde Baru | 101 |
| 2. Aspek Keyakinan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah | 105 |
| 3. Aspek Keyakinan Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah | 108 |
| D. Pandangan NU dan Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri..... | 111 |
| 1. Pandangan NU..... | 111 |
| 2. Pandangan Muhammadiyah | 113 |
| BAB V. PENUTUP | 118 |
| A. Kesimpulan | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |

| | |
|------------------------|-----|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 134 |
|------------------------|-----|

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------------|---|
| ABRI | : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| BHR | : Badan Hisab dan Rukyat |
| BKAM | : Badan Koordinasi Amal Muslim |
| Depag | : Departemen Agama |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| FKIP | : Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia |
| G30 S | : Gerakan 30 September |
| GBHN | : Garis Besar Haluan Negara |
| Golkar | : Golongan Karya |
| HPT | : Himpunan Putusan Tarjih |
| ICMI | : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia |
| IPKI | : Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia |
| ISII | : Ikatan Sarjana Islam Indonesia |
| IUD | : Intra Uterine Devices |
| Kakanwil Depag | : Ketua Kantor Wilayah Departemen Agama |
| KB | : Keluarga Berencana |
| Kemenag | : Kementerian Agama |
| KH | : Kyai Haji |
| KNIP | : Komite Nasional Indonesia Pusat |
| LHR | : Lembaga Hisab Rukyat |
| LIPI | : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| LPM-SDM | : Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |

| | |
|-----------|---|
| LP3ES | : Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial |
| LPPOM MUI | : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia |
| LSAF | : Lembaga Studi Agama dan Filsafat |
| MABIMS | : Menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura |
| Masyumi | : Majelis Syuro Muslimin Indonesia |
| MIAI | : Majelis Islam A'la Indonesia |
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| MPRS | : Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara |
| MTQ | : Musabaqah tilawatil Qur'an |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| Muker BHR | : Musyawarah Kerja Badan Hisab dan Rukyat |
| Munas | : Musyawarah Nasional |
| Murba | : Muiyawarah Rakyat Banyak |
| NU | : Nahdlatul Ulama |
| Ormas | : Organisasi Masyarakat |
| Parmusi | : Partai Muslimin Indonesia |
| Parkat | : Partai Katolik |
| Parkindo | : Partai Kristen Indonesia |
| PBNU | : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama |
| PDI | : Partai Demokrasi Indonesia |
| PDII | : Pusat Dakwah Islam Indonesia |
| Persami | : Persatuan Sarjana Muslim Indonesia |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Persis | : Persatuan Islam |
| Perti | : Persatuan Tarbiyah Islam |
| PHI | : Pengadilan Hubungan Industrial |
| PII | : Partai Islam Indonesia |
| PKI | : Partai Komunis Indonesia |
| PNI | : Partai Nasional Indonesia |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| POB | : Pos Observasi Bulan |
| Porkas | : Pekan Olahraga dan Ketangkasan |
| PP Muhammadiyah | : Pimpinan Pusat Muhammadiyah |
| PPP | : Partai Persatuan Pembangunan |
| PSII | : Partai Syarikat Islam Indonesia |
| PTIQ | : Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an |
| PWNU | : Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama |
| RUU | : Rancangan Undang Undang |
| SDSB | : Sumbangan Dana Sosial Berhadiah |
| SI | : Sarekat Islam |
| Supersemar | : Surat Perintah Sebelas Maret |
| TNI | : Tentara Negara Indonesia |
| UUD | : Undang Undang Dasar |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------------------------|--|
| Abstain | : Sebuah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, abstain dapat diartikan golongan putih (golput) golongan yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. |
| Ahlusunnah Wal Jama'ah | : golongan yang menganut i'tiqad sebagaimana dianut oleh nabi Muhammad Saw dan para sahabat. |
| Akhlak | : Perilaku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu yang baik. |
| Amar Makruf Nahi Munkar | : Perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. |
| Bid'ah | Perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. |
| Bulan Qamariah | : Sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan atau lunar disebut juga sistem penanggalan hijriyah. |
| Community College | : Perguruan tinggi dua tahun yang memberikan gelar associate (diploma) yang dapat ditransfer dan juga sertifikasi. |
| Corporatic | : Tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. |
| de-ideologisasi politik | : Berhentinya proses penyebaran ideologi politik |
| Desentralistik | : Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. |
| Fikhiyah | : Istilah yang digunakan ulama fiqih untuk pengembangan cakupan suatu hukum. |

| | |
|---------------|---|
| Hala Bi Halal | : Kegiatan silaturahmi dimana diisi dengan saling memaafkan selama hari raya Idul Fitri. |
| Hierarki | : Urutan atau jenjang jabatan |
| Hijriah | : Penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting lain umat Islam. |
| Hilal | : Bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah terjadinya konjungsi pada arah dekat matahari terbenam yang menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. |
| Hisab | : Perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. |
| Hizbullah | : Organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syi'ah didirikan tahun 1982 yang berbasis di Libanon. |
| Ihtiyat | : Kehati-hatian |
| Ijtihadiyyah | : Masalah yang dibebankan kepada ahli Ijtihad, yang tidak lain adalah pada Ulama. Usaha sungguh-sungguh dari ulamā tersebut dengan menggunakan akalanya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara qath'i atau pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. |
| Ijtima' | : Peristiwa dimana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari bumi. |
| Ilmu Falak | : Ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing. |
| Istikmal | : Sebuah istilah dimana kita menyempurnakan bulan Ramadhan selama 30 hari sebagai bentuk |

penentuan awal bulan Syawal.

- Korporatisme : Ideologi politik yang menganjurkan organisasi masyarakat oleh kelompok perusahaan berdasarkan kepentingan bersama mereka.
- Neo-Islam : Gerakan yang dilakukan oleh kaum modernis muslim dalam rangka mempersatukan dan memperkuat masyarakat muslim melalui upaya pembaharuan iman dan proses reinterpretasi warisan peradaban Islam masa lalu ke dalam dunia kontemporer.
- Operasional Design Strategy : Strategi desain operasional
- Panasea : Sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa pemerintahan Orde Lama karena demokrasi ditempatkan pada titik yang sangat rendah.
- Public Policy Planning : Perencanaan kebijakan publik.
- Rukyat : Aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima.
- Seikerei : Penghormatan dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit.
- Sekularisasi : Hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama.
- Sekuler : Sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.
- Sidang Itsbat : Sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang sedang terjadi.
- Tajdid : Suatu upaya atau gerakan pembaruan yang memperjuangkan kembalinya ajaran Islam yang murni.

| | |
|-----------------|---|
| Teokrasi | : Bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. |
| Terkooptasi | : Pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada. |
| Truth claim | : Klaim atas kebenaran. |
| Ulil Amri | : Pemimpin |
| Wilayatul Hukmi | : Memberlakukan penentuan awal bulan untuk satu wilayah hukum atau pemerintahan. |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 4.1. Bentuk Silaturahmi Masyarakat | 83 |
| Gambar 4.2 Pelaksanaan solat Idul Fitri tahun 1996 di lapangan dengan dipimpin oleh presiden Soeharto yang dikawal oleh dua penjaga | 84 |
| Gambar 4.3 Suasana para pemudik pada tahun 1983, di stasiun dan terminal yang padat..... | 86 |
| Gambar 4.4 Kalender Hijriah pada tahun 1996 | 107 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|--------------|--|-----|
| Lampiran 1. | Transkrip wawancara dengan Bapak Budi Santoso, anggota DPRD periode 1998-2007, aktif di PPP pada masa Orde Baru dan anggota Muhammadiyah di Sragen sampai sekarang..... | 134 |
| Lampiran 2. | Transkrip wawancara dengan Bapak Moh. Irsyam, S.Pd., anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al-Anshori di Colomadu sampai sekarang..... | 137 |
| Lampiran 3. | Foto Wawancara Bersama narasumber..... | 139 |
| Lampiran 4. | Suasana menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1983..... | 140 |
| Lampiran 5. | Kalender hijriah tahun 1996..... | 141 |
| Lampiran 6. | Terbentuknya MUI dan diangkatnya buya hamka sebagai ketua pertama MUI pada tahun 1975..... | 142 |
| Lampiran 7. | Para pemudik pada tahun 1990..... | 142 |
| Lampiran 8. | Hidangan Lebaran pada tahun 1987..... | 143 |
| Lampiran 9. | Penentuan awal bulan qamariyah pada tahun 1975 menggunakan metode hisab..... | 144 |
| Lampiran 10. | Pelaksanaan shalat Id di lapangan serta hala bi halal di istana negara pada tahun 1953..... | 145 |
| Lampiran 11. | Keterlibatan umat Islam menjelang pemilu tahun 1987..... | 146 |
| Lampiran 12. | Hasil penetapan Muhammadiyah dalam menetapkan Idul Fitri pada tahun 1987..... | 147 |
| Lampiran 13. | Suasana hala bil halal tahun 1977..... | 148 |
| Lampiran 14. | Pembagian zakat fitrah pada tahun 1953..... | 149 |
| Lampiran 15. | Sambutan menteri penerangan pada hari raya idul fitri pada tahun 1977..... | 149 |
| Lampiran 16. | Fatwa MUI pada tahun 1983..... | 150 |

ABSTRAK

Anis Fatimah, November 2020, *Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri*, Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, IAIN Surakarta.

Adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan penyeragaman Idul Fitri menuntut beberapa kelompok organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU melaksanakan Idul Fitri secara bersamaan meskipun dalam penentuannya selalu berbeda metode. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana keterlibatan pemerintah terhadap agama? Bagaimana politik NU dan Muhammadiyah ketika Orde baru? Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman Idul Fitri?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kedua organisasi NU dan Muhammadiyah dalam penyeragaman hari raya Idul Fitri pada masa Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan literatur terhadap buku, jurnal, koran, majalah dan foto yang berkaitan dengan objek penelitian serta wawancara kepada pelaku sejarah yang terlibat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru sangat mempengaruhi politik di kalangan Ormas Islam dalam menentukan waktu Idul Fitri. Kebijakan tersebut menghasilkan keputusan yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia terutama oleh Ormas Islam, sehingga dalam penetapan awal bulan *qamariah* pada masa Orde Baru hampir selalu seragam. Maka ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan *qamariah* pada masa Orde Baru, pemerintah mengambil langkah *kooptasi* bahkan *represif*. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode penetapan awal bulan *qamariah* antara Organisasi Islam tertentu dengan pemerintah Orde Baru. Diantara banyak organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU adalah organisasi massa Islam yang sering terlibat. Akhirnya Pemerintah Orde Baru dengan kebijakannya dapat menyatukan pandangan Muhammadiyah dan NU dalam penyeragaman penentuan awal Idul Fitri dengan kebijakannya yang absolut.

Kata kunci : *Muhammadiyah, NU, kebijakan Orde baru, Penyeragaman Idul Fitri*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai hasil kompromi antara gagasan negara Islam dan negara sekuler. Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk beragama Islam sebagai kelompok mayoritas.¹ Hubungan agama dan negara di Indonesia tidak sepenuhnya menyatu dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk atau memerlukan legitimasi agama. Hubungan agama dan negara tersebut menjadi salah satu isu penting untuk dipertimbangkan, termasuk dalam kajian demokrasi. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama (*teokratis*), namun warga negaranya bisa menikmati kebebasan beragama semenjak UUD 1945 diberlakukan.²

Di Indonesia agama adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat serta pemerintahan, karena merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan politik

¹ Publikasi BPS pada tahun 2019, Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 266,91 juta jiwa, yang terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan, dengan tingkat laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,4 % per tahun. Sementara distribusi menurut agamanya, di tahun 2019, kira-kira 87,17 % dari penduduk Indonesia adalah Islam, 9,86% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Budha. Diakses di www.bps.go.id pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 13.51.

² Masykuri Abdillah, ‘*Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi*’. Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. II, 2013, hlm.250

Indonesia. Peran negara dalam bidang agama sebagai bentuk pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia untuk memobilisasi seluruh kekuatan massa, termasuk umat Islam yang secara statistik merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia. Salah satu unsur terpenting dalam kehidupan politik Indonesia yakni untuk menciptakan keseimbangan dalam hal ekonomi dan politik yang mendukung pemerintah dalam menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Maka segala permasalahan yang menyangkut keagamaan akan selalu melibatkan pemerintah karena menyangkut ketatanegaraan.³

Banyak negara di Asia termasuk di Indonesia mencengkeramkan kekuasaannya dengan sempurna melalui organisasi seperti perhimpunan dagang, organisasi golongan, dan partai politik. Ini mengakibatkan terjadinya banyak komunikasi “atas-bawah” dan hampir tidak ada yang “bawah-atas”. Banyak organisasi non-pemerintah juga mengikuti pola yang sama, sehingga mereka memainkan peran sebagai organisasi gerakan sosial untuk mendorong kesetaraan relasi kuasa, dengan mempengaruhi kebijakan, penegakan hukum, perilaku pasar dan sektor swasta, dengan tujuan untuk memanfaatkan keluhan kolektif dan struktur kesempatan politik untuk membangun struktur mobilisasi.⁴ Persinggungan organisasi tersebut dengan politik bukanlah sesuatu hal yang baru, mereka bergerak ke dalam politis untuk memperkuat kelembagaannya serta mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

³ *Ibid*, hlm. 255

⁴ David Ardhian, dkk, "*Peran Dan Strategi Organisasi Politik Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup Ngo's Roles And Strategies In The Environmental Politic Arena*". Jurnal Sosiologi Institut Pertanian Bogor Vol. 4 No. 3, 1997. hlm. 210

Menyadari hal tersebut, Orde Baru lahir sebagai harapan besar bagi umat Islam untuk mengembalikan politik “atas-bawah” menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Adanya demokrasi maka perjuangan politik Islam akan meningkat karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, sehingga peluang Islam dalam politik menjadi semakin besar. Kenyataannya tidak demikian, Islam di Indonesia seolah selalu berada di persimpangan jalan, karena mereka merasa berada di satu pihak dan pemerintah berada dipihak lain serta memandang satu sama lain dengan curiga.⁵

Dalam sejarahnya, lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah saat jatuhnya rezim Soekarno yang terjadi ketika ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian memberikan mandat kepada Let. Jend. Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah. Satu hari setelah jenderal Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret, ia lantas melarang adanya PKI dan organisasi-organisasi massanya, kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS 1966 yang merupakan titik awal masa Orde Baru. Di kalangan politik Islam Indonesia sendiri pada masa Orde Baru terdapat masalah mengenai kecenderungan politik atau aliran mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.⁶

⁵ Okrisal Eka Putra, ‘*Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baku*’. Jurnal Dakwah, Vol.IX No. II, 2008. hlm. 185

⁶ Asmaul Fauziyah, ‘*Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989*’.(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). hlm.4

Umat Islam mulai berinisiatif memperbaiki kondisi tersebut melalui politik. Diantara banyaknya organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang banyak terlibat dalam politik pemerintahan.⁷ Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa. NU adalah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara ortodoksi Islam yang dipegang oleh kebanyakan ulama Indonesia, yakni ortodoksi *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dan umat Islam yang mengikuti ortodoksi ini biasa disebut dengan kaum Sunni.⁸ Sebaliknya, Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan sosial-keagamaan dan dikenal juga sebagai gerakan *tajdid* atau gerakan pembaharuan, dimana amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang sosial seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial.⁹

Diantara kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa, salah satu peran NU dan Muhammadiyah adalah menentukan awal bulan qamariyah. Khususnya umat Islam yang jumlahnya mayoritas, mereka memiliki hari besar Islam yang dirayakan setiap tahunnya yakni hari raya Idul Fitri. Sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri para ahli agama akan memutuskan waktu pelaksanaan tersebut dengan sesegera mungkin, karena merupakan momen penting yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Adanya perbedaan cara yang ditempuh umat Islam dalam penetapan awal bulan qamariyah mengakibatkan

⁷ Martin van Bruinessen, "*NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*" (Yogyakarta: LKiS, 2008). hlm.10

⁸ Nurul Shobacha, '*Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru*'. Jurnal Review Politik, Vol. 02 No. 01, 2012. hlm.100

⁹ Asmaul Fauziyah. *op.cit*, hlm. 5

perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam serta para ahli hukum Islam dalam menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang melakukannya, prosedur dan mekanismenya.¹⁰

Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi Islam yang sering terlibat dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mereka seringkali mengundang polemik dan dihadapkan situasi serta hal-hal yang berseberangan. Hal ini mengakibatkan sering terjadi perbedaan diantara keduanya karena Muhammadiyah sering disimbolkan dengan ormas modern sedangkan NU identik dengan ormas tradisional. Metode yang digunakan dalam menentukan waktu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah juga berbeda.¹¹ Kedua organisasi ini seringkali terjadi perbedaan waktu pelaksanaan Idul Fitri karena memiliki kriteria berbeda dalam menentukan awal bulan *qamariah*¹² di Indonesia.¹³

Selama bertahun-tahun umat Islam Indonesia selalu terjebak dalam perdebatan tiada akhir, tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. *Truth claim*¹⁴ ormas keagamaan dan belum dapat diterimanya, sehingga otoritas tunggal di negeri ini menjadi pemicu adanya perbedaan yang tidak

¹⁰ H. Taufiq, "*Mekanisme Penelitian Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*" (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004). hlm.10

¹¹ Oki Yosi, "*Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)*" (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011). hlm.1

¹² Kalender Qamariah atau *lunar calendar* adalah kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan selama mengorbit (ber-evolusi terhadap) bumi. Kalender Islam adalah murni *lunar calendar* yang mengikuti siklus fase Bulan tanpa ada keterikatan dengan tahun tropis. Itulah sebabnya, jumlah hari dalam kalender Islam selalu secara sistematis bergeser (lebih pendek sekitar 11,53 hari per tahun) daripada Gregorian. Dalam buku Tono Saksono, "*Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab*". (Jakarta: Amytas Publicita, 2007). hlm.48

¹³ Wildani Hefni, "*Ideological Political Contestation in the Discourse of Hisab Rukyat in Indonesia*". Jurnal Penelitian, Vol. 16 No. 01 ,2019, hlm.80

¹⁴ Truth Claim adalah klaim atas kebenaran

berkesudahan. Persoalan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia secara umum bersifat *desentralistik* artinya, organisasi Islam masing-masing memiliki keputusan sesuai dengan metode dan kriteria yang ditetapkan menjadi komitmen organisasi dalam perkembangannya. Penetapan kriteria ini diikuti oleh 5 organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan Al-Washliyah yang seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda.¹⁵

Kaitannya dengan Kalender Hijriah, perbedaan yang nampak antara NU dan Muhammadiyah terletak pada hisab dan rukyat. Pemilihan dan penggunaan hisab dan rukyat tersebut hanya terfokus pada awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sehingga sering muncul perbedaan, padahal kalender Hijriah merupakan satu kesatuan. Bagi NU kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan *rukyatul hilal* di lapangan, meskipun sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.¹⁶

Tegasnya, rukyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan yaitu melihat munculnya bulan diufuk barat dengan mata telanjang. Muhammadiyah mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia, jadi dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal,

¹⁵ Nihayatur Rohmah, "Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Itsbat Pemerintah Dan Ikhbar Ormas Islam". Jurnal An-Nuha, Vol. 6 No 02, 2019, hlm.129

¹⁶ Sakirman, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", Jurnal El Falaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 01. No. 01, 2017. hlm. 256

Muhammadiyah tidak semata-mata dengan rukyat tapi juga menggunakan hisab yang bersandarkan kepada perhitungan-perhitungan Ilmu Falak.¹⁷

Bagi Muhammadiyah yang mengembangkan nalar rasional-ilmiah, rukyat tidak semata-mata dipahami secara literal-parsial, tetapi didialogkan dengan ayat-ayat terkait, seperti Q.S. al-Baqarah ayat 185 dan Q.S. Yunus ayat 5, sehingga metodologi yang dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan qamariah sangat elastis-produktif.¹⁸

Dalam hal ini, PBNU telah membuat “Pedoman Rukyah dan Hisab” (1994) yang merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan menggunakan *rukyatul hilal* atau *istikmal* dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Prinsip yang digunakan adalah *wilayatul hukmi*, yaitu *ulil amri* (pemerintah) dapat menetapkan *rukyatul hilal* di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. *Itsbat* (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal bulan qamariyah dengan hisab *wujudul hilal* melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, namun metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis.¹⁹

¹⁷ Mahrus Irsyam, "Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis". (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm.15

¹⁸ Sakirman. *op.cit*, hlm. 259

¹⁹ *Ibid*, hlm.11

Mengatasi masalah perbedaan ini, Pemerintah berinisiatif untuk menyatukan kalender *hijriyyah*²⁰ sebagai kriteria menyatukan perbedaan waktu hari raya. Berbagai pertemuan diadakan untuk membahas jalan tengah yang kompatibel di Indonesia. Pemerintah bersedia untuk mengawasi wacana hisab rukyat, dalam hal ini penentuan awal bulan qamariah yakni dengan melakukan negosiasi pendekatan untuk menemukan solusi. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang memicu perselisihan dan karena banyaknya mazhab dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia, maka pemerintah tergugah untuk mengupayakan penyatuan. Departemen Agama pada masa Orde Baru berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dengan pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan umum. Kebijakan pemerintah melalui Organisasi Badan Hisab Rukyat dibentuk dengan tujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.²¹

Adanya kebijakan dari pemerintah Orde Baru tersebut menjadikan pelaksanaan waktu jatuhnya Ramadhan, Idul Fitri ataupun Idul Adha di Indonesia hampir selalu seragam sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dan merayakan hari raya secara bersama-sama. Keputusan yang diambil oleh pemerintah pada masa Orde Baru wajib ditaati oleh semua kalangan, sehingga

²⁰ *Hijriah* adalah jenis kalender yang dipakai oleh umat Muslim dunia. Kalender ini dibentuk berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 119.

²¹ Siti Tatmainul Qulub. "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih". Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 01, 2015, hlm.110

kecil kemungkinan untuk berani melawan keputusan pemerintah pada saat itu.²² Kebijakan tersebut membuat masalah ini masuk kedalam Munas (Musyawarah Nasional) karena pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia telah lebih dahulu mengumumkan awal bulan Ramadan berdasarkan perhitungan hisab.²³

Penulis dalam hal ini akan menggambarkan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri yang berlaku bagi warga NU, Muhammadiyah serta umat Islam lain yang mempercayainya. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang bersifat hierarki, dimana kekuasaan pada saat itu membatasi pilihan dan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Hal inilah yang dianggap oleh penulis adalah sesuatu yang perlu untuk diteliti tentang bagaimana Pandangan Muhammadiyah dan NU saat itu yang ikut terlibat dalam menentukan awal bulan qamariah namun terkendala oleh kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan hari Raya Idul Fitri.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini pertama difokuskan pada kajian terhadap pandangan politik NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Awalnya terdapat beberapa kali perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri pada masa Orde Baru. Akhirnya pemerintah Orde Baru membuat kebijakan mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri antara Ormas Islam dengan pemerintah Orde Baru. Kedua, mengenai perjalanan politik ormas Islam terbesar

²² Sakirman. *op.cit*, hlm. 2

²³ Mahrus Irsyam. *op.cit*, hlm. 15

di Indonesia yakni antara ormas NU dan Muhammadiyah dengan politik pemerintah Orde Baru. Pada awalnya hubungan keduanya mengalami ketegangan, sehingga terdapat kesan yang cukup kuat bahwa kebijakan pemerintah sangat dominan diwarnai oleh kepentingan anti-Islam. Konfigurasi politik rezim Orde Baru mulai berubah pada era 80-an terutama terhadap umat Islam karena pemerintah berusaha untuk merangkul umat Islam yang pada saat itu tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan massa dalam pemilu pada tahun 1988. Sejak saat itu, titik awal perubahan hubungan negara dengan Islam mulai nampak negara tidak lagi melihat Islam sebagai ancaman. Kebijakan pemerintah yang sedikit menegatkan Islam sedikit demi sedikit mulai dilonggarkan, bahkan negara menjadi akomodatif terhadap Islam. Batasan yang peneliti tulis ini diambil pada masa Orde Baru yakni pada tahun 1966-1998, untuk mengetahui perkembangan politik Islam pada masa Orde Baru dan pandangan organisasi massa Islam terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Orde Baru saat itu. Penulis memaparkan penelitian ini agar mampu mengetahui permasalahan yang terjadi saat itu. pembatasan masalah ini jelas diperlukan karena suatu penelitian akan bermanfaat jika dilakukan secara terbatas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas telah dikemukakan mengenai gambaran singkat mengenai pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penulis membuat fokus penelitian dan dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Keterlibatan Pemerintah Orde Baru Dalam Urusan Agama Islam?
2. Bagaimana Sepak Terjang Politik Islam antara NU dan Muhammadiyah Dengan Pemerintah Orde Baru?
3. Bagaimana Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri?

C. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan mengenai hubungan agama dengan pemerintah Orde Baru, keterlibatan pemerintah dalam urusan agama, kondisi politik Islam pada masa Orde Baru, sepak terjang politik Islam antara NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah pada masa Orde Baru serta pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penulis mengambil Orde Baru karena pada masa itu pemerintah berusaha melegitimasi kekuasaannya dengan menggait politik Islam di Indonesia untuk patuh terhadap kebijakan yang dibuatnya baik yang berhubungan dengan agama maupun tidak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang *pertama*, mampu mengetahui bagaimana keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam mencampuri urusan agama, seperti menggunakan Kementerian Agama untuk melibatkan urusan agama dengan politik, kemudian didirikannya MUI dan perannya dalam pemerintah serta didirikannya ICMI diakhir pemerintahan Orde Baru sebagai peran penting dalam

birokrasi negara dan politik serta kekuatan baru yang bernuansa Islam. *Kedua*, mampu mengetahui bagaimana sepak terjang politik Islam NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru diantaranya mengetahui sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik terutama ketika Orde Baru, serta hubungannya dengan pemerintah Orde Baru. *Ketiga*, mampu mengetahui bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru dalam penyeragaman hari raya Idul Fitri diantaranya pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap penyeragaman waktu Idul Fitri yang terkadang ada yang berbeda metode dan hasil dengan pemerintah namun harus tetap mematuhi kebijakan pemerintah.

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan bertambahnya penulisan sejarah mengenai hubungan agama dengan pemerintah Orde Baru, keterlibatan pemerintah dalam urusan agama, kondisi politik Islam pada masa Orde Baru, sepak terjang politik Islam antara NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah pada masa Orde Baru serta pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penulis melakukan penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan seputar politik pada masa Orde Baru serta memberi kontribusi kepada para pembaca dalam memperkaya wacana khazanah mengenai pemikiran politik khususnya politik Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu tinjauan pustaka untuk memperkuat data-data atau teori yang menjadi landasan bagi penulis. Tinjauan

pustaka merupakan telaah pustaka terhadap literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan. Beberapa karya tulis atau literatur yang penulis gunakan untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan judul karya tulis tersebut yang sekaligus merupakan landasan teori penulisan karya ilmiah ini sebagai bahan perbandingan. Adapun tulisan tulisan yang senada dengan tulisan tulisan ini antara lain :

Buku "*Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris*".²⁴ Ditulis oleh Suaidi Asyari yang menyajikan fakta mengenai dinamika dan peran penting Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dalam kehidupan politik dan proses demokratisasi di Indonesia. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru sebuah tema kajian tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sering luput dari perhatian para ilmuwan baik dalam maupun luar negeri. Penulis menggunakan literatur buku ini karena memiliki sedikit persamaan dalam karya tulis yang penulis teliti yakni mengenai peran penting politik NU dan Muhammadiyah ketika masa Orde Baru. Dalam tulisan tersebut, penulis mendapatkan gambaran secara umum dalam hal dinamika politik NU dan Muhammadiyah ketika Orde Baru dan pasca runtuhnya Orde Baru. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak dijelaskannya peran politik NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariah pada masa Orde Baru.

²⁴ Suaidi Asyari, "*Nalar Politik NU & Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris*". (Yogyakarta: LkiS, 2009). hlm. 1-5

Skripsi “*Hubungan Ulama Dan Negara Studi Atas Perilaku Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru*”.²⁵ Ditulis oleh Misar Sulaeman Jaya membahas mengenai perilaku dan peran politik MUI pada pemerintahan Orde baru dalam konteks hubungan ulama dan negara sebagai bentuk pelembagaan ulama yang mewakili organisasi-organisasi Islam dan umat Islam. Penulis menggunakan literatur skripsi ini karena memiliki persamaan dalam hal peran penting ulama dengan pemerintah Orde Baru. Dalam tulisan tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai peran politik Majelis Ulama Indonesia ketika Orde Baru. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak membahas mengenai peran MUI yang terlibat dalam menentukan awal bulan Kamariah pada masa Orde baru.

Buku “*Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*”.²⁶ Ditulis oleh Ahmad Izzudin. Buku ini menghadirkan pengetahuan hisab dan rukyat dengan pendekatan hoistik serta metodologi dan data yang valid. Lewat buku ini, kita mampu mengambil suatu kesimpulan dari perbedaan yang ada dengan memahami dasar hukum yang dipakai oleh semua pihak, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang cerdas serta melaksanakan ibadah dengan ilmu dan dengan keyakinan penuh. Penulis menggunakan literatur buku ini karena memiliki sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis teliti yakni mengenai penjelasan hisab dan rukyat dalam menentukan waktu bulan Kamariah. Dalam tulisan tersebut penulis mendapatkan

²⁵ Misar Sulaeman Jaya, “*Hubungan Ulama Dan Negara Studi Atas Perilaku Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru*”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004). hlm. xii

²⁶ Ahmad Izzudin, “*Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*”. (Jakarta: Erlangga, 2007). hlm. 1-3

gambaran secara umum mengenai perbedaan hisab dan rukyat yang dipakai oleh para ulama dan Ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Perbedaan buku tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak dijelaskannya mengenai pelaksanaan hisab dan rukyat pada masa Orde Baru.

Skripsi “*Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha*”.²⁷ Ditulis oleh Eva Rusdiana Dewi membahas mengenai perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, ulil Amrinya adalah pemerintah dan Kementrian Agama. Dalam hal ini ketaatan dan implikasi Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sebuah kebijakan dengan kaidah fikhiyah. Penulis menggunakan literatur skripsi ini karena memiliki sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis teliti yakni mengenai pandangan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan qamariah. Dalam tulisan tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai ketaatan NU terhadap pemerintah (*ulilamri*) dalam menentukan awal bulan qamariah. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah memakai istilah *ulil amri* serta tidak adanya pembahasan mengenai penyeragaman waktu Idul Fitri yang terjadi pada masa Orde Baru.

²⁷ Eva Rusdiana Dewi, ‘*Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha*’. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). hlm. ix

Skripsi, “*Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Qamariah*”.²⁸ Ditulis oleh Anik Zakariyah membahas mengenai pandangan Muhammadiyah mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan qamariah, yaitu bahwa *ulil amri* untuk penentuan awal bulan qamariah menurut Muhammadiyah adalah ruasa (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari *ulil amri*. Penulis menggunakan literatur skripsi ini karena memiliki sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis teliti yakni mengenai pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariah. Dalam tulisan tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai ketaatan Muhammadiyah terhadap pemerintah (*ulil amri*) dalam menentukan awal bulan qamariah. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah memakai istilah *ulil amri* serta tidak adanya pembahasan mengenai penyeragaman waktu Idul Fitri yang terjadi pada masa Orde Baru.

F. Kerangka Konseptual

Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri merupakan sebuah penelitian dengan tema Sejarah Politik. Secara teoritis negara Orde Baru adalah negara dengan sifat pluralis dalam state yang mengembangkan strategi *korporatisme*²⁹

²⁸ Anik Zakariyah, ‘*Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Qamariah*’. (Semarang: Universitas Negeri Walisongo, 2015). hlm. xii

²⁹ Korporatisme adalah suatu sistem perwakilan kepentingan dimana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan) tidak saling bersaing, diatur secara hierarkis dan dibedakan secara fungsional, serta diakui dan diberi izin oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidang masing-masing sebagai imbalan atas kesetiaan mematuhi pengendalian-

melalui sistem perwakilan kepentingan (birokrasi). Paradigma politik Orde Baru dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan menghasilkan beragam model politik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terbentuknya politik Orde Baru tidak terlepas dari pengaruh politik masa lalu, berupa tradisi Jawa dan warisan krisis pemerintahan terdahulu (Orde Lama), negara Orde baru adalah “negara kuat” yang otonom, *vis-a-vis* dengan masyarakatnya.³⁰

Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.³¹

Sejarah politik dalam penelitian ini membahas mengenai politik Islam yang terjadi pada masa Orde baru dan keterlibatan pemerintah dalam mencampuri urusan agama di Indonesia serta pandangan ormas-ormas Islam mengenai kebijakan pemerintah dalam mencampuri urusan agama terutama Islam. Usaha pemerintah yang selalu ikut campur masalah agama, dipandang sebagai penggiringan umat Islam menjauh dari pentas politik dan mencoba mendesain

pengendalian tertentudalam pemilihan pemimpin mereka dalam artikulasi tuntutan dan dukungan mereka, dengan tujuan menindas konflik kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Aminudin, *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 118-126

³⁰ Jaya. *op.cit*, hlm. 14

³¹ Abdul kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)”. Jurnal Jlimbar, Volume XXI Nomor 2, 2005, hlm. 265

agama untuk ditempatkan pada peranan pengontrol moral dan etis, yang menjadi bagian dari peranan aktif umat beragama dalam pembangunan. Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sering terlibat dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Sistem politik memiliki kebijakan berupa serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin politik sesuai dengan tujuan-tujuan dan nilainya setelah mempertimbangkan beberapa alternatif rencana dan sarana-sarana politik dan non-politik dalam rangka menanggapi suatu masalah khusus berdasarkan penilaiannya terhadap tingkat kepentingan dan kelayakan. Dalam hal ini lembaga yang dibentuk atas kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru membawa dampak yang begitu besar terhadap penentuan waktu perayaan Idul Fitri.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka sebagai proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik secara kelembagaan dalam ilmu politik adalah lembaga yang sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sedangkan individu yang ada pada lembaga tersebut hanya sebagai pelaksana.

Sebuah politik, terdapat kebijakan pemerintah yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap penetapan waktu Idul Fitri juga wajib dipatuhi oleh semua kalangan termasuk para ormas Islam yang terlibat. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat, suka menurut dan disiplin terhadap perintah, aturan dan sebagainya kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan,

rela memberi, menyerah, mengalah, membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.³²

G. Metode Penelitian

Menyusuri jejak-jejak masa lampau setiap peneliti tentu diharuskan mempunyai sejumlah trik tertentu untuk berhadapan dengannya, apabila tidak ingin mati kutu di hadapan peristiwa yang mustahil untuk dipandang itu. kaidah yang disepakati secara umum, untuk menuju penyajian rekonstruksi peristiwa dapat menempuh empat jalan yang tersimpulkan ke dalam sebuah metode sejarah, yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui survei yang diawali dengan mencari sumber-sumber baik tertulis (studi pustaka) maupun lisan (wawancara) serta melakukan pengamatan terhadap pandangan politik Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Penulis melakukan pendekatan secara normatif dengan menggambarkan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melakukan

³² J.P Chaplin. *"Kamus Lengkap Psikologi. Terj. Kartono Dan Kartini"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), hlm.99

penyeragaman hari raya Idul Fitri yang berlaku bagi warga NU, Muhammadiyah serta umat Islam lain yang mempercayainya. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan pola historiografi terutama yang bersifat menceritakan dan menjelaskan (*narrative-expository history*). Karena titikfokus penulisan ini adalah berbasis literatur, untuk itu kami juga melakukan teknik observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pelaku sejarah pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo.³³ Penelitian sejarah mempunyai lima tahap:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal ketika akan melakukan suatu penelitian sejarah. Penulis kemudian berfikir untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi ini berupa Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

2. Heuristik

Heuristik merupakan proses mencari data serta mengumpulkan sumber-sumber ataupun data-data yang diperlukan, kegiatan ini difokuskan pada studi arsip dokumen, literatur ilmiah, buku, koran, majalah, jurnal, skripsi maupun internet yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi tiga sumber. Dengan demikian, dalam penelitian digunakan yakni sumber lisan (wawancara), Sumber tertulis meliputi primer dan

³³ Kuntowijoyo. "*Pengantar Ilmu Sejarah*". (Yogyakarta:Benteng Pustaka 1995), hlm. 56

sekunder, Sumber visual (meliputi foto-foto dan video mengenai kegiatan penelitian serta arsip foto yang dimuat di media massa koran ataupun majalah tentang politik Islam pada masa Orde Baru serta ormas Islam yang terlibat didalamnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Jogja Library Center, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Aisyah Surakarta dan perpustakaan IAIN Surakarta.

Penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan politik Islam pada masa Orde Baru serta kebijakan pemerintah mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri serta ormas Islam yang terlibat didalamnya yaitu Surat kabar atau media, dalam bentuk koran dan majalah serta dokumentasi foto/gambar yang terdapat dalam terbitan sezaman ini merupakan sumber primer dalam penelitian sejarah ini.

3. Verifikasi

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi sumber sejarah yang telah didapatkan. Proses kegiatan kritik melalui dua tahap. Tahap *pertama* disebut *kritik ekstrern* yaitu langkah yang diambil untuk memproses atau menyeleksi data yang dilihat dari luar (fisik) mengenai sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan. Semua ciri-ciri dari

sumber sejarah yang diperoleh harus memiliki nuansa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Tahap *kedua*, disebut *kritik intern*, yang merupakan kegiatan proses seleksi terhadap inti dari sumber-sumber sejarah yang telah melewati kritik ekstern. Langkah selanjutnya dipilih sumber sejarah yang sesuai dengan bahan kajian penelitian.

4. Interpretasi

Langkah selanjutnya menafsirkan data-data yang telah diuji, kemudian menghubungkan fakta-fakta dalam bentuk konsep yang disusun berdasarkan analisis terhadap sumber sejarah yang telah diperoleh.

5. Historiografi

Merupakan proses penyusunan seluruh hasil penelitian kedalam bentuk tulisan ataupun laporan hasil penelitian mengenai tema yang diangkat, yaitu Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penyusunan dan penulisan, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai acuan untuk menuliskan pokok-pokok pikiran yang ditulis dalam penelitian ini. Penyusunan ini dilandasi keinginan agar proposal ini dapat menyajikan gambaran yang menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang beruntun. Sesuai dengan permasalahan maka dibuatlah sistematika penulisan Penulisan skripsi yang berjudul Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai

Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. Memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu menjelaskan mengenai Pendahuluan Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan mengenai peran pemerintahan Orde Baru dalam urusan agama, seperti pengertian agama dan negara, keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam urusan agama, pandangan umat Islam terhadap pemerintah Orde Baru, Politik Islam pada masa Orde Baru dan peran penting Kementerian Agama. Selain itu juga menjelaskan mengenai peran organisasi Islam pada masa Orde Baru seperti, peran NU dan Muhammadiyah pada masa Orde Baru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa Orde Baru, dan ICMI pada masa Orde Baru.

Bab tiga menjelaskan mengenai sepak terjang politik Islam NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru diantaranya mengetahui sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik dan hubungan politik antara NU dan Muhammadiyah terutama ketika Orde Baru, serta sepak terjang politik Islam NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru.

Bab empat ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi analisis penulis mengenai pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. Diantaranya penjelasan mengenai hari raya Idul Fitri pada masa Orde Baru, pengertian Awal Bulan Qamariyah dan Macam-Macam Kriterianya, kemudian

alasan penyeragaman waktu Idul Fitri serta perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah dalam penentuan waktu Idul Fitri mampu disatukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dibuatnya dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Bab lima Penutup. Bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan solusi dari pertanyaan di rumusan masalah atau inti pokok dari keseluruhan pembahasan ditambah kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah penulis susun.

BAB II

KETERLIBATAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM MENGATUR URUSAN AGAMA ISLAM

A. Peran Pemerintahan Orde Baru dalam Urusan Agama

1. Agama dan Negara

Agama dan negara adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupan.³⁴

Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Negara merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui kontrol kekuasaan.³⁵

Tujuan dibentuknya sebuah negara dalam teori klasik Islam, tidak semata-mata karena pemenuhan kebutuhan lahiriah belaka, melainkan juga kebutuhan *ruhaniah*, maka untuk kepentingan ini

³⁴ Muhammad Fauzan Naufal, *‘Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)’*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017). hlm. 27

³⁵ Moh Dahlan, *‘Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia’*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor. 01, 2014. hlm. 6

agama dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan.³⁶ Didirikannya negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga negara memiliki sebab-akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia, sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan.³⁷ Agama merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan diluar diri kita sendiri yakni, kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral, sehingga ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah peribadatan.³⁸

Kendati agama telah mengalami kebangkitan bersaing dengan ideologi sekuler lain, namun hubungan agama dan negara tetap rumit dibanding mempertautkan kapitalisme dengan demokrasi. Kesulitan ini nampak jelas terutama ketika agama dan negara dilihat sebagai dua entitas yang berbeda. Agama sebagai entitas yang transenden tentu sangat berbeda dengan negara sebagai lembaga profan ciptaan manusia.³⁹

Agama dan negara memiliki dasar pijakan pada kenyataan yang berbeda. Agama dan negara adalah dua kesatuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan, sedangkan

³⁶ Muhammad Fauzan Naufal. *op.cit*, hlm. 31

³⁷ *Ibid*, hlm. 32

³⁸ Betty. R. Scharf, "*Kajian Sosiologi Agama*". (Yogyakarta: PT TIARA WACANA, 1995), hlm.30

³⁹ M Hafidz Ghazali, '*Hubungan Agama Dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun*'. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 2

negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, sedangkan negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.⁴⁰

Agama disebut sebagai kekuatan dari dalam karena berisi sumber etika-moral (*akhlak*), karena didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal.⁴¹

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang dibagi menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam seperti “Kerajaan Islam Perlak, dan Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh”. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum

⁴⁰ M Hafidz Ghozali. *loc.cit*

⁴¹ Masykuri Abdillah. *op.cit*, hlm. 251

agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik.

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling terpisah di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat, yakni antara Integritas Islam adat dengan modernitas dalam budaya Minangkabau. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama).⁴²

Hubungan antara agama dan negara ini telah menjadi perdebatan panjang untuk menentukan dalam hal apa negara dapat ikut campur dalam urusan agama. Perdebatan ini penting karena berdampak munculnya sekularisasi dalam sejarah pemikiran barat. Indonesia merupakan negara majemuk dengan tingkat sentiment primordial dalam masyarakat Indonesia yang tinggi, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah pluralitas agama. Agama Islam merupakan agama mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara format hubungan agama dan negara oleh pendiri negara dirumuskan dalam tipe negara yang berlandaskan pada Pancasila.⁴³

⁴² Dahlan. *op.cit*, hlm. 12

⁴³ M. Tahir, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid'. Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, Vol.XV, No.1 (2012). hlm. 38

2. Keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam Urusan Agama Islam

Dalam sistem pemerintahan negara, agama adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat karena merupakan sumber etika moral yang mempunyai kedudukan sangat vital yang berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupan. Pada masa Orde Baru penataan kehidupan agama di ruang publik tidak terlalu dilonggarkan, karena pada saat itu orang-orang terdekat Soeharto kebanyakan dari kalangan non muslim, para Jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti Islam. Dalam hal agama, Presiden Soeharto membuat para tokoh ulama dan tokoh agama semuanya patuh atas kebijakan yang dibuatnya, dan difokuskan untuk menyibukkan diri dalam menyebarkan agama mereka serta membangun akhlak Indonesia dengan baik dan benar.

Dalam bidang pendidikan, ketegangan antara aspirasi umat Islam dengan kebijakan pemerintah muncul terutama menyangkut usaha melemahkan posisi bidang studi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sejalan dengan kekuatan politik dari kalangan penganut aliran kepercayaan, pemerintah memberikan porsi yang dominan pada bidang studi pendidikan moral pancasila. Kebijakan ini selanjutnya mengarah pada privatisasi agama dengan pengertian bahwa agama merupakan masalah pribadi sehingga institusi tidak terlibat secara langsung dalam masalah pembinaan keimanan siswa. Pemerintah sempat merencanakan kebijakan penggantian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran Panca

Agama dengan alasan untuk pembinaan nalar dan wawasan siswa dalam memahami agama.⁴⁴

Salah satu usaha melemahkan pendidikan agama, khususnya bagi umat Islam adalah menutup setiap kesempatan yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan siswa. Kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan cenderung dibatasi, termasuk kesempatan untuk mengenakan kerudung bagi para siswa muslimah. Dalam banyak kasus, kepala sekolah juga sering mengeluarkan siswi-siswi muslimah karena alasan mengenakan kerudung.⁴⁵

Keterlibatan pemerintah dalam keagamaan juga dirasakan ketika penentuan waktu awal bulan qamariah dan perubahan perjalanan haji secara mendasar ketika tahun 1970. Keterlibatan pemerintah ketika penentuan waktu awal bulan qamariah yakni dengan dibuatnya kebijakan seperti mendirikan organisasi Badan Hisab dan Rukyat yang digunakan dalam penetapan waktu awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Organisasi tersebut didirikan untuk membantu pemerintah dalam memudahkan penetapan waktu Idul Fitri pada masa Orde Baru, agar bisa seragam sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam agama Islam selanjutnya mengenai perubahan perjalanan haji yang terjadi pada tahun 1970. Mulai tahun

⁴⁴ Zaini Dahlan, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta’lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)”. Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. No. 01 Januari –Juni’, 2018. hlm. 130

⁴⁵ Zaini Dahlan. *loc.cit*

tersebut pemerintah Orde Baru mengelola perhajian dengan sungguh-sungguh karena sejak tahun 1950, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan haji baru terbatas sebagai regulator dan fasilitator, sementara pelaksanaan perjalanan haji diserahkan pada pihak swasta atau semi swasta di bawah koordinasi PHI.⁴⁶

3. Pandangan Umat Islam Terhadap Pemerintah Orde Baru

Pada masa Orde baru, pemerintah melakukan pemisahan terhadap agama dan negara atau juga disebut sebagai sekularisasi⁴⁷. Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Baru pada masa-masa awal mendukung sekularisasi sejalan dengan proses modernisasi dan pembangunan. Sekularisasi politik itu dilakukan dengan tema “*de-ideologisasi politik*”⁴⁸, terutama dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berimplikasi pada pelarangan simbol-simbol agama dalam politik.⁴⁹

Orde Baru dalam pandangan orang Islam seperti sebuah *panasea*⁵⁰, kemudian Orde Baru hadir menjadi suatu harapan menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Demokrasi sendiri bagi umat Islam

⁴⁶ Dinda Nur Permatasari, ‘*Pengelolaan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia Zaman Orde Baru (1970-1998)*’. (Jatinangor: Universitas Padjadjaran, 2018). hlm. 2

⁴⁷ Sekularisasi berarti “sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Periksa Masykuri Abdillah. *op.cit*, hlm. 250

⁴⁸ De-ideologisasi politik adalah berhentinya proses penyebaran ideologi politik.

⁴⁹ Masykuri Abdillah. *op.cit*, hlm. 250

⁵⁰ *Panasea* adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa pemerintahan Orde Lama karena demokrasi ditempatkan pada titik yang sangat rendah.

merupakan sebuah wahana terbaik untuk memperjuangkan cita-cita politik Islam. Hal itu yang diyakini orang Islam pada saat itu, bahwa dengan demokrasi maka perjuangan politik Islam akan meningkat karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, sehingga peluang Islam dalam politik menjadi semakin besar.⁵¹

Kenyataannya tidak demikian, Islam di Indonesia seolah selalu berada di persimpangan jalan. Umat Islam di satu pihak dan pemerintah dipihak lain memandang satu sama lain dengan curiga. Kalangan birokrat dan elite militer ditubuh pemerintah Orde Baru memandang Islam yang terorganisasi secara politik sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan dan juga ideologi pancasila dan UUD 1945. Dipihak lain kelompok Islam juga membantah tuduhan bahwa anti pancasila. Pada masa Orde Baru, umat Islam berharap akan memainkan peranan penting dan signifikan di politik, namun harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Umat Islam harus menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Islam yang tidak menguntungkan.⁵²

Sebelum Orde Baru lahir, umat Islam menaruh harapan besar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, bahkan para politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara. Mereka seakan-akan sudah dapat kembali ke kancah politik dan percaya bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama. Menjelang runtuhnya rezim

⁵¹ Okkie Muttaqie, '*Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi*', (Suara Muhammadiyah: No. 21 Th Ke 81, 1996). hlm. 24

⁵² Asmaul Fauziah. *op.cit*, hlm.7

Orde Lama mereka tanpa ragu-ragu langsung mendukung dan bergandengan tangan dengan para arsitek Orde Baru untuk membidani lahirnya era baru tersebut.

Pada periode awal perjalanan Orde Baru hubungan antara pemerintah dan Islam tidak terlalu harmonis karena posisi umat Islam dan pemerintah era Orde Baru periode pertama berada dalam posisi berhadapan (*uis a vis*), ditambah dengan berbagai kasus yang semakin merenggangkan hubungan tersebut seperti, kasus Tanjung Priok, Lampung, dan peledakan Borobudur. Ini terjadi karena orang-orang dekat Soeharto kebanyakan dari kalangan non muslim, para Jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti Islam.⁵³

Secara historis, yang menjadi persoalan sosial, baik bersifat kultural maupun struktural di negeri ini begitu banyak dan kompleks berupa kemiskinan dan keterbelakangan. Umat Islam sebagai elemen terbesar bangsa ini, merasa berkewajiban untuk mengatasi problem-problem sosial tersebut. Sejak awal para ulama menyadari bahwa perbaikan kondisi yang memprihatikan itu memerlukan perjuangan, dan salah satunya melalui politik. Ironisnya, setiap keterlibatan mereka dalam arena politik selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif berupa peminggiran (marginalisasi) politik.⁵⁴

⁵³ Okrisal Eka Putra. *op.cit*, hlm. 186-187

⁵⁴ Jaya. *op.cit*, hlm. 27

4. Politik Islam Pada Masa Orde Baru

Politik Islam merupakan suatu istilah yang merujuk pada konsep-konsep Islam terutama istilah-istilah yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Pada masa Orde baru lebih populer dengan istilah memasuki millenium ketiga, dimana bangsa Indonesia memasuki sistem politik baru yaitu sistem politik *corporatic* dan *hureatucratic authoritarian* memasuki politik *pluralistic*.⁵⁵ Sistem politik yang digunakan Orde Baru ini merupakan sebuah area politik yang efektif untuk meminimalisir gerakan ideologi politik Islam, setiap kali ada keinginan memunculkan formasi Islam politik, rezim penguasa melakukan langkah-langkah *kooptasi* bahkan *represif* atau menekan.⁵⁶

Politik di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru lebih dikembangkan untuk memobilisasi seluruh kekuatan massa, termasuk umat Islam yang secara statistik merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia. Mengaitkan Agama Islam dengan politik Indonesia merupakan hal yang sangat esensial karena sebagai agama yang dominan dalam masyarakat, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan politik Indonesia. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik

⁵⁵ Dalam sistem politik yang diterapkan Orde baru tersebut tidak ada arena publik yang bisa digunakan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Ruang publik sepenuhnya dikendalikan oleh rezim yang berkuasa yang terdiri atas triumvirate, lembaga kepresidenan, militer dan konglomerat. Dalam formasi politik seperti itu yang terjadi adalah lembaga kepresidenan yang powerful di satu pihak, dan dilain pihak muncul kabinet yang tersubordinatif. Lihat Zainuddin Maliki. "Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). hlm. 267

⁵⁶ Kunawi Basyir. 'Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia'. Jurnal Al-Tahrir, Vol.16 No.2, 2016. hlm, 347

yang mendukung kemudian pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang menjangkit partai-partai politik.⁵⁷

Pada tahun 1966, muncul suatu kerinduan dan optimisme terhadap partai politik Islam ketika sejumlah tokoh Islam terutama tokoh Masyumi dibebaskan dari penjara Soekarno. Mantan ketua Masyumi Prawoto Mangkusasmito, sangat aktif ingin mewujudkan rehabilitasi Masyumi, namun ditentang keras oleh pemerintah. Secara formal alasan penolakan terhadap rehabilitasi Masyumi adalah persoalan hukum dan psikologis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kekhawatiran dihidirkannya kembali Masyumi mampu memobilisasi kekuatan Islam dengan mudah sehingga menjadi satu kekuatan politik yang besar.⁵⁸

Keberatan pemerintah merehabilitasi masyumi mendorong sebagian umat Islam mencari jalan lain untuk menghidupkan kembali partai Islam. Pada tanggal 7 April 1967 Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) membentuk sebuah kelompok untuk merancang pembentukan partai baru menggantikan Masyumi. Pada tanggal 5 Februari 1968 pemerintah kemudian menyetujui berdirinya Partai Muslimin Indonesia sebagai gabungan partai Islam, namun pemerintah mensyaratkan Parmusi

⁵⁷ Okrisal Eka Putra. *op.cit*, hlm. 170

⁵⁸ M. Rahmat Effendi, “*Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru)*”. Jurnal Mimbar, Volume XIX ,2003. hlm. 94

bukanlah Masyumi karena itu mantan pemimpin Masyumi tidak boleh memimpin Parmusi.⁵⁹

Sistem politik Islam yang dijalankan pemerintah Orde baru pada 1967-1985 memang kurang efektif untuk memobilisasi Islam di Indonesia, karena adanya tekanan dan intimidasi yang digunakan oleh pemerintah pada masa itu. Kebijakan politik yang ditempuh oleh rezim Orde Baru serta pergeseran wacana yang terjadi di kalangan gerakan Islam, memaksa keduanya untuk meredefinisi kembali paradigma politik masing-masing sehingga pada 1980-an muncullah gerakan “Islam kultural”, yaitu gerakan Islam yang tidak berada pada jalur politik praktis, tetapi bergerak dalam wilayah pendidikan dan pemberdayaan. Salah satunya dengan penetapan pancasila sebagai asas tunggal pada 1980-an. Pada awalnya kebijakan itu mendapat respons yang beragam dari tokoh-tokoh politik dan ormas keagamaan. Sebagian menerimanya karena desakan keras dari pemerintah dan sebagian lagi menolak dengan berbagai aksi politik. Pemerintah Orde Baru juga memperlakukan para pemimpin dan aktivis Islam dengan tidak semestinya, sebagai upaya untuk melakukan depolitisasi Islam.⁶⁰

Richard Daulay di dalam tulisannya menjelaskan mengenai sikap pemerintahan Orde Baru terhadap politik Islam sebagai berikut:

⁵⁹ Effendi. *loc.cit*

⁶⁰ Zuhri Humaidi, ‘Islam Dan Pancasila : Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal’. Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No.2, 2010. hlm. 296-297

“Selama pemerintahan Orde Baru, tidak ada peluang bagi gerakan Islam politik untuk memperjuangkan cita-cita mendirikan negara Islam melalui jalur politik. Bahkan semua lembaga keagamaan, terutama Islam sebagai agama terbesar, dijadikan sebagai alat legitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Soeharto tidak memusuhi Islam sebagai agama, karena ia sendiri dan keluarganya beragama Islam, tetapi memusuhi Islam politik yang berniat mendirikan negara Islam”.⁶¹

Pemerintah cukup tegas dalam mengontrol partai politik dengan mencampuri urusan intern partai dan melakukan penyegaran ideologi, puncaknya pada pemberlakuan asas tunggal terhadap semua partai dan organisasi kemasyarakatan.⁶² Memasuki masa-masa pemilu, ketika Presiden Soeharto akan membentuk format pemerintah Orde Baru yang sesuai dengan kehendak pemerintah, ternyata Islam merupakan salah satu sasaran yang sangat besar. Mulai dari pelaksanaan pemilu 1968-1971, masa-masa transisi memasuki pemilu, partai NU merupakan sasaran utama pengembosan pemerintah hingga terbentuk suatu format politik Indonesia baru, tahun 1968-1971 Islam tidak termasuk di dalamnya.⁶³

Puncak kegagalan politik Islam untuk kembali berkiprah adalah hasil pemilu pertama Orde Baru pada 1971, yang membawa kemenangan mutlak kepada Golkar dan partai Islam seperti Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah memperoleh jumlah suara yang kecil kecuali NU yang mendapat jumlah suara cukup besar

⁶¹ John Musa Renhoard, *‘Politik Identitas Era Orde Baru Di Indonesia Memasuki Era Reformasi’*. Jurnal *Societas Dei*, Vol. 06 No.1 ,2019. hlm. 290

⁶² Effendi. *op.cit*, hlm. 91

⁶³ Muttaqie. *‘Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi’*. (Suara Muhammadiyah: no. 21 th ke 81, 1996), hlm. 25

karena NU relatif tidak diintervensi oleh pemerintah. Kenyataan pahit pemilu 1971 semakin membuat putus asa bahkan kemarahan umat Islam akibat kecurangan dan pemaksaan pemerintah dalam proses pemilu tersebut. Melalui kekuatan Golkar, pemerintah memanfaatkan birokrasi sebagai mesin suara dan kemenangan mutlak organisasi sosial politik tersebut.⁶⁴

Umat Islam yang masih terluka akibat perolehan suara yang tidak memuaskan pada pemilu 1971, dihadapkan kembali kepada program pengembangan sistem politik hegemonis. Pada bulan Januari 1973 pemerintah memutuskan untuk melakukan *restrukturalisasi kepartaian* yakni dengan menggabungkan seluruh partai politik ke dalam 2 partai kecuali Golkar. Keempat partai Islam NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai nasionalis seperti PNI, IPKI dan Murba serta partai kriter protestan (parkindo) dan katolik (Parkat) digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).⁶⁵

Pada periode 1982-1985 terjadi perubahan fundamental, mengenai hubungan yang baik antara Islam dan pemerintah Orde Baru mulai terwujud walaupun belum sampai pada tahap yang ideal. Perubahan sikap Orde Baru terdapat perubahan radikal pada kebijakan pemerintah terhadap Islamisme, pada dekade ini nampaknya pemerintah membiarkan ideologi Islam masuk ke ranah politik. Hal ini ditandai adanya Ikatan

⁶⁴ Effendi. *op.cit*, hlm. 97

⁶⁵ Effendi. *loc.cit*

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didukung oleh pemerintah sebagai satu alat yang disebut sebagai *Islam Rezimis* dengan tujuan sebagai bagian dari struktur negara. Salah satu alasan utama dibalik pergeseran kebijakan pemerintah adalah strategi Soeharto untuk mendapatkan dukungan politik umat Islam bersamaan dengan berkurangnya dukungan militer kepada pemerintahannya.⁶⁶

Titik awal perubahan hubungan negara dengan Islam mulai nampak, negara tidak lagi melihat Islam sebagai ancaman. Kebijakan pemerintah yang sedikit mengetatkan Islam sedikit demi sedikit mulai dilonggarkan, bahkan negara menjadi akomodatif terhadap Islam seperti pelonggaran masalah jilbab, dibentuknya yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila serta pembangunan masjid dan pesantren meningkat.

5. Peran Penting Kementrian Agama Pada Masa Orde Baru

Menteri Agama memiliki peran besar terhadap pemerintah dan masyarakat untuk ikut andil dalam urusan agama. Kepekaan agama dalam kehidupan masyarakat dan bangsa menjadikan jabatan Menteri Agama tidak pernah bisa dibatasi oleh kenyataan bahwa ia sesungguhnya hanyalah seorang penanggung jawab sebagian tugas administrasi negara belaka.⁶⁷

Pada 1962 terjadi pergolakan sosial-politik meliputi persaingan pengaruh yang sengit antara tiga kekuatan yang memiliki perbedaan orientasi ideologis: nasionalis, agama, dan komunis. Melalui pergolakan politik tersebut akhirnya Orde Baru berdiri dan memunculkan konflik baru

⁶⁶ Kunawi Basyir. *op.cit*, hlm. 348-349

⁶⁷ Azyumardi Azra, "*Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*". (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM, 1998). hlm. xxviii

yang berhubungan dengan agama. Hal ini harus dihadapi oleh Saifuddin Zuhri, ketika ia diangkat oleh presiden sebagai Menteri Agama. Ia harus menghadapi berbagai peristiwa tragis akibat usaha G30 S PKI yang belum usai, dan dihadapkan dengan masalah baru lagi mengenai keagamaan. Masalah yang berkaitan dengan agama merupakan agenda utama Menteri Agama pada awal Orde Baru.

Konflik agama semakin memuncak ketika pemerintah Orde Baru mengangkat seorang Kyai sebagai menteri dalam kabinet pembangunan I yakni K.H. Mohammad Dachlan selaku pimpinan Partai NU. Ia adalah menteri pertama setelah kedudukan Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh dikukuhkan oleh MPRS. Pengukuhan tersebut terjadi di masa awal, ketika Orde Baru sedang sibuk mengadakan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ia mewakili ideologi dalam kabinet yang anti-ideologi.⁶⁸

Berbagai hal yang kontroversial terus membayangi, seperti partai NU yang semakin mengimbangi Golkar hingga disebut sebagai *neo-Islam*⁶⁹, tetapi selaku Menteri Agama, K.H. Mohammad Dachlan berhasil mencatat beberapa kebijakan yang hingga saat itu menjadi prioritas dalam program-program kerja Departemen diantaranya, merukunkan umat beragama, memajukan pendidikan agama, memprakarsai MTQ dan PTIQ, terjemah dan tafsir Al-Qur'an.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, hlm. xxvii

⁶⁹ Neo Islam merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum modernis muslim dalam rangka mempersatukan dan memperkokoh masyarakat muslim melalui upaya pembaharuan iman dan proses reinterpretasi warisan peradaban Islam masa lalu ke dalam dunia kontemporer.

⁷⁰ Azyumardi Azra, *op.cit*, hlm. 260

K.H. Mohammad Dachlan mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Agama, dan konsolidasi politik Orde Baru semakin bagus. Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama selanjutnya pada tahun 1972, dan sebagai orang yang dipercaya memimpin Departemen Agama di awal dasawarsa 1970-an, masa di mana Departemen agama identik dengan aspirasi keagamaan Islam dan dikenal sensitif terhadap isu-isu modernisasi. Mukti Ali sebenarnya memikul tugas yang cukup berat, yakni jika digambarkan secara singkat: mentransformasikan sikap dan pandangan keagamaan umat beragama Indonesia (muslim khususnya), sehingga melicinkan jalan bagi konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan kemudian mempersiapkan landasan bagi program-program modernisasi.⁷¹

Mukti Ali merupakan salah seorang yang menempati posisi khusus dalam sejarah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang agama. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan proses-proses panjang modernisasi politik-keagamaan Orde Baru. Mukti Ali memegang jabatan Menteri Agama pada saat periode transisi pemerintahan yang penuh gejolak, saat Orde Baru tengah membangun basis legitimasi politik dalam masyarakat. Pada periode kementriannya, Mukti Ali mengadakan reorientasi kebijakan pemerintah dalam bidang politik-keagamaan, mulai dari perumusan konsep negara modern yang cocok bagi kultur keagamaan Indonesia, pembaharuan pemikiran, dialog antar umat beragama, hingga pembaharuan kurikulum lembaga pendidikan agama. Masalah umat Islam

⁷¹ *Ibid*, hlm. 71

tetap merupakan sasaran utama dari pembinaan yang harus dijalankan oleh Departemen Agama, tetapi perubahan sosial-ekonomi yang berjalan dengan cepat setelah lebih dulu mengalami tragedi nasional yang dahsyat di tahun 1965 yang menyebabkan masalah keagamaan menjadi lebih kompleks dan sensitif. Menteri Agama hanyalah salah satu jabatan dalam kabinet. Bahkan dari sudut senioritas dan protokoler Menteri Agama berada dibawah beberapa menteri yang lain seperti Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pertahanan.⁷²

Menteri Agama memiliki andil yang penting di dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru yang meliputi, memajukan pendidikan agama Islam, membangun sarana pembelajaran, mengatur masalah yang terjadi antar-agama serta memberi kebijakan mengenai urusan keagamaan yang sekiranya sinkron dengan kemauan presiden saat itu, karena apabila tidak sesuai dengan keinginan presiden maka kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah Orde Baru memang dikenal ketat terhadap masalah politik, semua unsur yang berkaitan dengan politik selalu memicu polemik disemua kalangan termasuk jika itu berkaitan dengan masalah keagamaan. Sebagai tangan kanan presiden Kementrian Agama dipercaya oleh pemerintah untuk selalu mengikuti apapun yang menjadi keputusan presiden atas kebijakan yang mereka buat, misalnya Presiden menginginkan penetapan hari raya Idul Fitri yang telah ditentukan bersama dan menetapkan 1 syawal akan dilaksanakan besok, maka tugas

⁷² *Ibid*, hlm. 272

Kementrian Agama menyampaikan keputusan tersebut kepada masyarakat dan tidak dapat diganggu gugat.

B. Peran Organisasi Islam Pada Masa Orde Baru

1. Peran NU dan Muhammadiyah pada Masa Orde baru

Muhammadiyah dan NU mengklaim sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dimana lebih dari 25 juta muslim Indonesia sebagai pengikut Muhammadiyah dan lebih dari 40 juta adalah pengikut NU.⁷³ Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa.⁷⁴

Muhammadiyah dan NU pada masa Orde Baru memiliki keterlibatan dengan pemerintah sehingga memberi dampak yang besar bagi masyarakat terutama mengenai pendidikan Islam. NU berperan penting dalam proyek sosial dalam pembangunan pesantren dan madrasah yang sempat mendapat perhatian dan dana dari pemerintah serta mulai terjalinnya kerjasama antara muslimat NU dengan Departemen Tenaga Kerja. Kerjasama ini memberikan kegiatan pelatihan keterampilan terhadap wanita untuk usaha mandiri, baik itu untuk tingkat provinsi maupun kabupaten.⁷⁵

Muhammadiyah juga berperan penting terhadap masyarakat melalui pendidikan, sosial dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya

⁷³ Suaidi Asyari. *op.cit*, hlm. 1

⁷⁴ Nurul Shobacha. *op.cit*, hlm. 100

⁷⁵ Taat Wulandari, "*Sikap Organisasi Masyarakat Terhadap Politik Orde Baru Politik*". (Yogyakarta: universitas Negeri Yogyakarta, 2017). hlm. 33

kerjasama antara pemerintah Orde Baru dengan Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan ormasnya yakni dalam program pendidikan. Dalam hal pendidikan, Muhammadiyah bekerja sama langsung dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama. Hal ini dilakukan agar lulusan Muhammadiyah pada saat itu dapat diakui oleh pemerintah dan tidak dipersulit dalam mencari kerja. Untuk masalah kesehatan, Muhammadiyah bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, dan untuk tenaga kerja juga bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, serta instansi lain yang sekiranya terkait dengan kegiatan tersebut. Berbagai kerjasama yang dilakukan tersebut memberikan keuntungan bagi Muhammadiyah, meskipun kehilangan sifat kemandiriannya.⁷⁶

Muhammadiyah dan NU selain memiliki andil untuk masyarakat, juga memiliki andil terhadap pemerintahan Orde Baru. Politisi NU pada saat itu masih mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan politik sebagai Menteri Agama, misalnya K.H. Saifuddin Zuhri salah satu tokoh NU yang menjabat sebagai Menteri Agama pada awal berdirinya Orde Baru, kemudian menggantikan Saifuddin Zuhri, diangkatlah K.H. Mohammad Dachlan selaku pemimpin partai NU sebagai Menteri Agama dalam kabinet Pembangunan I pada Juni tahun 1968 hingga September 1971. Muhammadiyah dalam hal ini tidak memiliki andil dalam mendapat kedudukan di Menteri Agama, namun Muhammadiyah di era Orde Baru secara proporsional lebih banyak menjadi Kakanwil Depag.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 34

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan pada masa Orde Baru, maka didirikanlah Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam Indonesia oleh para perintis intelektualisme Islam yang berusaha merumuskan aspirasi-aspirasi politik kearah yang lebih pragmatis, yakni dengan harapan terciptanya hubungan yang relatif harmonis antara keislaman dan keindonesiaan.

Dalam upaya pendirian MUI dibutuhkan waktu sekitar lima tahun sejak digagas pemerintah hingga diadakan konferensi nasional organisasi bentukan Kementerian Agama yang bernama Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tahun 1970. Pada Juli 1975, Kementerian Agama kemudian menyelenggarakan Konferensi Nasional Ulama Indonesia sejak tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 1975. Pada tanggal 26 Juli, Kongres yang dihadiri oleh para ulama, cendekiawan muslim dan perwakilan para dinas kerohanian Islam dibawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), berhasil menyepakati pendirian MUI dan mengangkat Buya Hamka sebagai ketua umum pertamanya.⁷⁷

Selama kepemimpinan Hamka, pemerintah sangat mendukung dan menjadi penggagas pembentukan MUI. Dukungan itu salah satunya dapat dilihat dari kucuran dana dari pemerintah kepada lembaga ini. Dalam

⁷⁷ Muhammad Iskandar dkk, "*Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 3*" (Jakarta: direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat jenderal Kebudayaan, Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm. 358

perjalanannya, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengendalikan MUI dan menjadikannya sebagai lembaga yang melegitimasi kebijakan-kebijakannya, sehingga dalam rentang waktu tahun 1975-1998, MUI telah memberikan kontribusi dalam berbagai bidang sosial dan keagamaan serta telah berkembang menjadi organisasi yang berwenang mengeluarkan fatwa dan menjadi wakil Indonesia.⁷⁸

Kontribusi MUI meliputi perannya sebagai pemberi legitimasi teologis atas setiap kebijakan negara, khususnya dalam konteks kebebasan beragama. MUI juga memiliki legitimasi penuh untuk menentukan halal-haramnya sebuah produk. Sejak 6 Januari 1989, MUI sudah memiliki lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, serta kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Oleh lembaga ini sebuah produk diuji dan mendapatkan sertifikat halal jika lolos.⁷⁹

MUI memiliki banyak perwakilan dari berbagai Ormas Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan cendekiawan muslim. Hal tersebut dianggap sebagai wadah pemersatu Islam, karena memiliki peran untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan non-muslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai

⁷⁸ Muntaha Imam. "*Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Masa Orde Baru Tahun 1975-1998*". (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017). hlm. 17

⁷⁹ Petrik Matanasi. '*Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam*'. (Tirto.Id, 2020). Diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 09.00

kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna kemaslahatan masyarakat Indonesia.⁸⁰

Hubungan MUI dengan penguasa dan dengan umat, memang selalu dilematis. Idealnya, MUI berperan sebagai penengah yang dapat mewakili kepentingan pemerintah di satu pihak, dan pada saat yang sama MUI juga dapat menjaga harapan umat. MUI dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan pragmatis, yakni mendapatkan pengabsahan keagamaan untuk program-program pemerintah. Tidak heran jika fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh lembaga ini kadang kontroversial karena lebih mencerminkan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan umat.⁸¹

Untuk menyalurkan gagasan yang lebih obyektif maka dibentuklah berbagai organisasi kelompok studi yang relevan, disamping memanfaatkan juga ormas-ormas besar seperti NU, dan Muhammadiyah. Peran MUI di era Orde Baru sangat tampak berada di bawah kekuasaan rezim penguasa, sering *terkooptasi*⁸² oleh kepentingan kekuasaan, sehingga dianggap tidak lebih hanya sekedar “terompet” bagi penguasa dalam melegitimasi berbagai produk kebijakan pemerintah.⁸³

⁸⁰ Muhammad Maulana Hamzah, ‘Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia’. Jurnal Studi Agama Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 130

⁸¹ Azyumardi Azra. ‘*Studia Islamika*’. Indonesian Journal For Islamic Studies, Vol. 21 No 3, 2014, hlm. 379

⁸² Terkooptasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dipilih. Secara istilah Kooptasi adalah pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawvrah oleh anggota yang telah ada.

⁸³ Ahmad Fajri, “*Ulama Dan Politik (Analisis Fatwa Dan Peran Politik Majelis Ulama (MUI) Era Reformasi*”. (Tangerang: PT Pustaka Indonesia Perumahan Mutiara Elok, 2014). hlm 3-7

Meskipun MUI tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang ber-genre politik, tetapi harus diakui, bahwa keberadaannya selalu saja mampu mempengaruhi dinamika perpolitikan bangsa ini, karena MUI adalah sebuah badan yang menaungi berbagai ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, selain berfungsi mengeluarkan fatwa bersama, namun MUI juga bisa dijadikan sebagai alat silaturahmi dan menyamakan visi dan misi ulama-ulama Indonesia. Fatwa biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Posisi fatwa dalam rangka meluruskan kembali perubahan sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat atau kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam.⁸⁴

3. ICMI Pada Masa Orde Baru

Konfigurasi politik rezim Orde Baru mulai berubah pada era 80-an terutama terhadap umat Islam, istilah hubungan yang antagonistik kini mulai bergeser kepada sikap pemerintah yang lebih bersifat akomodatif terhadap umat Islam. Hal ini terjadi karena sebelumnya pemerintah mendapatkan tekanan dan reaksi responsive yang keras dari umat Islam berkaitan dengan kebijakan yang terang-terangan melecehkan umat Islam seperti kebijakan masalah perjudian, isu jilbab, Porkas, SDSB yang tentu saja dapat memicu konflik besar. Pergeseran sikap pemerintah dengan mulai merangkul Islam tersebut membuat hubungan Islam dan negara

⁸⁴ Hamzah. *op.cit*, hlm. 131

semakin erat, terlebih pada decade 90-an mulai bermunculan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung Islam, baik itu pendirian ormas-ormas Islam baru, maupun kebijakan politik hukum yang mulai responsive dan affirmative khususnya dalam pemulihan kembali politik hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁵

Perkembangan politik Islam di Indonesia yang berlangsung sejak masa Orde Baru mampu melahirkan organisasi yang bernama ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Secara sosiologis dan politik, terbentuknya ICMI merupakan hasil resultan tiga faktor sekaligus: perkembangan objektif intelektualisme, harapan politik subjektif para cendekiawan muslim dan kepentingan politik negara Orde Baru.⁸⁶

Kehadiran ICMI yang mendapat dukungan dari pemerintahan pada masa Orde Baru ikut memainkan peran-peran strategis dalam pengambilan kebijakan di pemerintah. ICMI mampu memberikan masukan dalam penentuan kebijakan negara, terutama dalam pembentukan GBHN, ekonomi dan kebijakan politik di Indonesia. ICMI juga memainkan peran penting pada birokrasi di Indonesia ditunjukkan dengan beberapa pengurus ICMI yang berhasil duduk di lembaga-lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran ICMI dalam perkembangan politik Islam terjadi saat kekuasaan Orde Baru berada dalam kondisi stabil, sehingga

⁸⁵ Faryda Ruslan, '*Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang-Undangannya*'. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 10 No 2, 2019, hlm. 60

⁸⁶ R. Eep Saefulloh Fatah. "*Masalah Dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 203

ICMI mampu berperan dalam birokrasi pemerintahan dan politik serta sebagai kekuatan baru yang bernuansa Islam.⁸⁷

Melalui pembentukan yang direstui pemerintah Orde Baru ini, cendekiawan seakan-akan diberikan akses baru ke arah peningkatan peran dan posisi mereka dalam formulasi kebijakan politik Orde Baru di masa depan. Hal ini tampak, misalnya jika kita amati bagian dari pidato Presiden Soeharto ketika membuka simposium di Malang pada tanggal 7 Desember 1990.

“Kaum cendekiawan kita harapkan mempunyai pandangan yang jernih tentang kecenderungan perkembangan keadaan. Dengan kejernihan pandangan itu, kaum cendekiawan dapat merumuskan alternatif kebijaksanaan dan strategi yang bisa kita pilih bersama.”⁸⁸

Mengingat cendekiawan muslim membutuhkan jalur mobilitas mereka, maka dibentuklah Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia) pada tahun 1964 yang diketuai oleh salah seorang tokoh NU H. M. Subchan Z.E. pada tahun 1967, cendekiawan muslim terpecah, karena H.M. Subchan Z.E keluar dari Persami dan membentuk ISII (Ikatan Sarjana Islam Indonesia) pada tahun 1967, salah seorang tokoh NU. Persami masih tetap berjalan sampai tahun 1970. Dari latar belakang tersebut kemunculan ICMI sebagai sebuah wadah untuk penyaluran aspirasi para cendekiawan muslim. Kelahiran ICMI sebagai suatu wadah organisasi yang digagas oleh generasi baru yang lebih terdidik dikalangan umat telah berdampak pada perkembangan Islam sebagai gerakan kultural

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 60

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 205

walaupun dari segi politik terdapat penurunan namun di luar politik mengalami kemajuan. Perkembangan yang lebih mencolok adalah hilangnya sekat-sekat pemisah antar ormas dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Secara internal, ICMI memiliki kekuatan berupa orientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai disiplin ilmu dan profesi yang juga berada di berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan Islam dan organisasi politik serta keberadaan ICMI adalah lintas wilayah, ruang dan waktu.⁸⁹

Pembentukan ICMI oleh pemerintah melalui menteri agama dan didukung oleh beberapa lembaga, namun ada yang berpendapat bahwa kehadiran ICMI sengaja direayasa untuk memperoleh dukungan dari golongan Islam, mengingat umat Islam di Indonesia mayoritas. Hal ini diperkuat adanya ketidakkompakan diantara ABRI dalam mendukung presiden, maka presiden mencoba mengambil langkah-langkah untuk mendapat dukungan dari golongan Islam dan membuahkan hasil dengan terpilihnya Soeharto sebagai presiden RI periode 1993-1998.⁹⁰

Menurut Leo Suryadinata kecenderungan presiden Soeharto dalam merangkul umat Islam diperlihatkan dengan cara, *pertama* ditutupnya tabloid monitor dan penghukuman Arswendo Atmowiloto, pemimpin

⁸⁹ Juju Saepudin, “*Revitalisasi Peran ICMI Pada Era Reformasi*”. Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15 No. 3, 2016, hlm. 190

⁹⁰ Mohammad Khoiri, “*Peran ICMI Dalam Perkembangan Politik Islam Indonesia (Analisis Tahun 1990-2000)*”. (Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara). hlm. 21

redaksinya pada bulan Oktober tahun 1990. *Kedua*, Tahun 1990 bulan Desember, diadakannya Simposium Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang akhirnya membidani kelahiran ICMI, presiden berkenan membuka simposium tersebut dan Soedarmono menutupnya. *Ketiga*, Presiden sekeluarga menunaikan ibadah haji ke mekkah tahun pada bulan Juni 1991. *Keempat*, Didirikannya Bank Muamalat yang didirikan oleh ketua ICMI dan MUI pada bulan Mei 1992.⁹¹

Sebagai ormas Islam, kegiatan ICMI dalam menjalankan peran sebagai katalisator, motivator dan fasilitator pada berbagai gagasan program pemberdayaan masyarakat mengarah pada membangun visi kualitas sumber daya insani. Sejak lahirnya ICMI masa Kebangkitan dimulai yakni setelah tidak adanya depolitisasi Islam pada pemeritahan Orde Baru. Diakomodasinya para cendekiawan muslim dalam pemerintahan, membuat ICMI dekat dengan kekuasaan terutama ketika B.J. Habibie masih menjabat sebagai ketua umum ICMI. Di bawah kepemimpinan Habibie, ICMI menjadi memberi warna baru dalam kebijakan Orde Baru. Dekatnya hubungan ICMI dengan kekuasaan, hal itu membuat ICMI memperoleh dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan program kerjanya.⁹²

Program kerja tersebut kemudian direalisasikan oleh ICMI bersama dengan Organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang

⁹¹ R. Eep Saefulloh Fatah. *op.cit*, hlm. 206

⁹² Nisa'ul Mauliddina, '*Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Icmi) Orwil Jawa Timur Tahun 1991-2015*'. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 37

ikut ambil bagian dalam proses membuat kebijakan pemerintah serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan aspirasi umat. Bahkan pada masa Orde Baru ormas-ormas Islam merupakan kelompok masyarakat yang paling konsisten dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, di saat-saat lembaga parlemen dan masyarakat politik tidak berdaya melakukannya, kemudian pada periode terakhir dekade 1980-an pemerintah Orde Baru secara perlahan-lahan mengambil kebijakan yang akomodatif terhadap Islam dan kelahiran ICMI menjadi suatu hal yang luar biasa, karena organisasi ini menampung banyak kalangan pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, termasuk beberapa diantara mereka yang pernah memberikan kritik tajam kepada pemerintah.⁹³ Indikator-indikatornya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sejak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Diknas) dipercayakan kepada menteri Fuad Hasan, sejumlah kebijakan yang selama itu dianggap sangat merugikan Islam mulai ditinggalkan. Misalnya dihapuskannya larangan berbusana Muslimah (yang pernah diberlakukan semasa Menteri Daud Yusuf).
2. Ketika rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dibicarakan di DPR, sejumlah pemuka agama Islam mengingatkan bahwa RUU tersebut tidak memberikan tempat yang sebenarnya bagi Pendidikan Agama. Sejumlah organisasi massa Islam berhasil melakukan diskusi dan lobbying yang serius sehingga ketika RUU

⁹³ Masykuri Abdillah. *op.cit*, hlm. 255

tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 beberapa pasal yang menyangkut peranan pendidikan Agama dapat dimaksukkan. Bahkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berhasil melakukan amandemen di dalam penjelasannya bahwa “*antara pengajar dan anak didik harus memiliki agama yang sama*”.

3. Pemerintah dengan sangat cepat *membreidel Mingguan Monitor* yang memuat berita yang dipandang menghina Islam dan Umat Islam.
4. Memberlakukan RUU Peradilan Agama Islam yang cukup mendapat reaksi dari kalangan non-Islam.
5. Fenomena kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memperlihatkan kecenderungan ke arah akomodatif.
6. Bantuan pembangunan sarana peribadatan melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.
7. Diangkatnya sejumlah intelektual muslim menjadi anggota MPR yang mewakili golongan.⁹⁴

Salah satu sumber lain yang penting dari perubahan pada masa Orde Baru adalah semakin banyaknya dari kelompok Muslim yang terpelajar. Menjelang tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, pola hubungan antara Islam dan negara Orde Baru telah berkembang ke arah yang lebih baik. Pada periode ini, hubungan Islam dan Orde Baru mulai

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 256

mengarah kepada tumbuhnya kesadaran dan saling mengerti kekuatan dan potensinya masing-masing. Di satu sisi, dari mereka ini tumbuh persepsi baru tentang hubungan Islam dan negara-bangsa, yang tidak lagi berpegang pada pandangan lama, Islam sebagai ideologi negara. Di sisi lain mereka semakin kuat, tidak tetap berada di wilayah pinggiran. Dari situ terjadi akomodasi politik antara pemerintah dan kelompok muslim, antara kedua belah pihak saling membutuhkan.⁹⁵

⁹⁵ M. Rahmat Effendi, “*Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru)*”. Jurnal Mimbar, Volume XIX Nomor I, 2003, hlm. 100

BAB III

SEPAK TERJANG POLITIK NU DAN MUHAMMADIYAH PADA MASA ORDE BARU

A. Sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar yang hidup di Indonesia. Pengaruh dari kedua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun massanya, sampai sekarang kedua organisasi keagamaan ini tetap menjadi menjadi “tempat bernaung” orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam sosial keagamaan sebagai bagian dari seluruh aktivitas keagamaan. Keberadaan NU dan Muhammadiyah dalam sejarah Indonesia memang sangat menarik. Sepanjang perjalanan kedua organisasi Islam ini senantiasa diwarnai kooperasi, kompetisi sekaligus konfrontasi.⁹⁶

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur.⁹⁷ Tokoh utama yang membentuk NU adalah Wahab Chasbullah dan Hasyim Asy’ari bersama dengan lima belas kyai terkemuka yang berkumpul di rumah Wahab Chasbullah untuk mendiskusikan berdirinya NU guna mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia-Belanda, serta memelihara, melestarikan, mengembangkan dan

⁹⁶ Shodiq Raharjo. “*Konflik Antara NU dan Muhammadiyah (1960-2002)*”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007). hlm, 1

⁹⁷ Tasnim Rahman Fitra. ‘*Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016*’. (Semarang: UIN Walisongo, 2017). hlm, 98

mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah* dengan mengikuti pola empat madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pendirian NU menyebabkan para kyai melibatkan diri dalam sebuah program berskala nasional dengan kegiatan yang luas. Hal itu menjadikan NU berkembang pesat pada awal 1940-an sebagai organisasi besar yang dipimpin oleh para ulama.⁹⁸

NU sebenarnya lebih mempertahankan budaya tradisional seperti, tahlilan, yasinan, istighotsah, ratiban dan diba'an, sehingga dalam mengaplikasikan agama disesuaikan dengan budaya tradisional. Para kyai Islam tradisional belum memiliki kekuatan yang penuh dalam menanggulangi merebaknya aliran Islam Reformis di Indonesia. Akhirnya, Kyai Abdul Wahab Hasbullah mengorganisir tokoh Islam tradisional dan bekerjasama dengan tokoh nasionalis, kemudian mendorong Kyai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi untuk ulama dan Islam tradisional. Tujuan utama didirikannya NU pada tahun 1926 adalah untuk menciptakan hubungan antara ulama yang berpegang pada empat mazhab Sunni dan meneliti buku-buku teks agama untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut mengandung pikiran-pikiran para reformis atau tidak. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan amal, pendidikan, memajukan pertanian, dan perdagangan. NU didirikan sesungguhnya lebih merupakan usaha sederhana dalam pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar. Sesuai dengan motto NU:

Memelihara apa yang datang dari masa lampau asalkan baik, dan mengambil yang lebih baik dari apa yang terjadi (*Al-Muhafadzatu „ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah*).⁹⁹

⁹⁸ Greg Fealy. "*Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*". (Yogyakarta: LkiS, 2003). hlm. 21

⁹⁹ Nurul Shobacha. *op.cit*, hlm. 100

Berdirinya organisasi NU tidak jarang dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar sebelumnya. Banyak pengamat yang menyebutkan bahwa lembaga yang menjelmakan corak Islam yang diwakili oleh NU adalah pesantren atau pondok yang pada dasarnya merupakan fenomena pedesaan.

Berdirinya NU melengkapi organisasi-organisasi kebangsaan dan sosial keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah dan NU mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagai gerakan sayap tradisional Islam. Di bawah kepemimpinan kyai-ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.¹⁰⁰

Tradisi keagamaan yang mengakar pada NU seringkali dipandang sebelah mata oleh ormas modern seperti Muhammadiyah, karena perbedaan corak budaya kedua ormas ini menyebabkan sering terjadinya konflik. Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu organisasi modern yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada 18 Nopember 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.¹⁰¹

Secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW dan diberi tambahan *ya'nisbah* dan *ta' marbutah*

¹⁰⁰ Ahmad Syarif Muthohar. "*Penyatuan almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama*". (Semarang: UIN Walisongo). hlm. 52

¹⁰¹ Tasnim Rahman Fitra. *op.cit*, hlm. 82

yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. K.H Ahmad Dahlan menegaskan bahwa “Muhammadiyah bukanlah nama perempuan melainkan berarti umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan yang penghabisan.”¹⁰² Disebutkan juga bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunah.¹⁰³

Sebagai sebuah organisasi berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya dengan mendirikan sekolah bergaya Eropa, rumah sakit dan panti asuhan. Muhammadiyah juga merintis kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPM-SDM) yang masih terus melakukan upaya pengembangan ekonomi umat dan tidak terbatas hanya untuk warga Muhammadiyah, dengan mendorong kegiatan produktif dan komersial dengan model simpan pinjam sebagai titik masuk. Program pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan, latihan dan penyuluhan dengan menerapkan konsep *Community College* yang memiliki inti konsep pendidikan, latihan dan penyuluhan yang merespon kebutuhan ekonomi dan bisnis. Fungsi dan peranan *Community College*

¹⁰² Rusjdi. *Muktamar Muhammadiyah Ke 41 Menerima Asas Tunggal*. (Panji Masyarakat No. 463, 1985). hlm. 16

¹⁰³ Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, telah disesuaikan dengan UU No 8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab I Pasal I. Lihat Dessy Amanatussolichah, *"Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah"*. (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 35

merupakan pusat informasi seperti informasi pasar, teknologi, atau tenaga kerja dan juga sebagai pusat penelitian perekonomian rakyat.¹⁰⁴

Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta dan KH. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumahnya. Pidato yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan menyebabkan banyak peserta kongres meminta untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa hingga pada tahun 1920 Muhammadiyah berkembang pesat ke seluruh Indonesia.¹⁰⁵

Muhammadiyah dan NU, dalam sejarahnya hanyalah organisasi keagamaan yang sering berkompetensi dalam masalah-masalah keagamaan. Politik yang mereka mainkan pada awalnya hanyalah kolaborasi untuk melawan penjajah. Secara garis besar, sejarah perpolitikan NU terdapat pembagian periode yang ditandai berbagai perubahan penting sikap politik dari NU itu sendiri. Pada periode *pertama*, yang merupakan periode pemerintah kolonial Belanda, dicirikan oleh sikap NU yang *abstain*¹⁰⁶ terhadap politik (1926-1942). Periode ini diikuti Pendudukan Jepang, masa ketika kiai mulai terlibat dalam politik (1942-1945). Perjuangan kemerdekaan (1945-1949) merupakan periode dimana NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik. Pada tahun-tahun demokrasi Parlementer (1949-1956) NU berubah menjadi partai politik tetapi gagal memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya. Pada masa Demokrasi

¹⁰⁴ Asmaul Fauziyah. *op.cit*, hlm. 31

¹⁰⁵ Bruinessen. *op.cit*, hlm. 14

¹⁰⁶ *Abstain* adalah sebuah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, abstain dapat diartikan golongan putih (golput) golongan yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum, dikutip dari. Angelsari. "apakah salah menggunakan hak abstain?".(kompasiana.com. 2019). Diakses pada tanggal 25 Sep. 20 pukul 11.30

Terpimpinnya Soekarno (1959-1965, NU menjadi penyangga rezim otoriter populis yang menyebabkan sejumlah konflik internal. Pada masa transisi yang keras (1965-1966), NU harus mendefinikan ulang peranannya. Orde Barunya Soeharto (1967-1998), masa ketika NU untuk beberapa lama menampilkan diri sebagai kekuatan oposisi yang tegar namun mengalami depolitisasi yang luar biasa.¹⁰⁷

Reorientasi politik yang dilakukannya lebih memfokuskan kepada *check and balances* (keseimbangan) untuk mewujudkan *welfare state* (kesejahteraan) dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia secara umum.¹⁰⁸ Keterlibatan NU dengan politik masa pemerintahan Kolonial Belanda adalah menghimpun kekuatan dengan para pemuka agama melalui dunia pesantren yang akhirnya melahirkan revolusi jihad. NU bangkit menghimpun laskar-laskar kekuatan (*hizbullah*) untuk melawan penjahan Belanda yang dianggap kafir dan dhalim.¹⁰⁹ NU dengan segala kekuatan yang ada pada tingkat komunitas masyarakatnya secara menyeluruh memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru yang disebut ulama dan santri, karena kekuatan NU ini semakin lama semakin kuat, maka oleh penjajah Belanda ingin dijauhkan dari pengaruh politiknya.¹¹⁰

Muhammadiyah dikenal juga sebagai gerakan pembaruan yang diakui oleh masyarakat luas, hal itu dapat dibuktikan dari gagasan dasar KH. Ahmad Dahlan

¹⁰⁷ Bruinessen. *op.cit*, hlm. 41

¹⁰⁸ Munawir Haris. 'Partisipasi Politik NU Dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah'. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 15 No.2, 2015. hlm. 286

¹⁰⁹ Amin Farih. 'Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)'. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.24 No.2, 2016. hlm. 263

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 252

selaku pendirinya. Gagasan dan langkah pembaruannya ditunjukkan oleh sejumlah terobosan yakni meluruskan arah kiblat, shalat hari raya di tanah lapang, cara memahami Islam yang bersifat tajdid, serta gagasan orisinil tentang pemahaman dan implementasi surat *Al-Ma'un*. KH. Ahmad Dahlan juga merintis pentingnya publikasi yang melahirkan “majalah suara muhammadiyah tahun 1915 dan mempelopori pendidikan Islam modern”.¹¹¹

Muhammadiyah tidak pernah absen dalam kiprahnya di bidang politik, hanya saja wajah politik yang ditampilkan Muhammadiyah berbeda karena adanya pengaruh rezim yang berkuasa. Perjalanan kiprah politik Muhammadiyah secara tidak resmi menempatkan diri sebagai partai politik atau gerakan politik di bawah kepemimpinan K.H. Mas Mansur. Beliau mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada zaman belanda dan diangkat menjadi salah satu tokoh dalam Empat Serangkai pada kepemimpinan Jepang yang menjadikan Muhammadiyah berada didalam politik dengan pengaruh kepemimpinannya. Pada masa Soekarno, Muhammadiyah tidak konsisten dengan pendirian awalnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah dalam perjalanannya secara terang-terangan mendukung partai Masyumi dan keluar dari Masyumi ketika pemerintah dan Masyumi tidak harmonis, sehingga Presiden Soekarno memaksa Masyumi untuk membubarkan diri pada tahun 1960. Muhammadiyah pada masa Soeharto, berusaha menghidupkan kembali Masyumi yang gagal direhabilitasi oleh pemerintah dan membentuk partai baru yaitu Parmusi. Pemerintah kemudian melakukan transformasi pemimpin non-formal

¹¹¹ Haedar Nashir. '*Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*'. (Suara Muhammadiyah: 2010). hlm. 4

seperti ulama sebagai badan pemerintahan dengan tujuan untuk meredam dan mengendalikan konflik pemerintah dengan ummat Islam dan melarang mantan pemimpin Masyumi menjadi pemimpin Parmusi.¹¹²

Muhammadiyah tidak pernah ikut campur dalam melawan kolonial. Pada dasarnya di sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah, ditanamkan anti kolonialisme Belanda dengan cara diindoktrinasikan secara rahasia tetapi efektif. Belanda tidak mencurigai bahwa gerakan Muhammadiyah ini berbahaya, tapi sebenarnya hal ini menandakan kurang cermatan aparat-aparat kolonial dalam membaca gerakan Muhammadiyah. Kondisi semacam ini ternyata menguntungkan, karena Muhammadiyah mempunyai kesempatan yang baik untuk mengembangkan kegiatan sosial-keagamaan di seluruh Indonesia tanpa banyak rintangan dari penjajah.¹¹³

Baik pada masa pra-kemerdekaan maupun setelah merdeka, secara individu anggota Muhammadiyah dan NU banyak terlibat secara langsung dalam perjuangan melawan penjajah, diluar keanggotaannya sebagai pengikut Muhammadiyah dan NU. Pada akhir kekuasaan Hindia-Belanda, kegiatan politik rakyat Indonesia semakin tertekan. Hal ini kemudian di manfaatkan Jepang untuk mengambil hati para pemimpin umat Islam agar mau mendukung Jepang dalam melawan negara-negara barat, untuk itu Jepang menghidupkan kembali organisasi

¹¹² Fajar Iwantoro. *'Dinamika Politik Muhammadiyah Pada Masasukarno Sampai Masa Soehartopada Tahun 1945-1998'*. (Jember: Universitas Jember, 2014). hlm.vii

¹¹³ Miftahuddin Dkk. *'Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)'*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012). hlm. 7

MIAI¹¹⁴ (Majelis Islam A'la Indonesia). Diadakanlah sebuah pameran Islam di Tokyo dengan sasaran umat Islam Indonesia pada tanggal 5-29 November 1939 dan mengundang para pemimpin MIAI, dengan tujuan untuk memobilisasi umat Islam agar ormas-ormas Islam yang bernaung dibawahnya bisa berguna untuk keperluan perang.¹¹⁵

Keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam kancah politik praktis secara signifikan baru dimulai pada tahun 1939 ketika mereka mendirikan MIAI.¹¹⁶ Keberadaan MIAI memang sangat memberi kontribusi sangat banyak bagi umat Islam. Kehadirannya mampu menerbitkan majalah Suara Islam yang menjadi salah satu keuntungan besar bagi para pemimpin Islam, sebab hal itu tidak bisa didapatkan oleh kaum nasionalis yang sebelumnya telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada pemerintahan Jepang untuk menerbitkan majalah. Jepang kemudian menyadari bahwa MIAI bermanfaat bagi umat Islam dan tidak memberikan keuntungan terhadap pemerintahan Jepang, maka pada akhir 1943 Jepang membubarkan MIAI. Dibubarkannya MIAI, NU dan Muhammadiyah, beserta para pemimpinnya berhasil mendirikan lagi suatu wadah perjuangan bagi umat Islam yaitu Masyumi, yang merupakan pengganti dari MIAI.¹¹⁷

Keadaan umat Islam setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, secara politis tidak terlalu menggembirakan. Keadaan ini bisa dilihat dari kurang

¹¹⁴ MIAI adalah suatu organisasi federasi atas inisiatif Muhammadiyah dan NU yang didirikan di Surabaya pada September 1937

¹¹⁵ Miftahuddin Dkk. *op.cit*, hlm. 17

¹¹⁶ Abdul Mundlir. 'Peran Politik NU Tahun 1952-1955'. Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No.3, 2014. hlm. 629

¹¹⁷ Ahmad Sholikin. 'Dinamika Hubungan Muhammadiyah Dan Partai Politik Di Indonesia'. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, Vol.5 No.2, 2020. hlm. 19

terwakilinya tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melihat kedudukan umat Islam dan aspirasi umat Islam seperti itulah yang kemudian menimbulkan kesadaran di kalangan tokoh-tokoh Islam untuk membentuk partai politik Islam.¹¹⁸ Adanya keinginan bersama di kalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam mendapat legitimasi setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik. Empat hari setelah keluarnya Maklumat tersebut, maka diadakanlah Mukhtamar Umat Islam pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945 bertempat di Gedung Muallimin Yogyakarta. Pelaksanaan mukhtamar adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam, yakni para ulama, guru-guru agama dari pondok pesantren dan madrasah serta pemimpin-pemimpin organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.¹¹⁹

Mukhtamar tersebut memutuskan beberapa hal *pertama*, Masyumi merupakan partai politik Islam. *Kedua*, Masyumi merupakan satu-satunya partai politik di kalangan umat Islam. *Ketiga*, memperkuat persiapan umat Islam untuk *berjihad fi sabilillah* dalam melawan segala bentuk penjajahan. *Keempat*, memperkuat pertahanan Negara Indonesia dengan menyusun Barisan *Sabilillah* di daerah-daerah. *Kelima*, memilih Dr. Soekiman sebagai ketua, dan wakil ketua masing masing Abikusno dan Wali Al Fatah.¹²⁰

Terbentuknya Masyumi ditahun pertamanya yakni pada tahun 1945, sebelum ia resmi menjadi partai politik, NU pernah mendapatkan hak istimewa

¹¹⁸ Insan Fahmi Siregar. 'Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960'. Jurnal Thaqa'fiyyat, Vol.14 No.1, 2013. hlm. 90

¹¹⁹ Siregar. *loc.cit*

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 91

berupa posisi yang lebih banyak di pusat. Muhammadiyah dan NU tidak menjadi pesaing politik saat itu hingga pada tahun 1940-an, tidak terdapat isu politik yang signifikan diantara keduanya. Pada saat itu Muslim Indonesia dianggap sebagai *Ummah* karena masih relatif bersatu dalam perspektif politik namun, keadaan itu tidak berlangsung lama setelah Masyumi berubah menjadi partai politik pada November 1945 dan dianggap sebagai tonggak sejarah tujuan partai politik selanjutnya.¹²¹

Masyumi kemudian berubah menjadi partai politik karena pernah terlibat dalam pemerintahan dan turut menyertai asas politik Indonesia sekurang-kurangnya sampai tahun 1960. Partai Masyumi merupakan satu-satunya partai yang berasaskan Islam yang lahir pada awal kemerdekaan. Partai Masyumi didukung oleh organisasi-organisasi keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Banyaknya dukungan dari berbagai organisasi mengantarkan Masyumi berkembang dengan cepat, dan menjadi salah satu partai besar di Indonesia.¹²² NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, K.H Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pemimpin tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepolitikan Masyumi, karena itu keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari.

Pada masa demokrasi terpimpin, Masyumi tidak ambil bagian karena sejak awal Masyumi telah menolak konsep Soekarno tentang Dewan Nasional Gotong Royong dan Dewan nasional yang dikemukakan pada tanggal 21 Februari 1957.

¹²¹ Suaidi Asyari. *op.cit*, hlm. 2

¹²² Siregar.*op.cit*, hlm. 89

Rapat kabinet yang diselenggarakan oleh presiden Soekarno tidak mengikutsertakan Masyumi, namun ketidakikutsertaan Masyumi ke dalam rapat bukan berarti Umat Islam tidak terlibat dalam Demokrasi Terpimpin. Soekarno masih merangkul partai Islam lain seperti NU, PSII, dan Perti. Keterlibatan NU pada pemerintahan Soekarno bukan tidak berdasar, karena penampilan NU dalam Demokrasi Terpimpin dianggap bisa menggantikan posisi Masyumi. Kenyataannya, posisi yang dipegang NU pada masa itu terbatas sebagai Menteri Agama dan belum pernah menduduki posisi perdana Menteri atau orang pertama dalam pemerintahan seperti Masyumi.¹²³

Keterlibatan Muhammadiyah dalam pembentukan partai Masyumi juga besar. Muhammadiyah menjadi salah satu pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi yang dideklarasikan di Sekolah Madrasah Mu'almin Yogyakarta milik Muhammadiyah. Pada kurun waktu tahun 1945-1959 kita bisa melihat hampir 50% keanggotaan Partai Masyumi adalah kader-kader Muhammadiyah.¹²⁴

Tidak lama setelah Masyumi sukses menjadi partai politik, keanggotaan Masyumi mengalami pengurangan, terutama setelah NU keluar dari Masyumi pada 1952. NU keluar dari Masyumi disebabkan karena kurang terakomodasinya keinginan dan kepentingan NU dalam Masyumi. Ketidaknyamanan itu semakin terasa ketika muktamar memutuskan untuk merubah status Majelis Syuro menjadi badan penasehat. NU merasa kedudukannya dalam Masyumi sudah tidak begitu penting lagi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan partai. NU

¹²³ Mohammad Khoiri. *op.cit*, hlm. 48

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 80

keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri yakni Partai NU pada 1952.¹²⁵

Keluarnya NU dari Masyumi, membuat Muhammadiyah menjadi anggota yang paling cemas karena berada di titik krusial pada masa demokrasi terpimpin. Penyebab utamanya adalah posisi Muhammadiyah sebagai anggota istimewa di partai Masyumi yang pada saat itu kiprah politiknya sedang mengalami krisis, terutama adanya peningkatan konflik antara Presiden Soekarno dengan Pimpinan Masyumi, sehingga anggotanya berkurang drastis.¹²⁶

Akhirnya pada tahun 1960 partai Masyumi diperintahkan untuk membubarkan diri sehingga peran politik Muhammadiyah menjadi termarginalkan, akibatnya Muhammadiyah mengalami kesulitan dalam memainkan peran politik secara proporsional. Relasi aktivis Muhammadiyah dan aktivis Islam dengan negara menjadi renggang dan dipenuhi rasa curiga.¹²⁷

Didirikannya partai Muslimin Indonesia merupakan kelanjutan dari Partai Masyumi sebagai salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disitulah Muhammadiyah ikut andil dalam pembentukan Parmusi tahun 1967, bahkan untuk pertama kali dua tokoh Muhammadiyah yakni Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun menjadi ketua umum dan sekretaris jenderal Parmusi.¹²⁸ Parmusi pada awal Orde Baru turut ikut serta dalam membangun sistem demokrasi di negeri ini, meskipun dalam perjalanan sejarahnya sering

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 95

¹²⁶ Siregar. *op.cit*, hlm. 99

¹²⁷ Syarifuddin Jurdi, "Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia Tahun 1966-2006". Jurnal Tajdida, Vol. 9 No. 1, 2011. hlm. 128

¹²⁸ Asmaul Fauziyah. *op.cit*, hlm. 3

terkooptasi pemerintah.¹²⁹ Ketidak-harmonisan hubungan umat Islam dan pemerintah membuat umat Islam pada masa Orde Baru berada dalam posisi defensif. Menghadapi kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam, Muhammadiyah ternyata tetap konsisten bersikap kritis.¹³⁰

B. Hubungan Politik antara NU dan Muhammadiyah

Muhammadiyah dan NU pada awalnya mengarahkan anggota-anggotanya diseluruh Indonesia untuk membangun potensi di bidang kehidupan sosial budaya tanpa partai politik. NU dan Muhammadiyah menstransmisikan nilai-nilai keagamaan sejalan dengan prinsip demokrasi barat, termasuk toleransi, menghargai perbedaan, kebebasan berbicara atau pendapat, dan pembuatan keputusan.¹³¹

Organisasi NU dan Muhammadiyah melebarkan sayapnya mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Anggota NU kebanyakan berada di pedesaan, sedangkan sebagian besar anggota Muhammadiyah tinggal di wilayah perkotaan. Muhammadiyah sangat aktif terlibat dalam pembangunan sosial melalui sekolah, kesehatan, dan dakwah. NU tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukung utamanya adalah para kyai yang berasal dari pesantren dan menjadi pemimpin pesantren. Pembangunan sosial yang dilakukan NU hanya sebatas pada pendidikan di

¹²⁹ Novi Andriawan. '*Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus Parmusi Tahun 1967-1971*'. (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2007). hlm. 26

¹³⁰ Asmaul Fauziyah. *op.cit*, hlm. 8

¹³¹ Fuad Fachruddin. "*Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*". (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006). hlm. 8

pesantren maka NU sulit memanjangkan gerak pengabdian sosialnya seperti halnya dalam pembangunan Universitas. Ini yang membedakan dengan ormas lain, pesantren juga dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi wahana resistensi moral dan budaya atau pewaris tradisi intelektual Islam tradisional.¹³²

Sikap KH. Ahmad Dahlan terhadap Muhammadiyah dari sebagian masyarakat Jawa tidak hanya menyangkut gerakan purifikasi dalam tataran praktik keagamaan saja. Bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang dirintis Muhammadiyah sempat mendapat cemooh dari masyarakat karena mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu hitung, bahasa Belanda, dan tulisan latin. Sekolah-sekolah Muhammadiyah justru mendobrak anggapan masyarakat umum dengan langkahnya yang memodernisasi diri. KH. Ahmad Dahlan bahkan sempat dicap sebagai kyai kafir karena mengadopsi sistem pendidikan Barat. Tidak hanya dengan mengajarkan ilmu-ilmu umum yang dianggap sebagai ilmu kafir, tetapi juga memberlakukan sistem klasikal, proses pendidikan yang menyertakan siswa laki-laki dan perempuan di kelas yang sama.¹³³

Berdirinya NU berbeda dengan Muhammadiyah, yakni selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan senantiasa dilandasi oleh dasar syari'at Islam dan nilai-nilai keislaman, juga didasari atas nilai-nilai keindonesiaan dan semangat nasionalisme yang tinggi.¹³⁴ NU dalam perjalanan sejarahnya, biasanya bersikap sangat akomodatif terhadap pemerintah dan para pemimpinnya, sehingga

¹³² *Ibid*, hlm. 10

¹³³ Zakiya Darajat. 'Muhammadiyah Dan NU: Penjaga Moderatisme Islam Di Indonesia'. Jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.1 No.1, 2017. hlm. 81

¹³⁴ Nurul Shobacha.*op.cit*, hlm. 100

sering dituduh sebagai orang-orang oportunis. Selama tahun 1970-an ketika kebijakan pemerintah Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritik pemerintah secara terang-terangan.¹³⁵

Perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah, menyebabkan terjadinya kerenggangan diantara keduanya. Sejak NU melakukan penarikan diri dari Masyumi yang didominasi kaum modernis pada 1952, kedua partai ini terus bersaing mencari dukungan di kalangan masyarakat Muslim. Tuduhan oportunisme, umumnya muncul karena kebijakan NU yang sering berubah-ubah. Perubahan itu dipandang sebagai akibat adanya keinginan untuk mencari keselamatan atau mempertahankan posisinya di pemerintahan. Membaiknya nasib politik NU selama 1950-an, yang terjadi bersamaan dengan kemunduran Masyumi, semakin mempertajam ketidaksukaan Muhammadiyah terhadap NU. Muhammadiyah menganggap NU telah berulang kali mengkhianati Masyumi dan perjuangan Islam yang lebih luas demi kepentingan dirinya yang lebih sempit melalui aliansinya dengan partai-partai non-muslim. Kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma sebagai pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan. NU dan politik mungkin dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain.¹³⁶

Hubungan antara Muhammadiyah dengan NU didasarkan atas keanggotaan kelompok yakni anggota, pengikut atau jama'ah dan pendukung, serta cara kaum muslim melaksanakan ibadah. Hal itu, membuat orang-orang

¹³⁵ Bruinessen. *op.cit*, hlm. 1

¹³⁶ Gred Fealy. *op.cit*, hlm. 5

mengklaim bahwa semua santri Indonesia yang terasosiasi dengan Muhammadiyah ataupun NU secara otomatis adalah anggota dari organisasi ini.¹³⁷ Berbagai masalah mengenai ibadah seperti *ijtihad*, *bid'ah* dan *taqlid* adalah persoalan antara NU dengan Muhammadiyah di tahun-tahun awal berkembangnya. Ketiga masalah tersebut memang mewarnai perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai kira-kira tahun 1950-an. Dari sekian banyak masalah *khilafiyah* yang membedakan antara NU dengan Muhammadiyah tinggal masalah penentuan atau pemakaian cara untuk menetapkan awal bulan Ramadhan atau Syawal.¹³⁸

Terkait akhir perpecahan antara NU dan Muhammadiyah adalah alokasi jabatan Kementrian Agama kepada orang-orang yang bukan NU dalam Kabinet Wilopo yang didominasi PNI/Masyumi. Akibatnya, muslim Indonesia sebagai *ummah* mulai terpecah. Perpecahan ini yang kemudian dikenal sebagai Islam “modernis” yang diwakili oleh Muhammadiyah versus Islam “tradisionalis” yang diwakili oleh NU. Isu apapun yang terjadi saat itu terkait dengan salah satu organisasi ini selalu dipandang sebagai bersifat keagamaan dan politik.¹³⁹

C. Sepak Terjang Politik NU dan Muhammadiyah dengan Pemerintah Orde Baru

Pada Masa Orde Baru agama telah memerankan peranan yang sangat besar, dalam membangun aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan. Sejak pemerintahannya selama 32 tahun dari tahun 1966 sampai 1998, umat Islam menghadapi kebijakan-kebijakan

¹³⁷ Suaidi Asyari. *op.cit*, hlm. 17

¹³⁸ Mahrus Irsyam. *op.cit*, hlm. 15

¹³⁹ Suaidi Asyari. *op.cit*, hlm. 3

dan sikap pemerintah Orde Baru yang tidak menguntungkan bagi kalangan Islam. Atas perwakilan dari tokoh-tokoh besar Islam Indonesia seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahid Hasyim, mampu mempertahankan keutuhan organisasi Islam di tengah sulitnya masa pemerintahan Orde Baru. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemerdekaan nasional yang paling dipercaya terhadap “Islamisasi” pancasila dimana mereka mendorong tokoh-tokoh muda Islam untuk menerima pancasila sambil tetap mempertahankan aqidah islamiyah sebagai dasar aktivitas organisasi. Atas hasil kerja merekalah sehingga akhirnya ideologi tersebut dapat diterima oleh sebagian besar kaum Muslim hingga sekarang.¹⁴⁰

Hubungan Islam dengan Pemerintah Orde Baru dipetakan menjadi tiga fase yaitu, *pertama*, antagonistik (1966-1981) yang diwarnai dengan berbagai konflik dan kecurigaan antara Islam dan pemerintah. *Kedua*, resiplokal kritis (1982-1985) proses saling mengajari dan saling memahami posisi masing-masing. *Ketiga*, akomodatif (pasca 1985), hubungan yang komunikatif dan berkurangnya rasa saling curiga.¹⁴¹ Kebijakan pada awal Orde Baru memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, menjadikan kelompok kalangan Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU memerlukan formula baru agar dapat tetap eksis di tengah represi kekuasaan Orde Baru.¹⁴²

Ketidak-harmonisan hubungan umat Islam dan pemerintah membuat umat Islam pada masa Orde Baru berada dalam posisi defensif. Hal ini terjadi, karena adanya langkah kebijaksanaan pemerintah yang dinilai golongan Islam tidak

¹⁴⁰ Okrisal Eka Putra. *op.cit*, hlm. 9

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 10

¹⁴² Okrisal Eka Putra. *loc.cit*

proporsional bagi kepentingan politik umat Islam. Umat Islam merasa bahwa andil atau saham mereka cukup besar dan sah dalam menyukseskan transfer kekuasaan, misalnya dalam mengganyang PKI.¹⁴³ Hubungan Islam dengan pemerintah Orde Baru yang mengalami pergeseran ini dimungkinkan karena format politik Orde Baru yang pragmatis. Dalam konteks ini kekuatan-kekuatan yang berorientasi politik secara berlebihan mendapat tekanan dengan pertimbangan keamanan. Tekad Orde Baru sendiri lebih ditujukan pada usaha pembangunan dalam pengertian ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Orde Baru dengan formasi politik seperti itu dapat menangkal gerakan-gerakan politik Islam yang dikhawatirkan muncul sebagaimana sudah pernah muncul pada masa Orde Lama sehingga menekan kemungkinan munculnya radikalisme Islam traumatis yang memperjuangkan negara Islam.¹⁴⁴

Kepartaian Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menginginkan jika partai politik berjumlah sedikit saja sehingga terjadi penggabungan paksa partai politik menjadi dua partai. Kekhawatiran bahwa agama Islam bisa menjadi ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik merupakan pokok persoalan yang menjadi salah satu pertimbangan lahirnya kebijakan politik pemerintah terhadap kehidupan umat Islam. Berbagai kebijakan politik yang bersangkutan digunakan untuk menjamin kestabilan politik, maka sistem partai dirubah dengan menyederhanakan jumlah partai atau kekuatan

¹⁴³ Muhammad Hari Zamharir, *"Agama Dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid)"*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 65

¹⁴⁴ Zaini Dahlan. *op.cit*, hlm. 129

politik secara sah. Pengawasan ketat dari pemerintah Orde Baru terhadap partai-partai Islam telah mengakibatkan buruknya penampilan partai-partai Islam pada politik Indonesia. Hal tersebut cukup mengejutkan bagi NU dan Muhammadiyah karena NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai yang berhaluan sekuler dan non seperti: Islam PNI, Pakindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba dikelompokkan dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).¹⁴⁵

Rezim Orde Baru sendiri menggunakan kendaraan politik partai Golongan Karya yang ruang geraknya lebih leluasa mendulang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari yang religius Islam, nasionalis religius, nasionalis sekuler, dan bahkan suara dari kalangan non-Islam¹⁴⁶. NU mulai diperlakukan tidak adil sejak Partai Islam dijadikan satu, sejak NU kehilangan Departemen Agama dan karena keikutsertaan NU dalam Orde Lama, membuat orang-orang tradisional menilai bahwa tersisihnya NU itu dikarenakan kurangnya kematangan Politik NU sendiri.¹⁴⁷

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik Indonesia juga sudah terjadi sejak masa pra-kemerdekaan. Pada awal kelahirannya tidak ada penyampaian secara resmi baik itu dari pendiri Muhammadiyah ataupun para ketua Muhammadiyah setelahnya yang mengatakan bahwa dalam menjalankan sebuah *khittah* atau perjuangan Muhammadiyah dengan melalui sarana politik ataupun Muhammadiyah ikut dalam dunia politik secara praktis. Muhammadiyah mengikrarkan diri bukan sebagai partai politik walaupun ada kaitannya dengan

¹⁴⁵ Nurul Shobacha. *op.cit*, hlm. 109

¹⁴⁶ Syarifuddin Jurdi. *op.cit*, hlm. 143

¹⁴⁷ Nurul Shobacha. *op.cit*, hlm. 107

organisasi politik Islam. Tujuan utama didirikannya Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada sumber Al-Qur'an dan Hadist.¹⁴⁸

Pendiri Muhammadiyah sendiri yaitu KH. Ahmad Dahlan banyak berkenalan secara khusus dengan para tokoh-tokoh Indonesia yang aktif dalam sebuah organisasi ataupun para tokoh-tokoh politik seperti H.O.S Cokroaminoto, H. Agus Salim, H. Samanhudi dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, sama sekali tidak mempengaruhi K.H. Ahmad Dahlan untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai badan politik, namun juga bukan berarti tidak peduli dengan politik ataupun acuh terhadap politik, justru Muhammadiyah yakin bahwa politik adalah sarana dalam menjalankan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik namun perjuangan yang dilakukannya tetap mendukung partai politik.¹⁴⁹

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik PII, Masyumi dan Parmusi pada awal Orde Baru memberikan implikasi yang berbeda terhadap organisasi Muhammadiyah sendiri dalam menghadapi kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam, Muhammadiyah tetap konsisten bersikap kritis. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap merugikan umat Islam. Dalam bidang politik, larangan rehabilitasi Masyumi yang kemudian melahirkan Parmusi dan diresmikan tahun 1968, serta keluarnya RUU Keorganisasian dan Kemasyarakatan. Muhammadiyah

¹⁴⁸ Teguh Ilham Muhadam Labolo. "*Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*". (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 3

¹⁴⁹ Muhammad Arafik. "*Peranan Muhammadiyah Dalam Pembinaan Islam Di Kabupaten Enrekang Pada Masa Orde Baru (1965-1997)*". (Makassar: UIN Allauddin Makassar, 2019), hlm. 3

kemudian menunjukkan sikap politik alokatif dalam bentuk saran, pendapat maupun lobi kepada pemerintah.¹⁵⁰

Realisme politik sekitar pemilu 1971 dan 1977, menunjukkan kuatnya persaingan merebut simbol-simbol Islam, sekaligus konflik nilai-nilai santri-abangan. Golkar yang melihat kuatnya pengaruh simbol-simbol Islam pada Partai Persatuan (PPP), berusaha keras membuktikan diri bahwa Golkar bukanlah partai abangan, sehingga situasinya seperti suatu pertarungan antara pemerintah melawan Islam. Pada 1980-an pembaharuan politik makin terkristal dengan pemberlakuan asas tunggal pancasila, dan tidak ada lagi yang disebut parpol agama, termasuk parpol Islam.¹⁵¹

Kemenangan Golkar dan kemajuan pesat PDI pada pemilu 1977, telah membawa muslim modernis untuk melepaskan diri dari arus umum pandangan Islam dan membiarkan Islamophobi.¹⁵² Akibatnya, tumbuh di beberapa kalangan Muslim modernis suatu gerakan etik, yang tengah menjadi politik Islam yang berkembang dengan berbagai variasi seperti ICMI dengan kedekatan interaksinya kepada negara, Muhammadiyah dengan politik alokatifnya, dan NU dengan penggalangan massanya. Argumentasi kunci yang ditampilkan di sini adalah ketika prasyarat demokrasi itu terpenuhi, loyalitas para penganut agama terhadap organisasi keagamaannya tidak menjadi rintangan bagi mereka untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, seperti halnya pemilihan umum.

¹⁵⁰ Asmaul Fauziyah. *op.cit*, hlm. 7

¹⁵¹ Muhammad Hari Zamharir. *op.cit*, hlm. 71

¹⁵² *Ibid*, hlm. 72

BAB IV

PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI

A. Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru

1. Hari Raya Idul Fitri

Hari raya Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam di seluruh dunia. Pada hari raya, umat Islam bersyukur dan merayakan keberhasilan mereka dalam menahan hawa nafsu selama satu bulan berpuasa di bulan Ramadhan. Pada momen Idul Fitri, umat Islam juga melakukan introspeksi terhadap tindakan-tindakan mereka selama setahun terakhir dengan saling meminta maaf baik dengan sesama anggota keluarga, teman, saudara maupun kerabat. Momen Idul Fitri juga dijadikan sebagai ajang pertukaran informasi dan kabar kehidupan satu sama lain baik antar keluarga maupun teman.¹⁵³

Penyambutan hari raya Idul Fitri ditandai dengan banyak hal yang menandakan lebaran sudah dekat. Hal ini banyak dimuat di televisi, radio, majalah maupun koran seperti munculnya liputan arus mudik,

¹⁵³ Alfitrahmat Saputro. *‘Motivasi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Berbelanja Pakaian , Kendaraan , Mebel dan Perhiasan Emas Menjelang Hari Raya Idul Fitri’*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013). hlm. 1

ucapan selamat Idul Fitri dari berbagai kalangan, iklan sirup, kue, biskuit, minuman penyegar dan sidang *Itsbat*¹⁵⁴.

Umat Islam di sunnahkan agar berhias dengan sepantasnya di hari raya Idul Fitri. Kebiasaan di tengah masyarakat muslim Indonesia ketika akan merayakan Idul Fitri yakni dengan diramaikannya pasar, dan tempat perbelanjaan untuk membeli makanan hari raya atau pakaian yang baru. Ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan untuk hidangan hari raya, mulai dari lontong atau ketupat hingga kue-kue manis.¹⁵⁵

Gambar 4.1 Bentuk Silaturahmi Masyarakat



Sumber Berita Nasional Harian Umum¹⁵⁶

¹⁵⁴ Sidang *itsbat* secara harfiah *isbat* berarti penyuguhan, penetapan, dan penentuan. Secara terminologi adalah sidang penetapan *dadlil syar'i* di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam: *Itsbat Penetapan*

¹⁵⁵ Anonim. "*Suka-Duka Di Hari Lebaran*". (Majalah Suara 'Aisjijah: Edisi Juni 1953/Syawal 1372, 1953). hlm. 10

¹⁵⁶ Anonim, '*Silaturahmi Dua Tetangga Ketika Hari Raya Idul Fitri*'. (Berita Nasional Harian Umum: 7 September, 1978). hlm.13

Penyambutan hari raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada akhir tahun 1942 yang diselenggarakan oleh Nippon atau Jepang. Pada saat akan digelar salat Id, Jepang mengimbau agar salat Id diadakan di pagi buta persis selesai subuh, alasannya sebelum matahari terbit Jepang harus upacara *seikerei*¹⁵⁷ di lapangan yang sama.¹⁵⁸

Situasi hari raya Idul Fitri pada Orde Baru sedikit berubah, yakni menjelang hari raya tahun 1962, harga makanan pokok mulai melonjak, suasana arus mudik mulai padat, adanya *hala bi halal* atau silaturahmi hingga suasana salat Id yang dilakukan di Masjid atau di lapangan.¹⁵⁹

Gambar 4.2
Solat Idul Fitri tahun 1996 di lapangan, dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan kawalan dua penjaga.



Sumber : Suara Muhammadiyah¹⁶⁰

¹⁵⁷ Upacara Seikerei adalah penghormatan dengan cara membungkukkan badan kearah matahari terbit. Periksa Utroq Triea, '*Upacara Seikerei*'. (Ensiklo.Com, 2014). Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 11.10

¹⁵⁸ Lentera Merah. "*Hari Raya Idul Fitri Di Zaman Jepang*". Youtube, diunggah oleh RSH1945 10 Oktober 2007. Diakses pada 18 September 2020 pukul. 22.01

¹⁵⁹ Utroq Triea. *loc.cit*

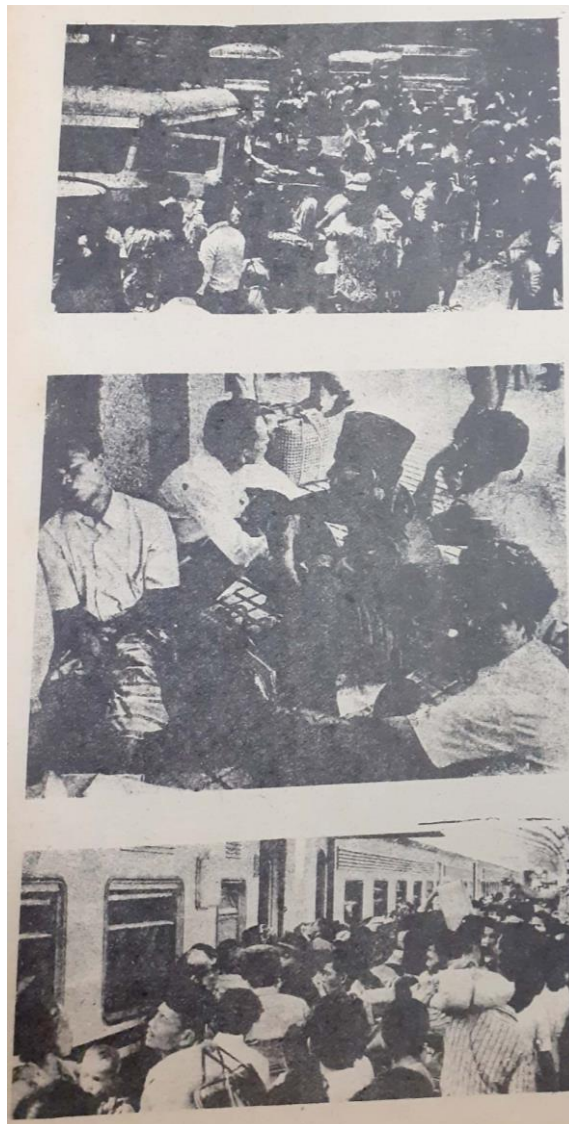
¹⁶⁰ Anonim, '*Islam Semakin Berperan*'. (Suara Muhammadiyah: No. 23 Th Ke 81 Desember, 1996). hlm. 12

Pada masa Orde Baru suasana Idul Fitri di beberapa kota cukup meriah, bahkan orang-orang tampak memadati pasar dengan bersuka cita. Banyak diantara mereka, baik tua maupun muda mengenakan pakaian berwarna terang dan bercelana panjang, adapula yang mengenakan sarung atau kopiah.¹⁶¹ Beberapa penjual juga tampak dipadati oleh pembeli yang sekadar untuk membeli makanan khas hari raya, pakaian dan perhiasan yang disiapkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Kebiasaan masyarakat lainnya menjelang hari raya terutama mereka yang tinggal jauh di perantauan adalah melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga atau kerabat. Kesibukan yang paling besar sebelum dan sesudah Idul Fitri pada saat itu adalah dipadatnya stasiun-stasiun kereta api dan terminal-terminal bus, terutama di Jakarta dan Surabaya, karena banyaknya mereka yang mudik atau pulang ke kampung masing-masing dan kemudian kembali lagi ke tempatnya bekerja.¹⁶²

¹⁶¹ EH. 2017. “*Cerita Lebaran Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan*”. Diakses dari islamindonesia.id tanggal 27 Maret 2020 pukul 12.02

¹⁶² Anonim. ‘*Gema Lebaran Idul Fitri I 399*’. (Majalah Suara Muhammadiyah: No. 17. th. 59 Setember I Tahun 1979), hlm. 10

Gambar 4.3
Bentuk masyarakat yang sedang memadati halte dan stasiun untuk mudik ke kampung halaman



Sumber : Majalah Adil¹⁶³

Terdapat fenomena yang sering terjadi di masyarakat dibalik suasana hari raya Idul Fitri yang meriah, yakni penentuan waktu Idul

¹⁶³ Anonim, '*Suasana Menjelang Idul Fitri*'. (Majalah Adil: Edisi Idul Fitri Juli, 1983). hlm. 11

Fitri. Pada masa Orde Baru, ada beberapa golongan atau kelompok yang melakukan shalat Idul Fitri terlebih dahulu yang mendahului keputusan dari pemerintah dan ada yang mengikuti shalat Idul Fitri bersama pemerintah. Fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan hasil hisab dan rukyat oleh beberapa golongan dengan pemerintah. Golongan tersebut berasal dari organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, karena mereka ikut terlibat dalam penentuan awal bulan qamariyah. Sepanjang sejarah penentuan waktu Idul Fitri pada masa Orde Baru, hanya terjadi lima kali perbedaan penetapan hari raya yakni pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998.

164

Pelaksanaan hari raya yang berbeda, berimplikasi kepada polarisasi pemahaman masyarakat muslim. Mengatasi masalah perbedaan ini Departemen Agama pada masa Orde Baru berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dengan mempertimbangan suatu kebijakan demi tercapainya kemaslahatan umum. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah Orde Baru dengan didirikannya Organisasi Badan Hisab Rukyat yang dibentuk dengan tujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Siti Tatmainul Qulub. *op.cit*, hlm. 110

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 111

2. Kriteria Penetapan Hari Raya Idul Fitri

1. Macam-Macam Kriteria Awal Bulan Qamariyah

1) Kriteria rukyah sebagai penentu awal bulan qamariyah yang beraneka ragam. Diantaranya:

- a. *Rukyah al-Hilal bi al-Fi'li*, kelompok ini menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai sejak terlihatnya hilal pada saat terbenam matahari tanggal 29. Apabila tidak terlihat maka jalan keluarnya adalah mengambil maksimum umur bulan 30 hari dan setelah itu mulailah tanggal 1 bulan baru.
- b. *Ijtima' Qabla al-Ghurub*, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai apabila hilal sudah ada pada saat terjadinya ijtima' (konjungsi).
- c. *Wujud al-Hilal*, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai apabila saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* (konjungsi) dan bulan (*hilal*) pada saat itu belum terbenam masih ada di atas ufuk.
- d. *Imkan al-Rukyah*, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai apabila saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* (konjungsi) hilal sudah ada dan dalam kondisi normal hilal itu mungkin dapat dilihat.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Miftahul Ulum. "Fatwa Ulama NU (*Nahdlatul Ulama*) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Hisab Rukyat*". Jurnal Syaikhuna, Vol. 10 No. 1, 2015. hlm. 5

2) Pada kriteria *wujud al-hilal* ini, langkah yang ditempuh Muhammadiyah dalam hisabnya adalah:

- a. Menghitung saat terjadinya *ijtima'* di suatu tempat atau beberapa tempat.
- b. Menghitung saat terbenam matahari di tempat tertentu.
- c. Menghitung tinggi hilal pada saat terbenam matahari di tempat tertentu itu.¹⁶⁷

3) Kriteria *imkan al-rukyah* banyak digunakan oleh pemerintah ASEAN untuk menjembatani adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah kemudian muncul MABIMS¹⁶⁸. Pertemuan antara empat negara tersebut dimulai pada tahun 1989. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”¹⁶⁹. Dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa *imkan al-rukyah* MABIMS dipakai sebagai kriteria resmi penentuan awal bulan qamariah dengan prinsip bahwa awal bulan (kalender) Hijriah terjadi jika:

- a. Pada saat Matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala minimum 2°.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 6

¹⁶⁸ MABIMS adalah singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Dan Singapura

¹⁶⁹ Arino Bemi Sado. “*Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah*”. Jurnal Hukum Islam Iain Mataram, Vol.13, No 1, 2014, hlm. 25

- b. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak *ijtima'*.¹⁷⁰

B. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Menyeragamkan Hari Raya Idul Fitri

1. Perbedaan dan Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru persoalan mengenai perbedaan waktu hari raya Idul Fitri selalu tampak menegangkan. Masalah transportasi yang semakin rumit, soal cara pembagian zakat, juga mengenai masalah perbedaan akhir Ramadhan. Hal tersebut seringkali menimbulkan provokasi antar beberapa kalangan, sehingga dalam suasana Idul Fitri orang tidak larut dalam suasana gembira dan silaturahmi untuk saling memberi maaf, namun malah terlibat dalam debat yang tidak berujung mengenai mana yang benar antara hari raya pertama atau yang kedua.¹⁷¹

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami hadis Nabi SAW. Ada yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah harus dengan menggunakan pengamatan hilal secara langsung (*rukyatulhilal*), namun ada juga yang memahami

¹⁷⁰ Moh. Salapuddin, *Menyatukan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab Dan Madzhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat*. (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 48

¹⁷¹ IW. *Setuju Dalam Perbedaan*. (Suara Muhammadiyah: No. 22 Thn Ke 81, 1996). hlm. 13

bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah cukup dengan menggunakan hisab. Kedua ormas yang berbeda ini, mempunyai dasar yang kuat dalam memahami interpretasi tersebut.¹⁷²

Mencari solusi untuk menyatukan hari raya sangat penting, mengingat masalah hari raya lebih banyak berdimensi publik daripada dimensi individual. Apalagi ibadah ritual yang dilakukan umat muslim saat berhari raya hanya dilaksanakan tidak lebih dari satu jam, yakni menyelenggarakan shalat *id*. Diawali dengan dikumandangkannya takbir pada malam hari raya Idul Fitri, kemudian terjadi kegiatan ekonomi yang mendadak setiap hari raya, dan tradisi mudik yang menjadi kolosal saat menjelang hari raya.¹⁷³

Kebersamaan dalam memulai puasa dan hari raya merupakan sebuah impian setiap orang karena itu merupakan salah satu bagian dari syiar Islam. Perbedaan dalam memulai puasa dan lebaran telah mengurangi nilai-nilai *syiar ukhuwah* dan persatuan ummat Islam. Persoalan perbedaan tersebut dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah menyelenggarakan sebuah musyawarah yang dikenal dengan sidang *itsbat*.¹⁷⁴

Pemerintah dalam sidang *istbat* melaporkan hitungan hisab dari berbagai metode dari hasil hisab dan hasil rukyat diseluruh Indonesia.

¹⁷² Eva Rusdiana Dewi. 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha'. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). hlm. 111

¹⁷³ *Ibid*, hlm 112

¹⁷⁴ Zakariyah. *op.cit*, hlm. 80

Laporan Ketua Departemen Agama selanjutnya ditanggapi oleh peserta sidang, dan setelah Menteri Agama menyimpulkan pandangan-pandangan itu kemudian mendapatkan persetujuan dari peserta sidang, dan mengisbatkan kapan akan dimulainya bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Presiden kemudian menugaskan kepada Menteri Agama untuk mempublikasikan hasil sidang itsbat penentuan awal Ramadhan dan Syawal kepada masyarakat dan menyatakan bahwa keputusan ini mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Keputusan dari pemerintah Orde Baru yang mengikat tersebut selalu berhasil menyeragamkan umat Islam dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah. Hal itu terjadi karena masyarakat dibuat patuh terhadap kebijakan pemerintah, bukan karena pertimbangan religiusnya, tetapi karena dampak yang terjadi pada mereka apabila tidak patuh pada pemerintah. Pemerintah Orde Baru memang selalu bertindak subversif, dimana pemerintah akan selalu mencampuri hal-hal yang bahkan untuk urusan umum, apalagi yang menyangkut hal-hal privat seperti masalah agama pasti tidak luput dari intervensi negara, lengkap dengan tindakan represifnya.¹⁷⁵

Selama Orde Baru penentuan waktu awal bulan qamariyah memang tidak ada yang berani membantah ataupun tidak patuh terhadap keputusan pemerintah, karena jika yang melanggar anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), besar kemungkinan akan ditegur, dipecat, dimutasi, atau tidak

¹⁷⁵ Ayung Notonegoro. '*Kala Orde Baru Meringkus Hilal Ramadhan*'. (Alif.Id, 2019). Diakses pada tanggal 21 Sep. 20 pukul 17.04

pernah dipromosi. Apabila yang melanggar masyarakat biasa bukan PNS, maka akan menghadapi aparat seperti babinsa, Koramil atau bahkan Kodim. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak berani untuk tidak mematuhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah.¹⁷⁶

Selama Orde Baru penentuan awal bulan qamariyah yang selalu dibuat seragam oleh pemerintah tersebut sempat terjadi perbedaan penetapan sidang itsbat antara NU dengan pemerintah. Perbedaan tersebut sempat terjadi pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998. Pada tahun 1985, setelah keputusan sidang itsbat ditentukan pemerintah, sempat terjadi perbedaan dalam hasil penentuan awal bulan Ramadhan. Perbedaan tersebut terjadi antara pemerintah dengan NU dimana pemerintah menetapkan Idul Fitri sehari sebelum NU dengan menggunakan hasil hisab sedangkan NU menetapkan sehari setelah pemerintah dengan menggunakan hasil rukyat, sehingga terjadilah perbedaan dalam penetapan waktu Idul Fitri. Perbedaan tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat atau golongan yang tidak mengikuti pemerintah, menjadi korban represif (tekanan) Pemerintah Orde baru. Hal itu disebabkan Salat *Id* menjadi penanda penting bagi pemerintah Orde baru, seseorang itu loyal ataukah tidak pada pemerintah.¹⁷⁷

Pada tahun-tahun selanjutnya yakni tahun 1986-1991, penetapan waktu Idul Fitri mulai seragam lagi berkat adanya Badan Hisab dan Rukyat yang diatur oleh pemerintah, namun perbedaan waktu Idul Fitri

¹⁷⁶ Ayung Notonegoro. *loc.cit*

¹⁷⁷ Ayung Notonegoro. *loc.cit*

kemudian terjadi lagi pada tahun 1992, 1993 dan 1994 dikarenakan metode penentuan awal bulan qamariyah oleh NU sejak tahun 1992 hingga 1994, NU menggunakan metode *rukyatul hilal* dengan acuan hisab *taqribi* yakni *Sullam al-Nayyirain* dan kriteria *imkan rukyat*. Sebaliknya pemerintah menggunakan metode hisab yang merupakan hasil Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan singapura). Perbedaan metode tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda sehingga selama tiga kali berturut turut mengalami perbedaan waktu Idul Fitri.¹⁷⁸

Perbedaan yang terjadi pada tahun 1992 disebabkan karena terjadinya perbedaan hasil perhitungan di kalangan NU dan Pemerintah dalam mengawali awal bulan Syawal. Pemerintah melalui sidang itsbatnya menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Wage, 5 April 1992, dimana data hilal ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) bulan masih di bawah ufuk. Keputusan pemerintah ini atas dasar istikmal dan menolak hasil laporan rukyat. Hal ini berbeda dengan PBNU yang mengumumkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu Pon, 4 April 1992, dimana ketinggian hilal ketika matahari terbenam pada hari Jum'at Pahing 3 April 1992, bulan sudah berada diatas ufuk dengan ketinggian 3°46'' sehingga menghasilkan waktu yang berbeda diantara keduanya.¹⁷⁹

¹⁷⁸ R Himayatika. '*Perbedaan Dan Persamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Syawal 1992, 1993, 1994 Dan Awal Dzulhijjah 2000 Antara Nahdlatul Ulama Dengan Pemerintah*'. (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 126

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 127

Perbedaan ini terjadi kembali pada tahun 1993 dan 1994. Menurut ahli hisab pada saat itu, Idul Fitri Jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993, tetapi jika hilal (bulan) bisa di rukyah sehari sebelumnya, berarti Idul Fitri akan jatuh pada hari Rabu, 24 Maret 1993. Ahli falak yang memimpin Markaz Penanggalan Idul Fitri pada saat itu, K.H. Turaichan Adjhuri Es Syarofi mengatakan bahwa, puasa bulan Ramadhan tahun ini berlangsung selama 30 hari sejak Selasa Pon 23 Februari 1993 hingga Rabu Pahing 24 Maret 1993. Idul Fitri pada tahun 1993 kemudian di tetapkan oleh pemerintah jatuh pada hari Kamis Pon 25 Maret.¹⁸⁰

Almanak NU menyatakan perbedaan dengan pemerintah yang membuktikan adanya perbedaan penetapan dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Idul Fitri tahun 1993 akan terjadi perbedaan seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut di perkuat oleh almanak NU yang biasanya diikuti warga NU di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa 1 Syawal 1413 H bertepatan kamis Pon 25 Maret 1993 dengan menggunakan rukyah, membuktikan adanya kemungkinan perbedaan penentuan 1 Syawal.¹⁸¹ Menurut ahli hisab pada tanggal 23 Maret 1993 bulan sudah tidak tampak, tetapi adapula ahli hisab yang lain mengatakan bulan bisa tampak sebagaimana dalam tradisi, NU tetap akan melaksanakan rukyah.¹⁸²

Pada tahun 1994 *ijtima'* akhir Ramadhan terjadi pada Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi (POB), bulan

¹⁸⁰ Masruri Nurhasan Amsar. '*Perbedaan Terbitnya Bulan Dan Hubungannya Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal*'. (Harian Pikiran Rakyat: 1993). hlm. 7

¹⁸¹ Masruri Nurhasan Amsar. *loc.cit*

¹⁸² AR. '*Jangan Diperuncing Perbedaan Idul Fitri*'. (Harian Pikiran Rakyat: 1993). hlm.

masih di bawah ufuk. Pada saat itu Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Senin Pahing, 14 Maret 1994 atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatul hilal. PBNU mengumumkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Legi, 13 Maret 1994 mendahului ketetapan pemerintah atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur.¹⁸³

Kemungkinan terjadinya perbedaan dalam menentukan waktu Idul Fitri pada saat itu, maka MUI membuat surat edaran yang isinya berupa anjuran kepada seluruh umat Islam untuk tidak saling menyalahkan dan menjelek-jelekkan hasil penetapan waktu Idul Fitri antara hisab dan rukyah. Sehubungan dengan hasil perbedaan tersebut, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti hasil penetapan dari pemerintah.

Penetapan tersebut menghasilkan kabar yang menggembirakan bahkan bagi Kementerian Agama, Tarmidzi Taher ketika mengumumkan waktu hari raya Idul Fitri tiga tahun terakhir yakni pada tahun 1995, 1996 dan 1997 dimana terdapat kesamaan antara pemerintah dan semua ormas Islam. Hal itu dikarenakan ketika NU memutuskan untuk menggunakan hisab *haqiqi tahqiqi* atau kontemporer sebagai pendukung pelaksanaan rukyat yang sama dengan pemerintah gunakan sebagai acuan hisab kontemporer sebagai pendukung dalam pelaksanaan rukyat.¹⁸⁴

¹⁸³ R Himayatika. *op.cit*, hlm. 135

¹⁸⁴ Okkie Muttaqie. *op.cit*. hlm. 14

2. Didirikannya BHR (Badan Hisab dan Rukyat)

Badan Hisab dan Rukyat adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk memberikan saran kepada Menteri Agama dalam penetapan tanggal, bulan-bulan qamariyah, khususnya penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal, dan Idul Adha. Pada mulanya, tanggal 12 Oktober 1971 menjelang Ramadhan 1391 H diadakan musyawarah para ulama untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 1 Ramadhan 1391 H. Musyawarah tersebut dilakukan oleh para ulama yang mendesak Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab Rukyat (LHR). Pada tanggal 20 Januari 1972 menjelang Dzulhijjah 1391 H diadakan musyawarah yang dihadiri ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN, dan unsur Kemenag untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 10 Dzulhijjah 1391 H kemudian dibentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama pada tanggal 16 Agustus 1972 yang diketuai oleh Sa'adoeddin Djambek.¹⁸⁵

Badan Hisab Rukyat Departemen Agama kemudian berubah menjadi Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Pembentukan Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama didasarkan atas SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyah Departemen Agama, atas pertimbangan yang diusulkan oleh Direktorat Peradilan Agama.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ahmad Izzuddin. *op.cit*, hlm. 4

¹⁸⁶ Susiknan Azhari. "*Ensiklopedi Hisab Rukyat*". (yogyakarta: Pustaka Pelajar). hlm. 39

Dibentuknya Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 77/1972 pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan tim perumus :

- a) Unsur Kementerian Agama: ketua Sa'aduddin Djambek, wakil ketua A. Wasit Aulawi, Sekretaris Djabir Mansur
- b) Lembaga Metereologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium dan Santosa Nitisastro
- c) Anggota : Z A Noeh, Susanto, Santoso, Radli Saleh, Junaidi, Muhadji, Penuh Dali dan Syarifudin.¹⁸⁷

Pada tanggal 23 September 1972 personalia BHR dilantik Menteri Agama. SK Dirjen Bimas Islam nomor D.I/96/P/1973 pada tanggal 28 Juni 1973 tentang Anggota BHR :

Daftar Tabel 4.1 Daftar anggota BHR pada tahun 1973

| NO | Nama Anggota BHR | Tempat |
|----|----------------------|---------------|
| 1 | KH. Muchtar | Jakarta |
| 2 | KH Turaichan Adjhuri | Kudus |
| 3 | KRB. Tang Soban | Sukabumi |
| 4 | KH Ali Yafi | Ujung pandang |
| 5 | KH Abdul Jalil | Kudus |

¹⁸⁷ Ahmad Izzuddin. *op.cit*, hlm. 5

| | | |
|----|----------------------|-------------|
| 6 | KH Wardan | Yogyakarta |
| 7 | Drs. Abdurrahim | Yogyakarta |
| 8 | Ir Basith Wachid | Yogyakarta |
| 9 | Ir Muchlas Hamidi | Yogyakarta |
| 10 | H Azlam M | Yogyakarta |
| 11 | H. Bidran Hadi | Yogyakarta |
| 12 | Drs. Bambang Hidayat | ITB Bandung |
| 13 | Ir Hamran Wachid | ITB Bandung |
| 14 | KH Abdul Aziz | Jakarta |
| 15 | Ali Ghazali | Cianjur |
| 17 | K Banadji Aqil | Jakarta |
| 18 | K Zuhdi Usman | Nganjuk |

Sumber : Jurnal Istibath¹⁸⁸

Ketua lembaga ini adalah orang yang berada di luar hierarki Departemen Agama dan wakil ketua adalah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, namun karena dalam pelaksanaannya seorang ketua harus melaporkan kegiatannya kepada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 6

Agama (Ditbinbapera), maka akhirnya lembaga ini diketuai oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.¹⁸⁹

Sejak Badan Hisab Rukyat didirikan pada 1972, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan laporan hasil *hisab* dan kesaksian *hilal* adalah sebagai fasilitator yang mengkoordinasi sidang *itsbat*. Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi anggota tetap dan berperan aktif dalam musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Tugas utama mereka dalam Muker (Musyawarah Kerja) BHR adalah menyiapkan data peta garis ketinggian hilal 0 derajat. Data ini sangat diperlukan untuk pembuatan Taqwim Standar Indonesia yang dikeluarkan Badan Hisab Rukyat terkait sebelum meresmikan keputusan tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal.¹⁹⁰

Dalam proses sidang *itsbat*, pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga besar Islam, Kementrian Agama, MUI serta para pakar ilmiah semuanya diundang untuk berdiskusi dan diminta untuk menyampaikan hasil dari metode yang mereka dapatkan. Indonesia tidak menganut madzhab tertentu seperti halnya Saudi Arabia yang memiliki banyak sekali madzhab sehingga dalam proses sidang *istbat* harus sesuai dengan madzhab yang dianut masing-masing. Berbeda dengan Indonesia yang tidak terikat

¹⁸⁹ Susiknan Azhari. *loc.cit*

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 40

dengan madzhab tertentu, maka semua organisasi yang diberi izin boleh mengikuti proses sidang itsbat.¹⁹¹

C. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Menentukan Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru

1. Metode NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Hari Raya Pada Masa Orde Baru

Penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan dan Syawal, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, serta menentukan awal bulan Syawal. Lembaga-lembaga Islam yang memiliki kontribusi besar dalam menentukan waktu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah serta pengembangan hisab dan Rukyat adalah NU dan Muhammadiyah.¹⁹²

NU dalam menentukan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah pada masa Orde Baru didasarkan pada sistem rukyat sedangkan hisab sebagai pendukung. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi¹⁹³ dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Ibn Hajr dalam kitabnya *Hawasiyy Tuhfah Muhtaj*, dan Syekh Ramli dengan kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*. Penetapan

¹⁹¹ Wawancara dengan Budi santoso (59), anggota DPR periode 1998-2007 dan anggota Muhammadiyah di Sragen. Pada 18 Juli 2020 di Ngepringan, Sragen

¹⁹² Susiknan Azhari. "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat". Jurnal Al-Jami'Ah, Vol. 44, No.2, 2006, hlm. 454

¹⁹³ Imam Nawawi adalah salah satu ulama besar madzhab Syafi'iyang berasal dari Damaskus.

ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹⁴

Memperhatikan keutuhan pengaruhnya di masyarakat, sekelompok elit agama berani mengeluarkan fatwa yang dikagumi dan diikuti para pengikutnya. Hal ini menunjukkan karena elit agama adalah sosok tokoh yang populer dengan sebutan kyai. Biasanya kyai digolongkan menjadi beberapa kelompok seperti kyai keummatan dan kyai pemerintahan. Kyai keummatan biasanya berada didesa-desa dan berkecimpung di dunia pendidikan atau pesantren, sedangkan kyai pemerintahan bertugas di lembaga pengadilan. Kehadiran kelompok elite agama memiliki status dan fungsi yang cukup penting di masyarakat karena kehadirannya memiliki pengaruh dalam siklus kehidupan manusia dalam suatu masyarakat.¹⁹⁵

Kehadiran Kyai tersebut juga berpengaruh dalam hal menentukan waktu Idul Fitri dan menanggapi terjadinya perbedaan didalamnya. Perbedaan metode penentuan hari raya Idul Fitri dikarenakan adanya kelompok yang hanya mendasarkan pada rukyat dan mengabaikan pada perhitungan hisab. Pelaksanaan rukyat itu sendiri merupakan hasil hisab dan yang menjadi masalah apabila secara hitungan tidak bisa dirukyat, tetapi ada yang bisa dilihat.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Miftahul Ulum. *op.cit*, hlm. 8

¹⁹⁵ Mochammad Toha. '*Elite Agama Dalam Masyarakat Jawa (Kajian Pengembangan Materi Diklat Kader Mubaligh)*'.(BdkSurabaya-Kemenag.id, 2010). Diakses pada tanggal 30 sep 2020 pukul 09.32

¹⁹⁶ fud Oki, lut, mus. '*Menyatukan Pandangan Mengurangi Perbedaan*'.(Suara Muhammadiyah: No. 22 Th Ke 81, 1996). hlm. 18

Rukyat itu ada dua macam yakni *rukyyat sodiqiyah* (yang benar) dan *rukyyat kadzibiyah* (palsu). Mata orang satu dengan yang lain tidak sama yakni ada yang tajam dan ada yang tidak, sehingga terkadang mata orang bisa tertipu oleh ketidaktajaman matanya sendiri.¹⁹⁷ Bagi K.H Abdul Rozaq pimpinan PP Al Muayyat, rukyat dengan mata kepala secara langsung adalah mutlak adanya. Sebelum melakukan rukyat itu dilakukan hisab terlebih dahulu. Hitungan itu hanya untuk perkiraan ke arah mana dan jam berapa kita melihat. Hisab itu sebagai alat atau perantara untuk membuktikan kebenarannya. Sebenarnya hisab dan rukyat itu tidak terjadi masalah. Keduanya bisa dipadukan dan saling melengkapi. Hisab sendiri merupakan hasil rukyat yang sudah ribuan tahun dan sudah ada perbaikan. Orang yang melakukan hisab juga tidak lepas dari rukyat.¹⁹⁸

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan qamariyah. Pada masa Orde Baru berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Muhammadiyah, bagi K.H. Abdul Khaliq dari Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, sudah cukup lama di beberapa pesantren dikembangkan ilmu falaq. Hal ini berbeda dengan perguruan Muhammadiyah yang tidak banyak mengajarkan ilmu falaq di beberapa sekolah. Munculnya pelajaran ilmu falaq di pesantren, maka rukyah nantinya akan lebih *ihhtiyat* (kehati-hatian) daripada sebagai rujukan utama. Sejak awal telah ada perbedaan dasar antara rukyah dan hisab. Dua hal itu hanya akan bisa disatukan

¹⁹⁷ Muttaqie. *op.cit*, hlm. 15

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 16

hanya dalam arti “setuju dalam perbedaan”. Bahwa kita semua bercita-cita adanya kalender umat Islam satu, tidak perlu muncul sikap agar apa yang dipedomani harus diikuti yang lain.¹⁹⁹

Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) disebutkan :”*as-saumu wa alfithru bi ar-ru’yah wa la mani’a bi al-hisab*” (berpuasa dan Id Fitrah itu dengan ru’yah dan tidak berhalangan dengan hisab), secara implisit Muhammadiyah mengakui hisab dan rukyat.

Pada awalnya Muhammadiyah menggunakan *ru’yah bil fi’li* dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah juga memakai rukyat jika antara hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang berbunyi:

”apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu, manakah yang *mu’tabar*. Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyalah yang *mu’tabar*”.²⁰⁰

Sumber perbedaan itu berasal dari perbedaan dalam cara menentukan penetapan dalam melihat hilal lewat rukyat. Rukyat itu apakah harus dengan cara *ruk yat bil ‘aini* (ruk yat dengan mata kepala secara langsung) atau *ruk yat bil ‘ilmi* (dengan hitungan hisab).²⁰¹

Disinilah letak perbedaan yang terus berkelanjutan itu, bagi mereka yang

¹⁹⁹ IW. *op.cit*, hlm. 15

²⁰⁰ Miftahul Ulum. *op.cit*, hlm. 12

²⁰¹ Muttaqie. *op.cit*, hlm. 14

mendasarkan diri pada hitungan-hitungan hisab, maka rukyat dirasa kurang diperlukan. Apalagi kondisi alam sudah begitu sulit untuk melakukan rukyat. Akibat dari banyaknya partikel di angkasa sehingga sering menimbulkan terjadinya sesatan cahaya. Akibatnya bisa saja terjadi yang dikira sinar ufuk itu ternyata hanyalah bias sinar lampu kota.²⁰²

2. Aspek Keyakinan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas memiliki keteguhan dalam prinsip dan sifat *ijtihadiyyah*²⁰³ dalam penentuan awal bulan qamariah karena adanya perbedaan interpretasi dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab-rukyah sehingga sifat *ijtihadiyyah* dalam penentuan awal bulan qamariah tersebut erat kaitannya dengan aspek keyakinan keagamaan yaitu keyakinan dalam masuknya waktu perintah ibadah.²⁰⁴

Prinsip keyakinan dalam beragama menjadi tolok keteguhan Muhammadiyah dalam memegang prinsip *wujud al-hilal* dalam penentuan awal bulan qamariah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa apabila hilāl sudah di atas ufuk dan telah terjadi *ijtima'* maka awal keesokan harinya adalah awal bulan baru. Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *hisab hakiki* dengan kriteria *wujudal-hilal*. Prinsip hisab yang

²⁰² *Ibid*, hlm. 15

²⁰³ Masalah *ijtihadiyyah* adalah masalah yang dibebankan kepada ahli Ijtihād, yang tidak lain adalah pada Ulama. Usaha sungguh-sungguh dari ulamā tersebut dengan menggunakan akal mereka untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara qath'i atau pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

²⁰⁴ Zakariyah. *op.cit*, hlm. 86

diyakini Muhammadiyah pada intinya adalah penentuan awal bulan tidak dikaitkan dengan penampakan murni suatu kriteria geometris yakni berdasarkan posisi-posisi benda langit, semisal terbenamnya Matahari, Bulan, dan sebagainya.²⁰⁵

Penentuan awal bulan qamariah menurut Muhammadiyah pada awalnya menggunakan empat cara, yaitu rukyah, persaksian orang adil, *istikmal*, dan hisab. Hal ini dapat dilihat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) sebagai berikut:

“Apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan (1) dengan melihat hilal; (2) atau persaksian orang yang adil; (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya’ban tiga puluh hari apabila berawan; (4) atau dengan hisab, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah SWT belaka.”²⁰⁶

Gambar 4.4 Kalender Hijriyah tahun 1996

| BULAN QAMARIYAH | HARI | ITIMAH' TANGGAL | JAM WIB | GHURUB WIB | TGL. SATU HARI TANGGAL | UMUR BULAN |
|--------------------|--------|--------------------|---------|---------------|---------------------------|---------------|
| Ramadhan 1416 | Sabtu | 20 Jan 1996 | 19.51 | 18.07 | Senin 22 Jan 1996 | 29 hari |
| Sya'wal 1416 | Senin | 19 Feb 1996 | 06.31 | 18.05 | Selasa 20 Feb 1996 | 29 hari |
| Dzulqadah 1416 | Selasa | 19 Mar 1996 | 17.46 | 17.52 | Rabu 20 Mar 1996 | 30 hari |
| Dzulhijjah 1416 | Kamis | 18 Apr 1996 | 05.50 | 17.38 | Jum'at 19 Apr 1996 | 30 hari |
| Muharram 1417 | Jum'at | 17 Mei 1996 | 18.47 | 17.30 | Ahad 19 Mei 1996 | 29 hari |
| Shafar 1417 | Ahad | 16 Jun 1996 | 08.37 | 17.32 | Senin 17 Jun 1996 | 30 hari |
| Rb. Awwal 1417 | Senin | 15 Jul 1996 | 23.16 | 17.39 | Rabu 17 Jul 1996 | 29 hari |
| Rb. Akhir 1417 | Rabu | 14 Agu 1996 | 14.35 | 17.41 | Kamis 15 Agu 1996 | 30 hari |
| Jmd. Ula 1417 | Jum'at | 13 Sep 1996 | 06.08 | 17.39 | Sabtu 14 Sep 1996 | 30 hari |
| Jmd. Tsani 1417 | Sabtu | 12 Okt 1996 | 21.15 | 17.35 | Senin 14 Okt 1996 | 29 hari |
| Rajab 1417 | Senin | 11 Nov 1996 | 11.17 | 17.39 | Selasa 12 Nov 1996 | 30 hari |
| Sya'ban 1417 | Selasa | 10 Des 1996 | 23.57 | 17.52 | Kamis 12 Des 1996 | 29 hari |
| Ramadhan 1417 | Kamis | 09 Jan 1997 | 11.27 | 18.04 | Jum'at 10 Jan 1997 | 30 hari |
| Sya'wal 1417 | Jum'at | 07 Feb 1997 | 22.07 | 18.08 | Ahad 09 Feb 1997 | 29 hari |
| Dzulqadah 1417 | Ahad | 09 Mar 1997 | 08.16 | 17.58 | Senin 10 Mar 1997 | 30 hari |
| Dzulhijjah 1417 | Senin | 07 Apr 1997 | 03.48 | 17.44 | Rabu 09 Apr 1997 | 29 hari |
| Muharram 1418 | Rabu | 07 Mei 1997 | 18.03 | 17.32 | Kamis 08 Mei 1997 | 29 hari |
| Shafar 1418 | Kamis | 05 Jun 1997 | 14.05 | 17.30 | Jum'at 06 Jun 1997 | 30 hari |
| Rb. Awwal 1418 | Sabtu | 05 Jul 1997 | 01.41 | 17.36 | Ahad 06 Jul 1997 | 29 hari |
| Rb. Akhir 1418 | Ahr. 1 | 03 Agu 1997 | 15.15 | 17.41 | Senin 04 Agu 1997 | 30 hari |
| Jmd. Ula 1418 | Selasa | 02 Sep 1997 | 06.53 | 17.40 | Rabu 03 Sep 1997 | 30 hari |
| Jmd. Tsani 1418 | Rabu | 01 Okt 1997 | 23.53 | 17.36 | Jum'at 03 Okt 1997 | 29 hari |
| Rajab 1418 | Jum'at | 31 Okt 1997 | 17.02 | 17.37 | Sabtu 01 Nov 1997 | 30 hari |
| Sya'ban 1418 | Ahad | 30 Nov 1997 | 09.15 | 17.44 | Senin 01 Des 1997 | 30 hari |
| Ramadhan 1418 | Senin | 29 Des 1997 | 23.58 | 17.59 | Rabu 31 Des 1997 | 30 hari |

Kelompok ahli hisab lain menambahkan kriteria lain yaitu pada saat *ghurub* Matahari, bulan harus sudah *wujud* di atas ufuk. Berikut ini disajikan tabel yang memuat ketentuan tanggal satu bulan baru Qamariyah yang didasarkan pada kriteria yang kedua ini, untuk lokasi Yogyakarta.

Kelompok ahli hisab lain menambahkan kriteria lain yaitu pada saat *ghurub* Matahari, bulan harus sudah *wujud* di atas ufuk. Berikut ini disajikan tabel yang memuat ketentuan tanggal satu bulan baru Qamariyah yang didasarkan pada kriteria yang kedua ini, untuk lokasi Yogyakarta.

Sumber : Koran Suara Muhammadiyah²⁰⁷

²⁰⁵ Masyfuk Harismawan, ‘Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah’. (Semarang: UIN Walisongo, 2019). hlm. 94

²⁰⁶ Zakariyah. *op.cit*, hlm. 58

²⁰⁷ Muttaqie. *op.cit*, hlm. 20

Muhammadiyah menegaskan bahwa di dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan melalui Majelis Tarjih pada tahun 1969, menggunakan hisab *wujud al-hilal* yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam matahari dan bulan pada saat yang bersamaan, jika tempat-tempat hilal tersebut dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Garis inilah yang kemudian disebut garis batas *wujud al-hilal*. Pentingnya penentuan posisi matahari dengan ilmu hisab karena untuk ibadah salat bagi umat Islam selalu menggunakan posisi matahari sebagai patokannya. Hal itu penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat orang mulai berpuasa, awal bulan Syawal saat orang mengakhiri puasa dan merayakan Idul Fitri serta awal Dzulhijjah saat orang akan wukuf haji di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).²⁰⁸

Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai menggunakan hisab yang pada awalnya dipelopori oleh KH. Siraj Dahlan. Metode hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah pada awalnya menggunakan sistem *ijtima' qablal ghurub*, yaitu ketika hari itu terjadi *ijtima'* (bulan mati), maka waktu sesudah terbenamnya matahari adalah awal bulan meskipun hilal tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Paham ini digunakan hingga tahun 1387 Hijriyyah.²⁰⁹

²⁰⁸ Ahmad Izzuddin. *op.cit*, hlm. 13

²⁰⁹ Syaugi Mubarak Seff. "*Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*". (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). hlm. 58

Muhammadiyah dalam menggunakan dalil, mereka menggunakan dalil epistemologi-normatif untuk menggunakan metode hisab. Menentukan hilal sangat jelas dan kuat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 5 dan Surah Ar-Rahman (55) ayat 5.²¹⁰

3. Aspek Keyakinan Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Penentuan awal Ramadhan dan Syawal jika disebutkan *rukyat bil fi'il*, maka NU mengikuti pemerintah, jika berdasarkan hisab, maka NU tidak mengikuti pemerintah. Ini sesuai dengan surat edaran dari PBNU dalam menentukan hari Raya itu selalu dicantumkan nama orang yang melihat bulan, umur, alamat, sudah mengucapkan syahadat, melihat pada jam sekian, ketinggian hilal, lama sekian menit, lokasi melihat, dan saksi.²¹¹

Dalam hal ini NU tetap menuntut bahwa rukyat harus dilaksanakan, karena rukyat itu suatu kewajiban ibadah, maka apabila disuatu daerah tidak ada yang merukyat, maka semuanya berdosa karena meninggalkan *fardlu kifayah*. Hitungan hisab juga bisa diketahui benar tidaknya setelah rukyat. Perdebatan ini rupanya akan terus berlangsung di Indonesia, karena masing-masing aliran punya pandangan sendiri, maka diperlukan

²¹⁰ Ali Romadhoni. "*Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah Dan NU)*". (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). hlm. 5

²¹¹ Muttaqie. *op.cit*, hlm. 15

kebijaksanaan masing-masing pimpinan ormas Islam agar tidak terjadi pertentangan diantara masyarakat.²¹²

Terkait dengan isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariah, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan rukyah dan tidak diperbolehkan mendasarkan keputusan penetapan awal bulan hanya berdasarkan hisab. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 *Rabi'ul Awal* 1404 H/21 Oktober 1983 M menetapkan bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *bial- ru'yah au itmami al-adadi salasina yauman*”.²¹³

Bagi ormas NU, metode rukyat merupakan metode yang sangat tepat apalagi jika digabungkan dan didukung dengan peralatan yang cukup canggih seperti halnya dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih, misalnya; teleskop yang dilengkapi CCD Imaging. Dalil mengenai rukyat dalam hadist Nabi cukup banyak dibandingkan dalil hisab. Hadist-hadist tersebut, seringkali dijadikan dalil dalam memahami pentingnya metode rukyat di dalam menentukan tanggal pertama bulan qamariah.²¹⁴

Tegasnya, rukyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan. Penggunaan metode rukyat yang dilakukan NU bukan tanpa proses panjang. Proses tersebut dimulai sejak

²¹² *Ibid*, hlm. 14

²¹³ Ahmad Izzuddin. *op.cit*, hlm. 107

²¹⁴ Ali Romadhoni. *op.cit*, hlm. 4

adanya Mukhtar NU di Surabaya pada tanggal 8-13 September 1954 dan berlanjut pada muktamar Situbondo pada tahun 1984 yang pada akhirnya memutuskan bahwa kaitannya dengan persoalan kalender Hijriah, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, NU mendasarkan pada *rukyatul hilal* dan *istikmal*. Rukyat dijadikan sebagai komponen untuk mengintegrasikan pergerakan bulan dan matahari dengan hasil hitungan yang didasarkan metode hisab, sehingga ketika periode pra 1998, NU hanya menggunakan rukyat semata kemudian pasca 1998 NU mulai menggunakan hisab sebagai pendamping rukyat.²¹⁵ NU juga menetapkan bahwa penetapan awal bulan qamariah yang berlaku untuk segenap kaum muslimin di Indonesia adalah berdasarkan keputusan pemerintah yang menggunakan pedoman rukyah.²¹⁶

Sampai saat ini belum ada kriteria penentuan awal bulan qamariah yang disepakati. Dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan yaitu, kriteria *wujud al-hilal*, *istikmal* yang didukung dengan *imkam ar-rukyah*, dan kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia).

²¹⁵ Ahmad Adib Rofiuddin. “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia”. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2019, hlm. 243

²¹⁶ Anik Zakariyah. *op.cit*, hlm. 44

D. Pandangan NU dan Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri

1. Pandangan NU

Pada masa Orde Baru pandangan NU dalam menentukan hari raya Idul Fitri hampir selalu berbeda dengan pemerintah, dan tetap konsisten dengan metode yang mereka gunakan. NU harus melalui sanad yang jelas atau melalui pendekatan mazhab agar diperoleh kepastian hukum karena kaitannya dengan persoalan penetapan awal Ramadhan dan Syawal (Hari Raya Idul Fitri), NU mendasarkan pada *rukyatulhilal*.²¹⁷ Hasil rukyat disuatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengistbatkan hasil rukyat tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan *rukyat fi wilayati hukmi* sebagaimana pemikiran yang selama ini dipegang oleh NU secara institusi.

Pada awalnya, NU memandang kebijakan pemerintah Orde Baru tidak sesuai dengan metode yang digunakan oleh NU, sehingga ketika pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri, tidak sepenuhnya disepakati oleh NU karena metode yang digunakan NU adalah rukyat sedangkan yang digunakan pemerintah adalah hisab. Hal tersebut menghasilkan perbedaan waktu Idul Fitri, sehingga pemerintah membuat langkah yang cukup represif atau menekan kepada pihak yang tidak patuh dengan kebijakannya, sehingga NU mulai mematuhi kebijakan tersebut meskipun dengan metode yang berbeda.

²¹⁷ Eva Rusdiana Dewi. *op.cit*, hlm. 122

Hal ini dikarenakan menurut pandangan NU rukyat adalah dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang didasarkan atas pemahaman, bahwa *nash-nash* tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, alHakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).²¹⁸

Pihak yang menjadi saksi dalam melihat rukyat dan menghitung hisab harus memberi penilaian yang adil. Perbedaan permasalahan hasil perhitungan hisab dan rukyat ini terjadi pada tahun 1992, 1993 dan 1994 karena ditolaknya laporan Rukyat karena masih di bawah ufuk. Melihat pandangan NU terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan awal Idul Fitri menunjukkan bahwa hubungan NU dengan pemerintah Orde baru saat itu tidak loyal. Bisa dikatakan era Orde Baru pemerintahan Soeharto, NU mengalami kondisi yang tidak mudah seperti mengalami diskriminasi golongan, dan sering berseberangan dengan pemerintah termasuk dalam hal penggunaan metode penetapan awal bulan qamariyah.

²¹⁸ Miftahul Ulum. *op.cit*, hlm. 9

Pada masa Orde Baru memang sering terjadi perselisihan antara pemerintah dengan NU, namun sebelum berakhirnya Orde Baru yakni pada tahun 1998 pemerintah kemudian berusaha untuk merangkul NU setelah terjadi masalah dengan Amin Rais ketua PP Muhammadiyah pada saat itu, sehingga pada tahun 1998 pemerintah sempat berbeda pendapat dengan Muhammadiyah dan sependapat dengan NU.²¹⁹

2. Pandangan Muhammadiyah

Pada masa Orde Baru Muhammadiyah biasanya sering sependapat dengan pemerintah yakni menggunakan metode hisab dalam penentuan waktu Idul Fitri, sehingga Muhammadiyah tidak keberatan ketika mengikuti hasil penetapan dari pemerintah. Kementerian Agama tetap menggunakan hisab namun mereka juga tidak melarang lembaga-lembaga yang lain menggunakan metode yang berbeda karena pada dasarnya dengan menggunakan hisab maupun rukyah, perbedaan dari keduanya hanya memiliki selisih nol koma sekian derajat saja.

Berdasarkan pandangan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan menyeragamkan waktu Idul Fitri justru sangat disetujui oleh Muhammadiyah, karena selain pemerintah menggunakan metode hisab yang sama dengan yang dipakai oleh Muhammadiyah, diseragamkannya waktu Idul Fitri membuat masyarakat

²¹⁹ Ahmad Izzuddin. *op.cit*, hlm. 14

bisa lebih bergembira merayakan Idul Fitri tanpa adanya perselisihan antara golongan satu dengan yang lainnya.²²⁰

Didukung dengan keputusan pemerintah Orde baru yang sedikit mengikat terhadap umat Islam termasuk dalam melaksanakan ibadah terutama dalam hal penentuan hari Raya Idul Fitri, maka hampir semua organisasi Islam di Indonesia, masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya selalu menunggu keputusan dari pemerintah dan tidak ada yang berani untuk memprotes hal tersebut. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengurangi rasa gembira di masyarakat, mereka tetap merayakan Idul Fitri dengan meriah sehingga tidak ada perselisihan diantara mereka.

Tanpa adanya peran dari pemerintah yang telah membuat kebijakan sedemikian rupa, penetapan hari raya Idul Fitri akan berlangsung secara berbeda-beda. Hal itu dikarenakan kebijakan pemerintah yang dibuat mengikat membuat segolongan ormas Islam yang berbeda pendapat dengan pemerintah menjadi patuh. Tegasnya, pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengatur urusan keagamaan mengenai pelaksanaan ibadah hari raya Idul Fitri agar bisa dilakukan dengan serentak.

Sampai saat ini, penetapan hari raya Idul Fitri bisa dilakukan dengan serentak meskipun terkadang ada beberapa kali berbeda. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak setegas ketika Orde Baru, sehingga mereka yang memiliki pendapat yang berbeda ketika menentukan awal bulan

²²⁰ Farid Ruskanda. *"100 Masalah Hisab Dan Rukyat Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi"*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm. 3

qamariyah pemerintah tetap menghargai perbedaan tersebut dan tidak menjadikannya masalah yang besar.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pandangan NU mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri adalah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena kebijakan pemerintah pada saat itu bersifat mengikat dan berbahaya bagi kedudukan politik NU apabila tidak mengikuti keputusan dari pemerintah, maka ketika terjadi keputusan yang berbeda dengan pemerintah Orde Baru, NU tetap harus mengikuti keputusan tersebut untuk menjaga kelayakan terhadap pemerintah. Hal itu tidak selamanya membuat NU taat kepada pemerintah Orde Baru, karena pada saat didirikannya BHR atau Badan Hisab dan Rukyat, NU mulai berani untuk berbeda pendapat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha karena pemerintah menggunakan metode berdasarkan hisab, menurut Nahdlatul Ulama hal itu menyalahi aturan syariat, karena hal tersebut tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw dan hal tersebut juga telah menyalahi tuntunan hadits Rasulullah Saw. Apabila dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha pemerintah lebih mengutamakan hisab dan mengabaikan rukyat, maka Nahdlatul Ulama boleh tidak mengikuti keputusan Pemerintah. Sebab menurut *Jumhurus*

Salaf bahwa pembuktian awal Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha itu dengan rukyat atau dengan menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. Hisab dalam kalangan Nahdlatul Ulama adalah sebatas prediktif. Kesahihan dari hisab perlu diuji dengan melakukan rukyatulhilal. Sedangkan kriteria *rukkyatulhilal* dapat dinilai benar apabila bersifat *zhuhuru al-hilāl* (hilal itu benar-benar nampak), tidak dalam fiktif.

2. Pandangan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri adalah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena ketika itu pemerintah Orde Baru lebih memihak kepada Muhammadiyah daripada NU, maka dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah juga mengikuti metode hisab yang digunakan Muhammadiyah, sehingga dalam penetapannya Muhammadiyah selalu mengikuti pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminudin. 1999. *“Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyari, Suaidi. 2009. *“Nalar Politik NU & Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris”*. Yogyakarta: LkiS.
- Azhari, Susiknan. 2005. *“Ensiklopedi Hisab Rukyat”*. yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azra, Azyumardi. 1998. *“Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik”*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM.
- Bruinessen, Martin van. 2008. *“NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru”*. Yogyakarta: LkiS.
- Chaplin, J.P. 1989. *“Kamus Lengkap Psikologi. Terj. Kartono Dan Kartini”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *“Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama”*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP.
- Fajri, Ahmad. 2014. *“Ulama Dan Politik (Analisis Fatwa Dan Peran Politik Majelis Ulama (MUI) Era Reformasi”*. Tangerang: PT Pustaka Indonesia Perumahan Mutiara Elok.
- Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. *“Masalah Dan Prospek Demokrasi Di Indonesia”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Fealy, Greg. 2003. *"Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967"*. Yogyakarta: LkiS.
- Irsyam, Mahrus. 1984. *"Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis"*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Iskandar, Muhammad dkk, 2014. *"Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 3"* Jakarta: direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat jenderal Kebudayaan, Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Izzudin, Ahmad. 2007. *"Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha"*. Jakarta: Erlangga.
- Kuntowijoyo. 1995. *"Pengantar Ilmu Sejarah"*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Labolo, Teguh Ilham Muhadam. 2015. *"Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maliki, Betty. R. 1995. *"Kajian Sosiologi Agama"*. Yogyakarta: PT TIARA WACANA.
- Maliki, Zainuddin. 2018. *"Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ruskanda, Farid. 1996. *"100 Masalah Hisab Dan Rukyat Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saksono, Tono. 2007. *"Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab"*. Jakarta: Amytas Publicita.

- Seff , Syaugi Mubarak. 2014. "*Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Taufiq, H. 2004. "*Mekanisme Penelitian Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*" (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Zamharir, Muhammad Hari. 2004. "*Agama Dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Abdillah, Masykuri. 2013. '*Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi*'. Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. II.
- Abdul kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluwuluwa, 2005. "*Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*". Jurnal Jlimbar, Volume XXI Nomor 2.
- Ardhian, David, dkk. 1997. "*Peran Dan Strastegi Organisasi Politik Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup Ngo's Roles And Strategies In The Environmental Politic Arena*". Jurnal Sosiologi Institut Pertanian Bogor Vol. 4 No. 3.
- Azhari, Susiknan. 2006. "*Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat*". Jurnal Al-Jami'Ah, Vol. 44, No.2.

- Azra, Azyumardi. 2014. '*Studia Islamika*'. Indonesian Journal For Islamic Studies, Vol. 21 No 3.
- Basyir, Kunawi. 2016. '*Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia*'. Jurnal Al-Tahrir, Vol.16 No.2.
- Dahlan, Moh. 2014. '*Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia*', Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor. 01.
- Dahlan, Zaini. 2018. "*Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)*". Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. No. 01 Januari –Juni'.
- Darajat, Zakiya. 2017. '*Muhammadiyah Dan NU: Penjaga Moderatisme Islam Di Indonesia*'. Jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.1 No.1.
- Effendi, M. Rahmat. 2003. "*Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru)*". Jurnal Mimbar, Volume XIX.
- Farih, Amin. 2016. '*Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)*'. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.24 No.2.
- Hamzah, Muhammad Maulana. 2018. '*Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia*'. Jurnal Studi Agama Vol. 1 No.1.

- Haris, Munawir. 2015. '*Partisipasi Politik NU Dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah*'. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 15 No.2.
- Hefni, Wildani. 2019. "*Ideological Political Contestation in the Discourse of Hisab Rukyat in Indonesia*". Jurnal Penelitian, Vol. 16 No. 01.
- Humaidi, Zuhri. 2010. '*Islam Dan Pancasila : Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal*'. Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No.2
- Jurdi, Syarifuddin. 2011. "*Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia Tahun 1966-2006*". Jurnal Tajdida, Vol. 9 No. 1.
- Mundlir, Abdul. 2014. '*Peran Politik NU Tahun 1952-1955*'. Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No.3.
- Putra, Okrisal Eka. 2008. '*Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru*'. Jurnal Dakwah, Vol. IX No. II.
- Qulub, Siti Tatmainul. 2015. "*Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*". Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 01.
- Renhoard, John Musa. 2019. '*Politik Identitas Era Orde Baru Di Indonesia Memasuki Era Reformasi*'. Jurnal Societas Dei, Vol. 06 No.1.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. 2019. "*Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia*". Istimbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam.
- Rohmah, Nihayatur. 2019. "*Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Itsbat Pemerintah Dan Ikhbar Ormas Islam*". Jurnal An-Nuha, Vol. 6 No. 02.

- Ruslan, Faryda. 2019 . '*Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang-Undangannya*'. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 10 No. 2.
- Sado, Arino Bemi. 2014. "*Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah*". Jurnal Hukum Islam Iain Mataram, Vol.13, No. 1.
- Saepudin, Juju. 2016. "*Revitalisasi Peran ICMI Pada Era Reformasi*". Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15 No. 3.
- Sakirman. 2017. "*Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia*", Jurnal El Falaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 01. No. 01.
- Shobacha, Nurul. 2012. '*Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru*'. Jurnal Review Politik, Vol. 02 No. 01.
- Sholikin, Ahmad. 2020. '*Dinamika Hubungan Muhammadiyah Dan Partai Politik Di Indonesia*'. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, Vol.5 No.2.
- Siregar, Insan Fahmi. 2013. '*Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960*'. Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol.14 No.1.
- Tahir, M. 2012. '*Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*'. Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, Vol.XV, No. I.
- Ulum, Miftahul. 2015. "*Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat*". Jurnal Syaikhuna, Vol. 10 No. 1.

Majalah dan Koran

Amsar, Nurhasan. 1993. '*Perbedaan Terbitnya Bulan Dan Hubungannya Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal*'. Harian Pikiran Rakyat.

Anonim. 1996. '*Islam Semakin Berperan*'. Suara Muhammadiyah: No. 23 Th Ke 81 Desember.

Anonim, 1978. '*Silaturahmi Dua Tetangga Ketika Hari Raya Idul Fitri*'. Berita Nasional Harian Umum: 7 September.

Anonim, 1983. '*Suasana Menjelang Idul Fitri*'. Majalah Adil: Edisi Idul Fitri Juli.

Anonim. 1953. "*Suka-Duka Di Hari Lebaran*". Majalah Suara 'Aisjijah: Edisi Juni 1953/Syawal 1372. hlm. 10

Anonim. 1979. '*Gema Lebaran Idul Fitri I 399*'. Majalah Suara Muhammadiyah: No. 17. th. 59 Setember I .

AR. 1993. '*Jangan Diperuncing Perbedaan Idul Fitri*'. Harian Pikiran Rakyat

fud Oki, lut, mus. 1996. '*Menyatukan Pandangan Mengurangi Perbedaan*'. Suara Muhammadiyah: No. 22 Th Ke 81.

IW. 1996. '*Setuju Dalam Perbedaan*'. Suara Muhammadiyah: No. 22 Thn Ke 81.

Muttaqie, Okkie. 1996. '*Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi*'. Suara Muhammadiyah: No. 21 Th Ke 81.

Nashir, Haedar. 2010. '*Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*'. Suara Muhammadiyah.

Rusjdi. 1985. '*Muktamar Muhammadiyah Ke 41 Menerima Asas Tunggal*'. Panji Masyarakat No. 463.

Skripsi

- Amanatussolichah, Dessy. 2016. "*Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah*". Semarang: UIN Walisongo
- Andriawan, Novi. 2007. '*Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus Parmusi Tahun 1967-1971*'. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah.
- Arafik, Muhammad. 2019. "*Peranan Muhammadiyah Dalam Pembinaan Islam Di Kabupaten Enrekang Pada Masa Orde Baru (1965-1997)*". Makassar: UIN Allauddin Makassar.
- Dewi, Eva Rusdiana. 2017. '*Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha*'. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Fauziah, Asmaul. 2019. '*Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989*'. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Fitra, Tasnim Rahman. 2017. '*Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016*'. Semarang: UIN Walisongo.
- Ghozali, M Hafidz. 2008. '*Hubungan Agama Dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun*'. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Harismawan, Masyfuk. 2019. *‘Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah’*. Semarang: UIN Walisongo.
- Himayatika, R. 2016. *‘Perbedaan Dan Persamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Syawal 1992, 1993, 1994 Dan Awal Dzulhijjah 2000 Antara Nahdlatul Ulama Dengan Pemerintah’*. Semarang: UIN Walisongo.
- Imam, Muntaha. 2017. *"Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Masa Orde Baru Tahun 1975-1998"*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Iwantoro, Fajar. 2014. *‘Dinamika Politik Muhammadiyah Pada Masasukarno Sampai Masa Soehartopada Tahun 1945-1998’*. Jember: Universitas Jember.
- Jaya, Misar Sulaeman. 2004. *“Hubungan Ulama Dan Negara Studi Atas Perilaku Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Khoiri, Mohammad. *“Peran ICMI Dalam Perkembangan Politik Islam Indonesia(Analisis Tahun 1990-2000)”*. Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mauliddina, Nisa’ul. 2018. *‘Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Icni) Orwil Jawa Timur Tahun 1991-2015’*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Miftahuddin Dkk. 2012. *‘Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)’*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Naufal, Muhammad Fauzan. 2017. *‘Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)’*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Permatasari, Dinda Nur. 2018. *‘Pengelolaan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia Zaman Orde Baru (1970-1998)’*. Jatinangor: Universitas Padjadjaran.
- Romadhoni, Ali. 2009. *“Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammdiyah Dan NU)”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Salapuddin, Moh. 2016. *‘Menyatukan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab Dan Madzhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat’*. Semarang: UIN Walisongo
- Saputro, Alfitrahmat. 2013. *‘Motivasi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Berbelanja Pakaian , Kendaraan , Mebel dan Perhiasan Emas Menjelang Hari Raya Idul Fitri’*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Wulandari, Taat.2017. *"Sikap Organisasi Masyarakat Terhadap Politik Orde Baru Politik"*. Yogyakarta: universitas Negeri Yogyakarta.
- Yosi, Oki. 2011. *"Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi*

Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)". Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Zakariyah, Anik, 2015. *‘Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah’*. Semarang: Universitas Negeri Walisongo.

Video

Lentera Merah. *"Hari Raya Idul Fitri Di Zaman Jepang"*. Youtube, diunggah oleh RSH1945 10 Oktober 2007. Diakses pada 18 September 2020 pukul. 22.01

Website

Angelsari. 2019 . “apakah salah menggunakan hak abstain?”. Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 25 Sep. 20 pukul 11.30

Ayung Notonegoro. 2019. *‘Kala Orde Baru Meringkus Hilal Ramadhan’*. Alif.Id. Diakses pada tanggal 21 Sep. 20 pukul 17.04

EH. 2017. *“Cerita Lebaran Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan”*. Diakses dari islamindonesia.id tanggal 27 Maret 2020 pukul 12.02

Petrik Matanasi. 2020. *‘Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam’*. Tirto.Id. Diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 09.00

Publikasi BPS pada tahun 2019. Diakses di *www.bps.go.id* pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 13.51

- Toha, Mochammad. 2010. '*Elite Agama Dalam Masyarakat Jawa (Kajian Pengembangan Materi Diklat Kader Mubaligh)*'. Bdk Surabaya-Kemenag.id. Diakses pada tanggal 30 sep 2020 pukul 09.32
- Triha, Utroq. 2014. '*Upacara Seikerei*'. Ensiklo.Com. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 11.10

Wawancara

Wawancara dengan Budi santoso (59), anggota DPR periode 1998-2007 dan anggota Muhammadiyah di Sragen. Pada 18 Juli 2020 di Ngepringan, Sragen

DATA INFORMAN

| No | Nama | Umur | Alamat | Pekerjaan |
|----|-------------------|------|--|--|
| 1. | Budi Santoso | 60 | Ngepringan KarangTengah Sragen | Anggota DPRD periode 1998- 2007, aktif di PPP pada masa Orde Baru dan anggota Muhammadiyah di Sragen sampai sekarang |
| 2. | Moh. Irsyam, S.Pd | 64 | Japanan Rt. 05 Rw. 05 Baturan, Colomadu, Karanganyar | Anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al- Anshori di Colomadu sampai sekarang |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip wawancara dengan Bapak Budi Santoso (60)

Anggota DPRD periode 1998-2007, aktif di PPP pada masa Orde Baru dan anggota Muhammadiyah di Sragen sampai sekarang.

Tempat : Ngepringan KarangTengah Sragen

Waktu : Senin, 31 Agustus 2020, pukul 02.21- 03.15 WIB

| | |
|---|--|
| P | Menurut anda, bagaimana Hubungan politik Muhammadiyah dengan NU ? |
| N | Muhammadiyah pada masa Orde Baru secara organisasi tidak berpihak ke partai politik apapun. Jadi gerakan politiknya adalah politik kebangsaan bukan politik praktis. Maka selalu ikut andil dalam membangun negeri. Walaupun tidak ada partai Muhammadiyah, namun secara personal boleh ikut ke partai. Dan Muhammadiyah juga pernah andil ke partai Masyumi. Pada waktu Orde Baru secara personal banyak orang Muhammadiyah sebagai pendukung Partai Persatuan Pembangunan tapi juga banyak yang menjadi pengurus dan pendukung Partai Golkar, PDI, PAN. |
| P | Bagaimana hubungan Muhammadiyah dan NU terhadap pemerintah Orde Baru? |
| N | Sesuai dengan zamannya, adanya fluktuatif atau pasang surut. Maka ketika sudah muncul ICMI hubungan mereka dengan pemerintah semakin membaik. Namun, sebelum muncul ICMI, kepentingan gerakan Islam sedikit kurang, artinya terabaikan dan tidak di perhatikan hingga munculnya asas tunggal dan muncul pertentangan-pertentangan. Dulu diakui atau tidak umat Islam yang mayoritas pada masa Orde Bvru agak tersisih. Peran dipemerintahan sangat kurang, kemudian setelah munculnya ICMI pemerintah mulai mendekati Islam hingga muncul masjid-masjid Islam pancasila, dibuktikan seperti itu dan mulai menyebar. Kegiatan agama, adanya persamaan ijazah Aliyah dengan SMA, karena dulu itu tidak bisa disamakan. Munculnya ICMI mampu merubah konsep pendidikan seperti itu. |
| P | Siapa golongan yang pro dengan pemerintah Orde Baru? |

| | |
|---|--|
| N | Secara organisasi tidak ada. Secara organisasi banyak yang terlibat dengan pemerintah bahkan sejak jaman Soekarno sampai sekarang banyak. Yang jadi menteri pun banyak dari orang-orang Muhammadiyah. Pada masa Orde Baru yang sering terlibat dengan pemerintah adalah orang muhammadiyah dibanding NU. Dan mereka-mereka yang diangkat memang yang sudah sesuai dan memahami dalam bidangnya. Sejak jaman dulu menteri pendidikan banyak dari Muhammadiyah sedangkan Menteri Agama banyak dari NU. Tapi sikap Muhammadiyah ketika menjadi menteri ataupun tidak tetap Muhammadiyah itu konstruktif . jadi kalau ada penyimpangan ya tentunya di kritik. Tapi tidak asal mengkritik , namun juga memberi solusi. Misal ada lembaga yudisial review yang sudah diputuskan kemudian digugat oleh orang-orang Muhammadiyah. Akhirnya banyak juga yang dibatalkan, yakni UU. Padahal sudah dilaksanakan tapi kemudian dibatalkan oleh MK. |
| P | Bagaimana sikap pemerintah Orde Baru terhadap penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah masa Orde Baru? |
| N | Pada prinsipnya, MUI dan Kemenag sejak dulu hingga sekarang penyikapannya sama. Pasti ada sidang itsbat , tapi terkait dengan hukum pelaksanaannya tidak lepas dari politik juga. Maka pada masa Orde Baru hampir tidak ada perbedaan dalam menentukan waktu jatuhnya Idul Fitri. Meskipun Muhammadiyah dan NU berbeda metode tapi waktu itu keputusannya selalu muncul dengan waktu yang sama. Ini tetap ada pengaruhnya dengan politik. Artinya perjalanan politik ini, keputusan-keputusan pemerintah terkait dengan itupun pasti ada pengaruh yang besar terhadap penentuan waktu Idul Fitri. |
| P | Bagaimana proses sidang itsbat pada masa Orde Baru? |
| N | Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga Islam termasuk MUI semuanya diundang. Karena di Indonesia tidak menganut madzhab tertentu jadi semua organisasi yang diberi izin boleh melaksanakan dengan keyakinan masing-masing. Jadi ketika terjadi perbedaan, Muhammadiyah juga memaparkan hasil keputusannya dan kemenag tetap menggunakan rukyat, tetapi tidak melarang lembaga-lembaga yang mengadakan metode yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. |
| P | Apakah pernah terjadi konflik antara NU dan Muhammadiyah dalam penetapan waktu Idul Fitri? |

| | |
|---|--|
| N | <p>Sebenarnya, ditingkat atau tidak ada permasalahan. Mereka melakukan diskusi biasa. Muhammadiyah kalau akan menjelaskan tentang hisab itu juga memanggil pakar-pakar ilmu non-Muhammadiyah. Dan mereka diminta untuk menyampaikan pendapat dan itu rata-ratanya sama. Selisihnya Cuma nol koma sian, tetapi lembaga-lembaga tertentu tidak seperti Muhammadiyah, misal NU jelas memakai rukyat, walaupun hisab sama tetapi kalau rukyat belum melihat otomatis belum diputuskan.</p> |
|---|--|

Lampiran 2

Transkrip wawancara dengan Bapak Moh. Irsyam, S.Pd. (64)

Anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al-Anshori di Colomadu sampai sekarang.

Tempat : Japanan Rt. 05 Rw. 05 Baturan, Colomadu, Karanganyar

Waktu : Rabu, 7 Oktober 2020, pukul 19.30- 20.30 WIB

| | |
|---|---|
| P | Bagaimana hubungan politik antara NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru? |
| N | Di Orde Baru jaman Pak Soeharto sama-sama difikir tapi ada bedanya. Pada waktu itu, Muhammadiyah menjadi tangan kanan pemerintah, selalu difikir, selalu berkembang dengan baik. Kalau NU agak diragukan atau dianak tirikan oleh Pak Soerharto. Meskipun demikian, orang NU percaya kepada Allah SWT tetap kukuh walaupun diabaikan. Kalau Muhammadiyah dalam setiap gerakannya dibantu dan didukung sepenuhnya. |
| P | Siapa Ormas yang pro dengan pemerintah Orde baru? |
| N | Muhammadiyah dan NU sama-sama pro kepada pemerintah, tetapi NU dianaktirikan. Namun dengan kegigihannya NU mampu berjalan sampai sekarang. Kegigihan, kepribadian, dan percaya bahwa Allah swt melindungi NU di seluruh Indonesia. |
| P | Apa alasan Pemerintah Orde Baru lebih pro kepada Muhammadiyah daripada NU? |
| N | Karena gerakan-gerakan Muhammadiyah itu banyak mendukung pemerintah. dalam segi hukum muhammadiyah lebih pro kepada pemerintah. Kalau NU, agak ke hal-hal yang haram sedikit takut . bukti sekarang, nu itu endirikan misalnya BPR atau bank kecil-kecil itu sangat sedikit, berbeda dengan Muhammadiyah yang banyak mendirikan bank seerti Bina insani, Sinar mentari, BPRya kan banyak sekali |
| P | Bagaimana keterlibatan pemerintah Orde baru dengan Urusa keagamaan? |
| N | Urusan keagamaan itu kalau yang baku pasti ke ulama, tapi kalau urusan duniawi itu lebih pro kepada Muhammadiyah karena segala hal dalam |

| | |
|---|--|
| | menentukan apa-apa berdasarkan pemikiran-pemikiran pemerintah. Maka dari itu, Muhammadiyah dianak emaskan oleh Pak Soeharto, kalau NU itu tidak. Seakan-akan harta –harta milik NU itu dikuasai muhammadiyah. Contohnya, masjid-masjid mulai dikuasai pada jaman Pak Harto. |
| P | Apa posisi NU dan Muhammadiyah yang diberikan pemerintah pada masa Orde Baru? |
| N | Kalau kementrian Agama itu yang menunjuk presiden, pernah Kementrian Agama dari NU juga pernah dari Muhammadiyah. Namun secara perkembangannya kalah lebih lebih cepat, karena kehati-hatiannya. |
| P | Bagaimana proses sidang istbat ketika Orde Baru? |
| N | Ketika sidang istbat walaupun bagaimana NU tetap mengikuti pemerintah. Karena sudah ditetapkan lebih dulu maka harus manut pemerintah. Tidak cuman ditekan tapi juga diharuskan manut pemerintah. Meskipun berjalan dengan baik, tapi ketika pak Harto lengser kan berubah. Karena tradisional Nu masih digunakan, satu ketika mau puasa itu melihat hilal, orang Indonesia itu yang dari Tasik itu yang paling tua itu orang yang pertama kali mempunyai ilmu tentang falak mengenai puasa. Disana mesti setuju, kalau dulu kan gabisa, pernah kan dulu kan cekcok karena Metode yang digunakan pemerintah orde baru adalah yang dipakai Muhammadiyah yakni memakai hisab |
| P | Latar belakang diseragamkannya Idul Fitri pada masa Orde Baru? |
| N | Segala sesuatu ditangan pimpinan negara, maka semuanya harus patuh dengan pemerintah. Apabila nekat tidak patuh dengan pemerintah maka harus ada pengorbanan, seperti usahanya ditutup, tidak boleh berkembang. Kalau jamannya pak Harto kalau berani muncul bukan hanya NU saja ya kacau, akhirnya juga manut semuanya. Namun kebaikan pak Harto itu bukan untuk satu golongan saja tapi untuk semua rakyat. Tapi untuk segi politik tegas, maka untuk orang yang menentang pak Harto ya bahaya, maka banyak ulama yang diangkat pak Harto untuk biar manut, maka diangkat di pemerintahan dan disuruh bilang apa yang pemerintah katakan. |

Lampiran 3

Foto Wawancara Bersama narasumber



Bapak Moh. Irsyam, S.Pd. Anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al-Anshori di Colomadu sampai sekarang.

Lampiran 4

Majalah Adil Edisi Idul Fitri Tahun 1983 Suasana Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 1983



Suasana Menjelang Idul Fitri

Tanpa menghiraukan panas terik, penat, dan lelah sehari Puasa, pokoknya Idul Fitri harus di rumah bersama keluarga. Terutama ayah-bu, mertua, kakak-adesak dan orang tua di kampung halaman.

Perjalanan dengan bus, kereta api, kapal laut, kapal udara bukan main mudahnya mencari karcis dan tempat duduk. Keringat dan geluh senak napas mamusta terengah-engah demi kebahagiaan keluarga. Kepuasan bertemu orang tua memang suatu nikmat Tuhan yang tak ternilai.

Semua itu dengan maksud berbakti kepada orang tua. Seorang anggota keluarga bila tidak nampak wajahnya di hari suci Idul Fitri bersama keluarga merasa kurang afdol. Di masa lalu kepadatan kendaraan bukan suatu kesulitan. Penduduk dunia semakin bertambah, pada hal fasilitas kendaraan terbatas.

Tidak itu saja biaya dan tenaga terkuras habis selama Puasa. Begitu pula bila selesai mengunjungi orang tua, mereka pulang kembali ke daerah asalnya, juga memakai kendaraan.

Kesukaran itupun lega, asal perjalanan selamat, biaya berapa pun besarnya diusahakan.

Idul Fitri bukan saja menjadi rahmat bagi yang berpuasa, juga sopir taksi dan bus, cobi, sado, becak, semua mendapat rejeki nomplok.

Islam diakui atau tidak diakui oleh masyarakat di dunia ini, tetap menjadi rahmat bagi seantero alam raya ini.

Keterangan gambar :

1. Suasana menjelang Lebaran di terminal bus Pulo Gadung Jakarta.
2. Mereka menunggu di stasiun Gambir Jakarta untuk mendapatkan karcis ke daerah tujuan.
3. Menjelang Lebaran, betah-betah meluas peminat yang akan pulang mudik dengan kereta api.

ADIL 11

Lampiran 5

Suara Muhammadiyah No. 23 Th Ke 81 Desember 1996

Kalender Hijriah Tahun 1996

f a t w a a g a m a

ASUHAN BAGIAN FATWA DAN PENGEMBANGAN KEPUTUSAN TARJIH
MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM PP MUHAMMADIYAH

TENTANG KALENDER HIJRIYAH
Sambungan Edisi yang Lalu

BULAN

| QAMARIYAH | HAJI | UTAMA | JAM | WIB | GRUBER | TEL. BUKU | EMIR |
|-----------|------|-------|-----|-----|--------|-----------|------|
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kelompok ahli hitung lain menambahkan kriteria lain yaitu pada saat *ghurub* Matahari, bulan harus sudah wujud di atas ufuk. Berikut ini disajikan tabel yang memuat ketentuan tanggal satu bulan baru Qamariyah yang didasarkan pada kriteria yang kedua ini, untuk lokasi Yogyakarta.

| QAMARIYAH | HAJI | UTAMA | JAM | WIB | GRUBER | TEL. BUKU | EMIR |
|-----------|------|-------|-----|-----|--------|-----------|------|
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak setiap bulan Ramadhan umurnya 30 hari atau 29 hari, melainkan ada yang 30 hari dan ada yang 29 hari. Di samping itu umur bulan tidak selalu berselang-seling 29 hari dan 30 hari, melainkan kadang-kadang berturut-turut 29 hari atau berturut-turut 30 hari. Demikian ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah -aw- sebagaimana dapat kita lihat dalam sabda beliau yang berbunyi:

مَبْمُورُ الْوَيْتِ وَأَفْطَرُ الْوَيْتِ فَإِنْ عَمِي
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْيَانِ ثَلَاثِينَ
(متنوع عليه)

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya. Bila hilal itu tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَافْطَرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ
(رداء مسلم)

Bila kamu sekalian melihat hilal berpuasalah dan bila kamu sekalian melihat hilal berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka berpuasalah tiga puluh. (Riwayat Muslim)

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ
فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا أَلَهُ
(رداء مسلم)

Bulan itu dua puluh sembilan hari, maka apabila kamu melihat hilal berpuasalah dan apabila melihatnya berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takirlah ia. (Riwayat Muslim)

Demikianlah tanggapan kami, semoga dapat menambah kejelasan dan bermanfaat, khususnya bagi saudara penanya. ●

20 SUARA MUHAMMADIYAH • No. 24/1/1996

141

Lampiran 6

Suara Muhammadiyah No. 16 th ke 55 Agustus 1975

Terbentuknya MUI dan Diangkatnya Buya Hamka Sebagai Ketua Pertama MUI Pada Tahun 1975



Lampiran 7

Majalah Tempo, 28 April 1990 Para Pemudik Pada Tahun 1990



Lampiran 8

Majalah Adil No 15 Th 55 Mei I 1987

Hidangan Lebaran Pada Tahun 1987

Ruang Muslimat

HIDANGAN LEBARAN

Bagi orang yang berbahasa Jawa, kata Lebaran sudah tidak asing lagi, baik dalam kenyataannya maupun pengertiannya. Berbeda dengan kawan-kawan yang tidak berbahasa Jawa, sering salah memberikan arti: Lebaran dikira berasal dari kata "lebar" yang artinya luas (lebarnya sekian meter). Padahal bukan. Lebaran dari kata Jawa LEBAR yang berarti "tela" atau "selesai". Jadi arti Lebaran sebenarnya kita berpuasa di bulan Ramadhan.

Tetapi memang pada hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri ini kita diharapkan saling maaf memaafkan, saling membuka hati lebar-lebar menerima permintaan maaf satu sama lain. Nah, jadi kalau "lebaran" dianggap dari kata "lebar" dalam arti lapang, ya, benar juga rasanya. Sebab kita akan saling melebar-lebar atau melapangkan dada menerima permintaan maaf.

Baiklah, mana saja yang penting pada Hari Raya Idul Fitri yang di Jawa dikenal dengan kata "Lebaran" atau di daerah Sunda dengan kata "Boboran", kita memang hendaknya hidup dalam kelapangan (dada, kelapangan perasaan, kelapangan rezeki (maka perlu fitrah diberikan kepada yang lagi kesempatan rezeki), dan mungkin karena hari raya ini merupakan satu hari yang kita tunggu selama ini, marilah kita rayakan dengan meriah. Tidak perlu mewah atau menghamburkan uang, tetapi cukup meriah. Tidak usah serius atau terlalu "khusuk" karena memang hari ini hari gembira. Hari bersyukur.

Banyak cara yang bisa dilakukan, untuk memperoleh kegembiraan, untuk menyatakan syukur ke hadirat Allah atas nikmatnya kepada kita, setelah selesai berpuasa. Salah satu di antaranya dengan menyediakan hidangan makanan yang lezat, yang enak, yang lain dari kebiasaan kita sehari-hari. Tidak perlu mahal, tetapi yang penting "yang tidak biasa kita jumpai sehari-hari". Misalnya, kue atau lauk pauk yang khas, atau yang dianggap agak "asing" atau yang jarang kita temui, seperti tapai ketan, kacang bawang, lapis legit, rollade, sup makaroni, telur bumbu bali, kare daging, dsb. Memang, mungkin bagi seseorang/sekeluarga macam kue/lauk tersebut sih sudah biasa sehari-hari, tetapi bagi kebanyakan orang awam, barangkali tidak. Kalau memang jenis tersebut sudah biasa, ya yang lainnya yang tidak biasa ditemui sehari-hari, seperti bestik, ayam atau bebek panggang, atau lainnya lagi.

oleh:
Sri Retno Kusumawardhani
Jakarta



Jadi yang penting bukan jenisnya, mahalnyanya, atau enaknyanya tetapi "kelangkaannya" bagi kita, yang tidak selalu kita temui sehari-hari. Mungkin tidak enak, murah, seperti tapai ketan, namun kan tidak semua orang setiap hari kesemu tape ketan. Nah, mengapa tidak kita buat tape ketan pada hari raya Idul Fitri atau Lebaran ini?

Pilihlah, mana yang menurut anda memang "langka". Tidak perlu mewah, mahal, aneh-aneh, tetapi hendaknya cukup memberikan keriaan, keceriaan, kegembiraan, sebagai manifestasi syukur kita kepada Allah, sambil bersyukur. Yang sering kita jumpai, adalah ta'ar, ketupat dengan sambel goreng, opor ayam, dsb. Silakan, kalau memang dikehendaki. Atau boleh yang lainnya.

Di bawah ini kami ingin memberikan 3 macam resep masakan yang kami anggap juga tidak setiap hari kita jumpai dalam meja makan kita, yaitu (1) telur bumbu bali, (2) daging gulung atau rollade, dan (3) kare daging. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, dan kalau perlu tidak harus di hari Lebaran, di hari lain juga boleh, bukan? Nah, silakan.

TELUR BUMBU BALI

Bahan-bahan: 20 butir telur ayam atau telur burung puyuh (harus dipilih yang masih bagus)

ADIL - 29

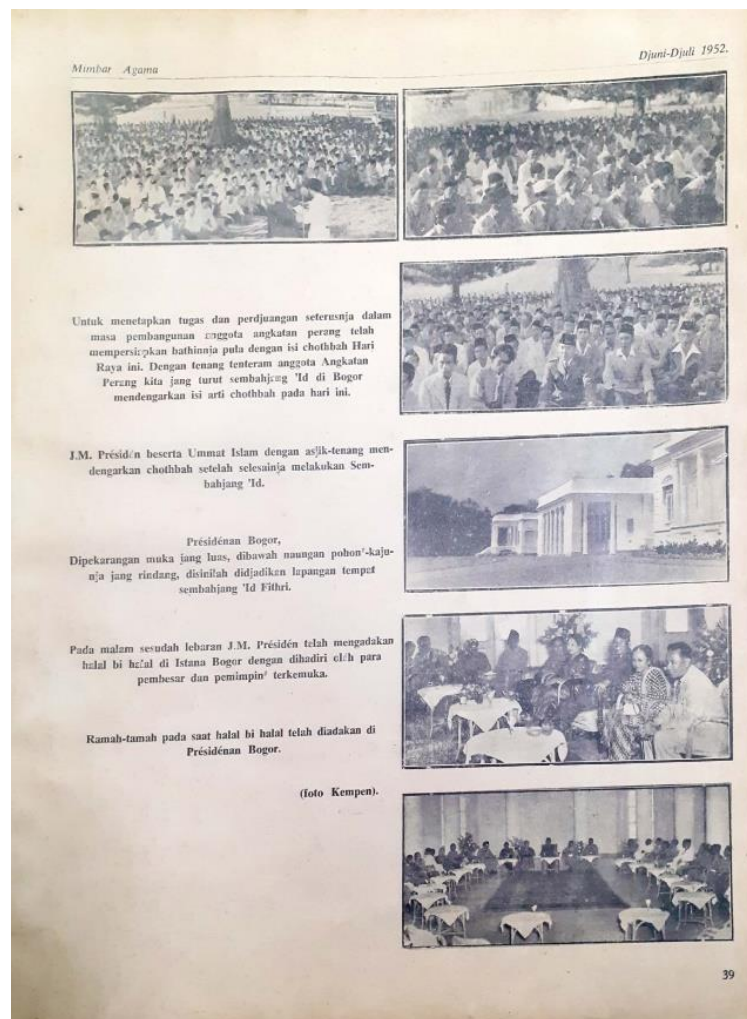
Suara Muhammadiyah No.18 Th Ke 55 Sep II 1975
Penentuan Awal Bulan Qamariyah Pada Tahun 1975
Menggunakan Metode Hisab



Lampiran 10

Mimbar Agama Mei - Juni 1953

Pelaksanaan Shalat Id Di Lapangan Serta Hala Bi Halal Di Istana Negara Pada Tahun 1953



Majalah Adil No.9,10 Th.56 Feb. I,II,1987
Keterlibatan Umat Islam Menjelang Pemilu Tahun 1987

KETERLIBATAN UMAT ISLAM DALAM PEMILU.

Bahwa yang disebut Ulu Amri ialah Ashabul Amri Ummah (Pembawa Amrat masalah-masalah kepentingan Ummah). Dalam tugas memusyawarahkan masalah-masalah tersebut mendapat petunjuk Al Qur'an yang bunyinya "wa Amru syuroo bainahum" maknanya, masalah umat yang bundak mendapatkan pemecahannya harus melalui prosedur dimusyawarahkan di antara mereka. Bermusyawarah untuk mengupayakan masalah tidak mungkin melalui perseorangan, cukup dilakukan kelompok yang mencerminkan aspirasi ummat (jama'ah atau tumassilul ummah). Keputusan Jama'ah itu dianggap telah sesuai dengan keputusan individual umat, karena sewajarnya jama'ah tersebut.

Yang jelas menurut Tafsir Al Manar, bahwa yang dimaksud Ulu Amri tersebut bukan eksekutif, dan bukan ulama Fiqhiyyah dengan spesialisasinya Ilmu Ushul Fiqh. Sebab yang dibicarakan bab "Al Amru wal Khabaru", sebagai simbol pengertian masalah umum atau dunawi umat, dan diluar masalah ibadah.

Islam mengkonsepkan Lembaga Syuro itu berinti "Ahlul Ilimi Wash Sholah". Yaitu tokoh ahli dalam ilmu pengetahuan dan mengerti jalan untuk mencapai keselamatan, artinya putra-putri terbaik dalam kemahiran memecahkan masalah umat sebagai yang dipetakan Umar Bin Khottob : "Istiyasir Ahlal Ilimi Wash Sholah" juga Hadits Nabi Muhammad saw artinya : "Bila suatu masalah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka nanikan kehaucerannya".

Tekad umat Islam menukseskan Pemilu didasari kesadaran bernegara dan bermotivasi ajaran keagamaan. Sehingga keikutsertaan umat Islam menukseskan Pemilu didasari kegiatan kekhilafahan dalam lingkup beribadah kepada Allah.

Akhirnya MUI Jawa Tengah menyerukan bahwa : umat Islam agar aktif ikut memilih, dan menjaga ukhuwwah Islam kesatuan bangsa, dan menghindarkan kebringasan, tindak kekerasan yang bisa merusak persatuan dan stabilitas nasional.

Juga MUI Jawa Tengah menghimbau kepada Pemerintah terutama semua aparat Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan semua peraturan yang berlaku tentang Pemilu secara konsekuen, jujur dan adil. Kepada ketiga peserta Pemilu agar memegang teguh moral Pancasila dan etika masyarakat timur, ahlik yang mulia dalam berkampanye. Karena sasaran Pemilu adalah berorientasi kepada program, dan program mempunyai sasaran duniawi, kehidupan, hayatan thoyyibah dan tidak menyangkut prinsip akidah, syariah dan ibadah, maka dalam berkampanye nanti hendaknya/ alangkah baiknya tidak melibatkan agama dan Al Qur'an, demi menjaga keagungan Al Qur'an, kesucian agama dan terbinanya uhuwwah Islam, dan kesatuan bangsa.

Seruan MUI Jawa Tengah ini dikemukakan dalam sidang antara para pengurus MUI se-eks Karesidenan Surakarta di gedung Balai kota madye Dati II Surakarta 10 Januari 1987.●

Serba serbi menjelang **PEMILU**

Menjelang Pemilu, banyak pejabat, tokoh masyarakat, pemimpin agama, pemilu, dsb. melakukan kegiatan yang tidak dilakukan sebelumnya, termasuk menuli, mengarang, dsb. ADIL ingin mencukinya kembali, agar diketahui secara luas. Demi Pemilu !

Kali ini diketengahkan pertemuan antara Jenderal Benny Murdani dengan Kyai Ar'ad, kyai tokoh NU. Dikutil dari harian Kompas. Red.

WASSALAMU-ALAIKUM" ucap Jenderal TNI Leonardus Benny Moerdani sembari senyum cerah, ketika memasuki rumah para kiai di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah di Sukorejo, Asenbagut, Situbondo, Jatim. Berpakaian hitam hijau, jenderal berusia 54 tahun itu nampak gagah.

Kiai Kaden Ar'ad Syamsul Arifin menyambut kedatangan lamunya, dan menjabat erat-erat tangan Pangab Jenderal LB Moerdani. Di salah satu sudut ruangan yang tertata rapi, keduanya duduk berdampingan, dan berbincang tenang. Banyak santri berebutan memotret mereka.

Kiai Ar'ad dan Jenderal Moerdani

Hari itu, 16 November, Pangab/Pangkep-kam-tib Moerdani berceramah di hadapan sekitar 500 ulama pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur. Di luar gedung, terlihat ribuan santri. Puluhan di antara mereka, menenteng tape recorder besar kecil, merekam ceramah Pangab Benny Moerdani yang sudah empat kali mengunjungi pondok pesantren itu sejak tahun 1984, memang sudah akrab sekali bagi mereka.

Tentang Pemilu Jenderal Moerdani mengingatkan, agar jangan sampai terjadi pertentangan karena pemilu. "Blar saja, suami nyoblos Golkar, istri nyoblos PPP, dan anak nyoblos PDI. Jangan karena istri nyoblos kontestan lain, lantas dicera! Jangan sampai begitu," ujarnya, kembali disambut tepuk tangan riuh, (um).

SALURKAN ASPIRASI ANDA DENGAN CARA MENGGUNAKAN

HAK PILIH YANG TEPAT DAN BENAR

ADIL - 5

Lampiran 12

Suara Muhammadiyah No 14 Th Ke 66 1986 Hasil Penetapan Muhammadiyah Dalam Menetapkan Idul Fitri Pada Tahun 1987

PEMBACA MENULIS

السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته

Alamat Sumarta Masum Dan
Arief Subhan A
SAYA ingin menanyakan
alamat Sumarta Masum yang
mengarang puisi Isra'-Mi'raj
Nabi Muhammad Saw yang
telah dimuat pada SM no. 6 di
ke-67. Dan juga saya mau ta-
nya alamat lengkap Arief
Subhan A yang karyanya be-
rupa kaligrafi juga telah di-
muat pada SM nomor yang
sama pula.

Fajar Ardhy Firmansyah
Jl. Mawar 18 Tanggul
Jember (JATIM)

Red:
1. Sumarta Masum: Peka-
jangan Gang 19 no. 20 RT 19
RW VII, Pekalongan JATENG
2. Arief Subhan A: Siswa
SMP Muhammadiyah 1 Pur-
wodiningrat, Yogyakarta.

Mengajak Merenung
KAMI ingin mengajak me-
renung sehubungan umur
Muhammadiyah yang menje-
lang 77 tahun (menurut Ta-
hun Hijriyah). Dengan berti-
tik-tolak dari umur Muham-
madiyah yang sudah sekian
ini kita mempunyai 3 wawa-
san, yaitu:

1). Muhammadiyah telah
mengalami Mukthamar 41 kali.
Ini dapat kita gambarkan
sebagaimana Nabi waktu
umur 41 tahun, yaitu pada
permulaan menjalankan tugas
kerasulannya. Dengan sikap
ini kita bisa refreshing
(penyegaran).

2). Berhubung sekarang ini
Al-Quran telah genap/kom-
plit, maka dengan sendirinya
kita terjun ke arena dakwah
membawa keseluruhan Al-
Quran yang telah komplit ter-

sebut. Dan untuk ini kita da-
pat mengambil Tema dak-
wah "Memasyarakatkan Al-
Quran" dan dapat kita tem-
puh dengan jalan antara lain:
Setiap mengadakan per-
ingatan turunnya Al-Quran

hendaknya kita selalu menyen-
dikan "Angka Ulang Tahun-
nya", seperti halnya kita men-
gadakan peringatan
Ulang Tahun Kemendekaan.
Semboyan: Muhammadi-
yah, kaulah penolong dunia!

Muhammadiyah, kaulah
nyelamat bumi!

Mohammad Ch
Mhs. Universitas Terbuka
NIM: 000540
Ngawen, Muntiri
JATENG

MENOLAK "SESA
TANTULAK"
PADA "SM" no. 6 ta-
ke 67/Maret II-1987, kam
sempat membaca berita be-
gambar yang memberitakan
"SESAJI TANTULAK", pad
wuku Dayak-Ngaju, Kalima
tan Tengah, yang berkeperca-
yaan Kaharingan.

Kami berharap supaya be-
rita yang tidak sesuai dengan
misi kita (Muhammadiyah)
sejagatnya tak perlu dimuat.
Kita sadari bahwa tugas kita
sebagai warga Muhamma-
diah adalah menghilangkan ke-
percayaan di kalangan ummat,
yang membawa kemusyrikan,
termasuk acara tsb.

Kami khawatir kalau oleh
ummat kita yang imannya be-

**IDUL FITHRI 1407
JUMAT 29 MEI 1987**

PP Muhammadiyah dalam edarannya No. A/1 - 409/1987
tentang Gerak Ramadhan 1987, ditandatangani Ketua HAR
Fakhrudin dan Sekretaris Drs. HA. Rosyad Shaleh, dituju-
kan kepada jajaran Muhammadiyah telah menginstruksikan
rencana usaha menyiarkan bulan Ramadhan.

Selain mempermaklumkan hasil hisab PP Muhammadiyah
Majlis Tarjih, bahwa permulaan Ibadah Puasa Ramadhan
1407 H/1987 jatuh pada hari RABU 29 April 1987, dikemuka-
kan pula bahwa Idul Fithri atau Hari Raya Fithrah 1407 jatuh
pada hari JUMAT tanggal 29 Mei 1987.

Ini berdasarkan hitima' akhir bulan Sya'ban 1407 jatuh pada
tanggal 28 April 1987 pukul 08.40.3, sedangkan hitima' akhir
bulan Ramadhan 1407 pada tanggal 27 Mei 1987 pukul 23.41.3.

Pada akhir instruksinya dikemukakan agar mengembira-
kan pelaksanaan Shalat Idul Fithri di lapangan. ***

4

"Suara Muhammadiyah"

Lampiran 13

Majalah Adil No 2 Th 46 1977 Suasana Hala Bil Halal Tahun 1977

Kari Rapi Fikih baru saja lewat. Setelah upacara sholat itu usai, orang-orang Islam di sini kita ini, biasanya memanfaatkan kesempatan ini untuk saling berjabat tangan, maaf-memaafkan antara sesama. Yang merasa lebih tua, yang merasa kurang keimanan atau mendatangi orang yang ditasaruf, murid-murid berbondong-bondong ke rumah gurunya. Para bawah tangan berduyun-duyun menemui atasan. Tak ketinggalan para pengusaha ke ta'ahin kepondok-pondok pada. Namun aksi benar tampaknya, masing-masing membawa niat yg. berbedabeda. Sebagian ada yang ber-niat tulus mencurahkan rasa bakti dan tawaduk sambil memohon maaf dan doa restu, tetapi sementara rupanya ada juga yang membawa niat yang sudah diumuri oleh kepening-lapentingan dunia. Ingin memperoleh fasilitas yang lebih banyak. Tentu saja kita berdo'a semoga terhindar dari jenis yang terakhir ini, lebih-lebih kalau menjinjing bingkisan segala yang ngan tinta emas, yang berbunyi "SELAH HARI RAYA IDUL FITRI, WAFA LAHIR BAKTI". Tulisan yang hanya formalitas belaka, yang dibalik tatanan huruf-huruf tsb. terkadung maksud-maksud yang menjermukan. Ada udang di balik batu kata pepatah.

Cangkir itu belum juga kering. Pinggan mangkok baru saja dikemas. Tutup-tutup seven up atau coca cola, atau apa lagi, belum juga disingkirkan, datang lagi kesi bukan yang lain, HALAL BI HALAL. Rupanya ini sudah biasa berjalan secara otomatis. Tanpa dikomando, jawatan-jawatan, sekolah-sekolah ormas-ormas bahkan grup-grup suku tertentu sama mengadakan acara dan upacara yang tradisional rele gius tsb. HALAL BI HALAL. Turanpun ditarik, bahkan dulu sebelum ada momentum opstib, agaknya sudah membudaya potong gaji untuk itu. Aula, ruang pertemuan dan kadang kadang harus menyewa gedung bios

kup, ditata rapi, hiasan warna-warni, bergelantungan. Pokoknya biaya, tenaga dan fikiran disedot oleh upacara yang akan diadakan itu, HALAL BI HALAL.

Sebenarnya halal bi halal ceremony ini sering menjadi bahan perbincangan kalangan yang ingin mengkaji mengenai segi historis

atau segi hukumnya. Adakah pada zaman nabi sudah pernah ada? Lalu bagaimana hukumnya? Dan sebagainya. Namun sampai kini ceremony ituupun berjalan terus, sudah merupakan tradisi yang mendarah daging. Bahkan akhir-akhir ini sering menjurus kepada ulah latah, ikut-ikutan. Yang dipentingkan adalah "MENGADAKANNYA", tanpa melihat lebih jauh "APA TUJUAN MENGADAKANNYA". Sehingga jadilah upacara yang tidak konsepional tidak ideal.

HALAL BI HALAL, secara etimologis jelas berasal dari bahasa Arab. Tetapi sebuah penulis ini, unekapan ini tidak berasal dari lisanul 'Arobi, kemungkinan besar adalah berupa ungkapan ala Indonesia, walaupun kata-kata ini diil dari bahasa Arab. Di Negara ini, Indonesia, istilah tsb. mempunyai arti khusus, dan tidak hanya bermakna saling memaafkan. Tetapi kalau istilah itu diucapkan, kita akan membayangkan suatu upacara yang dihadiri orang banyak, kemudian ada pembicara yang berdiri di muka, selain sambutan-sambutan. Dan... tidak ketinggalan makan-minum, atau paling tidak minum-minum. Atau katakanlah sebagai orang punya hajad, atau suatu party.

HALAL BI HALAL DAN AGAMA

"HALAL BI HALAL" itu an sich, yang maksudnya saling memaafkan dan menghalalkan, atau tepatnya saling merelakan, sebab yang mempunyai hak penuh menghalalkan itu adalah si pembuat hukum, memang sudah pernah disinggung-singgung oleh nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhoriy dari Abu Hurairah:

مَنْ كَانَ لَهُ وَظْلَةٌ لِرَجُلٍ مِنْ بَرِيَّةٍ أَوْ شَيْءٌ مَلَائِكَةٍ مِنْهُ لِيَسْتُمْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحَدُ مِائَةٍ يَغْدِرْ ظَلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَحَدٌ مِنْ مِائَةِ صَاحِبِهِ فَعَلَّ كَلْبًا.

Artinya : "Barang siapa pernah berbuat dholim terhadap saudaranya (orang lain), baik yang menyangkut soal kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah minta dihalalkannya (kelezatannya) pada hari (kesempatan) ini, yaitu hari sebelum "suatu hari yang dinar dan dirham tak bakal ada" (hari kiamat). (Bila tidak) maka amal sholehnya akan dipotong oleh kedhalimannya (di dunia). Dan jika dia tidak pernah memiliki amal sholeh maka kejelekannya (kejahatan) orang yang didholimi dahulu diambil untuk dibebankan kepadanya". (SUARA MUHAMMADIYAH, No. 17-18, Th. 56, hal. 27. Diambil dari Fathul Baari, Juz. 6, hal 26-27).

Di lain riwayat pernah disebutkan pula sehubungan dengan ghibah yang tentu saja erat hubungannya dengan halal bi halal. Hadist ini diriwayatkan oleh Thobrooni dan Baihaqiy, sabdanya :

HALAL BIHALAL: Tempat summa Hotel Bihadi Keluarga Besar Sumatera Utara di Grande Poles/R-131

Lampiran 14

Mimbar Agama Mei - Juni 1953 Pembagian Zakat Fitrah Pada Tahun 1953



Pembagian Zakat Fitrah.

Dilakukan sebelum keluar melakukan shalat Idul Fitri. Agama mewajibkan memberikan hiburan sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin pada hari itu, agar dapat pula mereka merayakan kebesaran hari Tuhan.

Lampiran 15

Suara Muhammadiyah No 15 Th Ke 57 1977 Sambutan Menteri Penerangan Pada Hari Raya Idul Fitri Pada Tahun 1977



DR. F. L. TOBING

mebon dan memberikan maaf pada sekalian yang kita temui. Dan didalam menikmati semuanya itu, kegembiraan kita tidak dapat dirangkan oleh kekurangan materi atau apapun.

Adalah terkandung dalam hati sanubari kita sekalian memasuki hari-hari yang datang dengan jiwa yang bersih, yang kuat, hati yang lega, kahi dan tangan yang ringan meneruskan tugas kita masing2 untuk Kemuliaan Tuhan yang Maha Esa dan untuk kebahagiaan Nusa dan Bangsa.

Pada sekalian Saudara2 sebangsa Indonesia yang beragama Islam kami utipkan:

SELAMAT HARI RAYA.

istwa istima Mr. Bouman hubung dengan laporan2 ma pihak Kepolisian, dan kan bahwa Mr. Bouman: pergunakan kapal KPM se larkan diri dari negeri ini.

Dikata Tinggi Sunario an "Antara" tentang daya rikan atas diri Presiden KPM itu, belum sesuai keterangan, terisah meng wa chi itu koi mamb' tingkat pemeriksaan".

Lebih diakh diperden bahwa Kemis ini pihak melandjutkan pemeriksa al ini dengan mendengar an2 dari lain pihak di saan Djakarta.

Siapa2 dan dari kahi diperika dan didengar hari Kemis, belum ada keterangan. Seperti di pertama yang diperika keterangan2nya terbihi istwa ini ialah tawia ni pada hari Rabu 20 diam.

Kantor gdi saku gubung Lebih diakh warta mendapat kabar, babu ngan peristiwa lario itu, maka Kantor Pa Lembaga Alit2 Pe Negeri" (LAAPN) kan perintah untuk la hark-rekeng m caat Mr. Bouman d Perintah blokade rangan, dikuatirkan timbangan, karena yang tak kembali atau meringkikan tidak vish, memany kir segala bankrek distini.

Apabila tindakan diaplakan, maka Bouman di Daka akan ditutup oleh ngan alasan tidak karena tak sang perengkonan kati perombajar gadi p nja.

Kantor Advoc larta Kota, men (Samb. di

Lampiran 16

Majalah Adil No.1 Th. 52 Oktober I 1983

Fatwa MUI Pada Tahun 1983

ALIRAN :
**INGKARSUNNAH
FATWA MUI**

Komisi Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 16 Romadhon 1403 H. yang bertepatan dengan 27 Juni 1983, setelah:

I. Memperhatikan :

Di sementara daerah di Indonesia adanya aliran yang tidak mengakui Hadits Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum syari'at Islam seperti yang ditulis antara lain oleh Irham Sutarto (Karyawan PT Unilever Indonesia di Jakarta).

II. Menimbang :

1. Bahwa Hadits Nabi Muhammad Saw. adalah salah satu sumber syariat

Islam yang wajib dipegang oleh Ummat Islam, berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 dan surat An-Nisaa' ayat 80 dll.

2. Adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat akan merusakkan kemurnian agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan Ummat Islam yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional.

III. Mengingat :

Pendapat-pendapat para anggota Komisi Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia

IV. Memutuskan :

1. Aliran yang tidak mempercayai Hadits Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum syari'at Islam, adalah *sesat dan menyesatkan* dan berada di luar agama Islam.

2. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak sadar telah mengikuti aliran tersebut, agar segera bertaubat.

3. Menyerukan kepada ummat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang menyesatkan itu.

4. Mengharapkan kepada para 'Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.

5. Meminta dengan sangat kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber syari'at Islam.

DEWAN PIMPINAN MAJELIS
'ULAMA INDONESIA.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Komisi Fatwa : | |
| Ketua | Sekretaris, |
| ttd. | ttd. |
| Prof.KH.Ibrahim Hosen | H.Musyari |
| IML. | Yusuf LA. |